

Bidang Unggulan : Penanggulangan Kemiskinan
Kode/Nama Rumpun Ilmu : 561/Ekonomi Pembangunan

LAPORAN TAHUNAN 2017

PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI 2017



MODEL PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN GORONTALO PROVINSI GORONTALO

TIM PENGUSUL

Prof. DR. Rauf A. Hatu, M.Si	: NIDN. 0016126307 (Ketua)
DR. Abd. Rahman Pakaya, M.Si	: NIDN. 0020125810 (Anggota)
DR. Mery Balango, M.Hum	: NIDN. 0021106403 (Anggota)
Drs. Haris Mahmud, M.Si	: NIDN. 0022026105 (Anggota)
DR. Rosman Ilato, M.Pd	: NIDN. 0023046006 (Anggota)

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
OKTOBER 2017

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Model Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo

Peneliti/Pelaksana

Nama Lengkap : Dr. RAUF A HATU, M.Si.
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Gorontalo
NIDN : 0016126307
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Program Studi : Sosiologi
Nomor HP : 08124437713
Alamat surel (e-mail) : rauhatu037@gmail.com

Anggota (1)

Nama Lengkap : ABDUL RAHMAN PAKAYA S.E., M.Si
NIDN : 0020125810
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Gorontalo

Anggota (2)

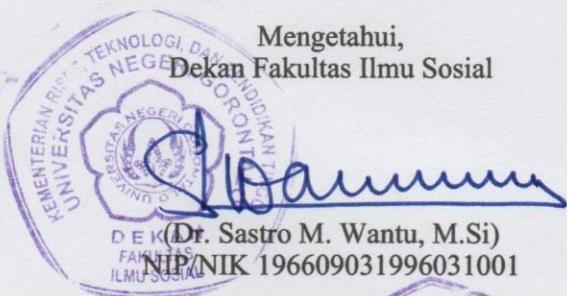
Nama Lengkap : Dra. MERY BALANGO M.Hum
NIDN : 0021106403
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Gorontalo

Anggota (3)

Nama Lengkap : Drs. HARIS MAHMUD M.Si
NIDN : 0022026105
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Gorontalo

Institusi Mitra (jika ada)

Nama Institusi Mitra : -
Alamat : -
Penanggung Jawab : -
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 3 tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp 106,690,000
Biaya Keseluruhan : Rp 635,000,000



GORONTALO, 25 - 10 - 2017
Ketua,

(Dr. RAUF A HATU, M.Si.)
NIP/NIK 196312161991121001



Bidang Unggulan : Pemberdayaan Masyarakat
Kode/Nama Rumpun Ilmu : 561/Ekonomi Pembangunan

LAPORAN TAHUNAN
PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI 2017



**MODEL PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM
IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI KABUPATEN GORONTALO PROVINSI GORONTALO**

TIM PENELITI

Prof. DR. Rauf A. Hatu, M.Si	: NIDN. 0016126307 (Ketua)
DR. Abd. Rahman Pakaya, M.Si	: NIDN. 0020125810 (Anggota)
DR. Mery Balango, M.Hum	: NIDN. 0021106403 (Anggota)
Drs. Haris Mahmud, M.Si	: NIDN. 0022026105 (Anggota)
DR. Rosman Ilato, M.Pd	: NIDN. 0023046006 (Anggota)

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
OKTOBER 2017

PRAKATA

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat melalui Skim Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT) Tahun 2017.

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilaksanakan pada tahun pertama (tahun 2017) dari rencana pelaksanaan selama 3 (tiga) tahun, yaitu dari tahun 2017 sampai dengan 2019.

Sasaran akhir dari pelaksanaan penelitian pada tahun pertama ini (2017) adalah dihasilkannya: identifikasi dan analisis penduduk dan rumah tangga miskin serta keberhasilan program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo.

Kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini, kami sebagai peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Mudah-mudahan hasil penelitian ini dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo dalam mengembangkan kapasitasnya mengimplementasikan program penanggulangan kemiskinan, sehingga pada akhirnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo menurun secara

signifikan.

Peneliti.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN.....	2
PRAKATA.....	3
DAFTAR ISI.....	4
RINGKASAN.....	5
BAB I PENDAHULUAN.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	33
BAB IV METODE PENELITIAN.....	35
BAB V HASIL PENELITIAN, PEMBAHASAN, LUARAN PENELITIAN..	38
BAB VI RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA.....	55
BAB VII KESIMPULAN.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Instrumen Penelitian.....	58

RINGKASAN

Berdasarkan data statistik, Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo termasuk pada daerah yang miskin di wilayah Provinsi Gorontalo, karena: 1) Jumlah penduduk miskin sekitar 21,80%, dan 2) PDRB Perkapita pertahun hanya sekitar Rp.7.945.448,- dibanding rata-rata nasional yang mencapai Rp.36.500.000,- Dalam kaitan inilah, maka kapasitas Institusi Pemerintah Daerah harus diperkuat agar tujuan utama kebijakan otonomi daerah yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian pelayanan publik yang memuaskan dapat tercapai dengan maksimal.

Tujuan jangka pendek penelitian ini adalah dihasilkannya: identifikasi dan analisis penduduk dan rumah tangga miskin serta keberhasilan program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo. Sedangkan tujuan jangka panjang pelaksanaan penelitian ini adalah untuk memformulasi model pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam implementasi program penanggulangan kemiskinan secara teoritik dan empirik, sehingga pada akhirnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo semakin berkurang secara signifikan.

Penelitian ini menggunakan gabungan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dengan analisis kuantitatif deskriptif dan kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan hal-hal sebagai berikut: 1) indikator kemiskinan yang digunakan adalah kriteria kemiskinan bidang: a) ketenagakerjaan dan kewirausahaan, b) kesehatan, c) pendidikan, d) infrastruktur, e) ketahanan pangan; 2) Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gorontalo selama 5 (lima) tahun terakhir lebih besar dari 20%; 3) anggaran program pengentasan kemiskinan melalui perlindungan/bantuan sosial di Kabupaten Gorontalo pada tahun 2015 berjumlah Rp.88.193.298.000,- namun hanya sekitar 0.85% yang digunakan untuk Usaha Ekonomi Produktif masyarakat, sedangkan pada tahun 2016 dari anggaran Rp.108.012.200.000,- hanya sekitar 2.45% yang digunakan untuk Usaha Ekonomi Produktif masyarakat, 4) Belum maksimalnya upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Gorontalo disebabkan karena koordinasi antar sektor yang belum maksimal.

Kunci: Pengembangan Kapasitas, Program penanggulangan Kemiskinan

BAB I

PENDAHULUAN

Tujuan utama dari kebijakan otonomi daerah adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian pelayanan publik (*public services, development for economic growth, dan public protective*) yang memuaskan melalui peran kelembagaan pemerintah daerah. Untuk itulah, maka pemerintah daerah harus diperkuat agar tetap memiliki kapasitas yang memadai dan maksimal dalam mewujudkan tujuan dan hakekat penyelenggaraan otonomi daerah tersebut.

Kapasitas pemerintah daerah dalam perspektif otonomi daerah, terkandung maksud, bahwa pemerintahan daerah memiliki kompetensi dan kapabilitas yang berkelanjutan, sehingga dalam memainkan peran institusi tata kelola pemerintahannya memang secara konkrit ditujukan untuk melayani kepentingan publik (*public services*).

Tingkat keberhasilan program Pemerintah diantaranya sangat dipengaruhi oleh kapasitas pemerintah daerah itu sendiri. Pengembangan kapasitas (*Capacity Building*) menurut Grindle (1997) dan UNDP (1999) bermuara pada tiga level pengembangan kapasitas kelembagaan yakni : 1) level sistem, 2) level organisasi, dan 3) level individu/aparatur.

Salah satu permasalahan yang seharusnya mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat dan daerah adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah

kompleks, dan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Terjadinya kemiskinan karena ketidakberdayaan masyarakat untuk keluar dari permasalahan kemiskinan yang dihadapinya. Karena itu pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah adalah sangat penting dikemukakan sebagai bagian terpenting dari berbagai strategi kebijakan yang dilaksanakan oleh daerah. Melalui strategi yang terencana dengan baik, pemberdayaan masyarakat tidak dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan formal organisasi dan bersifat sporadis seolah-olah mempunyai tujuan nyata, tetapi substansinya hanya administratif.

Berbagai kebijakan dan program pemerintah selama ini telah dilaksanakan dalam rangka menanggulangi kemiskinan di Indonesia, antara lain: Inpres Desa Tertinggal (IDT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Raskin dan Subsidi BBM, Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), serta pengalokasian Dana Desa baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selanjutnya, berdasarkan data statistik tahun 2015, Prosentase penduduk miskin

di Kabupaten Gorontalo pada tahun 2012 menempati urutan pertama diantara 6 Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo yaitu mencapai 20,79 dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 21,57% yang prosentasinya terbesar kedua setelah Kabupaten Boalemo (Kabupaten Gorontalo dalam Angka 2015).

Berdasarkan permasalahan khususnya dalam hal kemiskinan tersebut, maka periset merasa terpanggil untuk melaksanakan suatu penelitian multi tahun dengan judul “Model pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam implementasi program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo”

Rumusan masalah penelitian adalah: 1) bagaimana pemetaan penduduk/rumah tangga miskin, 2) bagaimana kapasitas pemerintah daerah dalam implementasi program penanggulangan kemiskinan, 3) apakah pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dasar dan pengolahan produk unggulan daerah berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan, dan 4) bagaimana model pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam implementasi program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo.

Tujuan khusus penelitian ini adalah dihasilkannya model pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam implementasi program penanggulangan kemiskinan setelah melalui tahapan kegiatan penelitian yang pada akhirnya diharapkan agar jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo semakin berkurang secara signifikan.

Riset ini dipandang sangat urgen karena semua tahapan kegiatan penelitian serta hasil penelitiannya dapat digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah bahkan dapat diadopsi oleh daerah lain dalam implementasi program penanggulangan kemiskinan

yang menjadi fenomena tersendiri di wilayah Republik Indonesia ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo, kegiatan serta hasil riset ini berkontribusi positif dengan prioritas lembaga mitra, karena dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo.

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat dihasilkan Model Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan kajian teoritik dan empirik.

Berdasarkan Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas Negeri Gorontalo, Bidang Unggulan adalah Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, dan salah satu topik unggulannya adalah kajian kemakmuran masyarakat dalam perspektif keekonomian. Berdasarkan bidang unggulan dan topik unggulan tersebut maka dilakukan penelitian yang berjudul “Model pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo.”

Selanjutnya dikemukakan Rencana Target Capaian Tahunan pada tabel berikut:

Tabel 7.1 Rencana Target Capaian Tahunan

No	Jenis Luaran	Indikator			Capaian
		TS	TS+1	TS+2	
1	Publikasi Ilmiah	Internasional	Draft	Submitted	Accepted
		Nasional Terakreditasi	Belum/tidak Ada	Belum/tidak Ada	Belum/tidak Ada
		Nasional tidak Terakreditasi	Draft	Submitted	Accepted
2	Pemakalah dalam Pertemuan Ilmiah	Internasional	Belum/tidak Ada	Belum/tidak Ada	Belum/tidak Ada
		Nasional	Draft	Terdaftar	Sudah dilaksanakan
		Lokal	Terdaftar	Sudah dilaksanakan	

3	<i>Keynote Speaker</i> dalam Pertemuan ilmiah	Internasional	Belum/ tidak Ada	Belum/ tidak Ada	Belum/ tidak Ada
		Nasional	Belum/ tidak Ada	Belum/ tidak Ada	Belum/ tidak Ada
		Lokal	Belum/ tidak Ada	Terdaftar	Sudah dilaksanakan
4	<i>Visitting Lecturer</i>	Internasional	Belum/ tidak Ada	Belum/ tidak Ada	Belum/ tidak Ada
5	Hak Atas kekayaan Intelektual (HKI)	Paten	Belum/ tidak Ada	Belum/ tidak Ada	Belum/ tidak Ada
		Paten Sederhana	Belum/ tidak Ada	Belum/ tidak Ada	Draft
		Hak Cipta	Belum/ tidak Ada	Belum/ tidak Ada	Belum/ tidak Ada
		Merek Dagang	Belum/ tidak Ada	Belum/ tidak Ada	Belum/ tidak Ada
		Rahasia Dagang	Belum/ tidak Ada	Belum/ tidak Ada	Belum/ tidak Ada
		Desain Produk Industri	Belum/ tidak Ada	Belum/ tidak Ada	Belum/ tidak Ada
		Indikasi Geografis	Belum/ tidak Ada	Belum/ tidak Ada	Belum/ tidak Ada
		Perlindungan Varietes Tanaman	Belum/ tidak Ada	Belum/ tidak Ada	Belum/ tidak Ada
		Perlindungan Tofografi Sirkuit Terpadu	Belum/ tidak Ada	Belum/ tidak Ada	Belum/ tidak Ada
6	Teknologi Tepat Guna		Belum/ tidak Ada	Belum/ tidak Ada	Belum/ tidak Ada
7	Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial	Draft	Produk	Penerapan	
8	Buku Ajar (ISBN)	Belum/ tidak Ada	Draft	Proses editing	
9	Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)	-	1	2	

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah

Pengembangan kapasitas pemerintah daerah berarti upaya menyesuaikan, mereformasi, dan memodifikasi semua kebijakan, peraturan, prosedur, mekanisme kerja, koordinasi; meningkatkan keterampilan dan kualifikasi aparatur pemerintah daerah; dan merubah sistem nilai dan sikap yang dijadikan acuan aparatur pemerintah daerah agar pemerintah daerah mampu menyelenggarakan tata pemerintahan yang demokratis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan kapasitas pemerintah daerah tidak lepas dari eksistensi dari birokrasi itu sendiri yang cenderung berubah. Thoha (2005) menegaskan bahwa kalau birokrasi tidak melakukan perubahan atau revitalisasi dirinya, maka birokrasi akan digulung oleh perubahan itu sendiri. Artinya, kalau rakyat secara keseluruhan sudah banyak mengalami perubahan dan dinamis, sementara itu birokrasi publik tidak berubah dan senantiasa mempertahankan stabilitasnya, maka rakyat akan meninggalkannya atau paling tidak akan berpaling mencari alternatif pelayanan birokrasi lain dan tidak mempedulikan lagi yang diperbuat birokrasi publik. Pada gilirannya birokrasi publik akan mengalami kesulitan untuk membangkitkan partisipasi rakyat atau masyarakat yang sangat diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan itu.

Capacity Building mencakup tiga level intervensi sebagaimana ditegaskan oleh

Grindle (1997) dan UNDP (1999), yaitu:

1. Level sistem, yaitu intervensi pada pengaturan program kerja dan kebijakan dalam sistem pemerintahan daerah sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan yang diinginkan.
2. Level kelembagaan/institutional, yaitu intervensi pada penataan struktur organisasi, proses pengambilan keputusan organisasi, prosedur dan mekanisme kerja, instrumen manajemen, dan hubungan atau jaringan antara organisasi satu dengan organisasi lainnya.
3. Level individual atau aparatur, yaitu intervensi pada peningkatan kualitas individu aparatur pemerintah daerah sehingga memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap, etika, dan motivasi kerja sehingga berkemampuan menyelenggarakan tata kepemerintahan yang baik (*good governance*).

Pengembangan kapasitas pemerintah daerah melalui intervensi pada level sistem, level kelembagaan/institutional, dan level individual atau aparatur pemerintah daerah adalah suatu upaya dengan pendekatan multi-dimensi. Oleh karena itu, perencanaannya mesti ditentukan dalam tahapan waktu yang rasional: pendek, menengah, dan panjang. Setiap tahapan harus ditetapkan prioritas-prioritasnya. Prioritas pertama dari semua tahapan tersebut adalah membuat kebijakan dan peraturan pendukung yang dapat menciptakan sistem yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Kebijakan dan peraturan pendukung dimaksud adalah penjabaran secara lebih operasional dari framework otonomi Daerah, yang wujudnya adalah penyesuaian dan modifikasi semua perangkat peraturan perundangan organik berupa kebijakan daerah seperti Perda, keputusan kepala daerah, dan keputusan pimpinan DPRD. Semua

kebijakan dan peraturan tersebut harus jelas menggambarkan sistem dan mekanisme prosedural yang melibatkan semua level tersebut. Prioritas berikutnya adalah menangani permasalahan yang terjadi dalam hubungan antar unit dan antar sektor di lingkungan pemerintah daerah.

Pengembangan kapasitas tidak hanya ditujukan pada lembaga pemerintahan tapi juga DPRD dan stakeholder yang luas: partai politik, lembaga-lembaga pendukung, kelompok masyarakat lokal, dan masyarakat madani secara luas. Semua komponen stakeholder tersebut menjadi penting dalam pengembangan kapasitas karena menjadi infrastruktur bagi terciptanya sistem *good governance*.

Agar pemerintah daerah dapat mengembangkan daerahnya menjadi daerah dengan masyarakatnya yang sejahtera maka pemerintah daerah harus melakukan *capacity building*. Dengan pengembangan kapasitas pada ketiga level pengembangan, maka pemerintah daerah akan dapat mengembangkan diri sebagai organisasi penyelenggara pemerintahan dan pembangunan yang efektif dan efisien. pemerintah daerah yang kapabel dan kredibel akan efektif dan efisien pula mewujudkan tujuan yang ingin dicapai.

Pemerintah daerah yang demikian adalah pemerintah daerah yang melaksanakan fungsinya secara benar. Fungsi utama pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan publik yang *excellen/prima*. Pelayanan publik mencakup *public services*, *development for economic growth*, dan *public protective* (pelayanan masyarakat baik perorangan maupun kelompok, pembangunan sarana dan prasarana untuk pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional, dan pemberian ketentraman/keamanan/ketertiban kepada masyarakat). pemerintah daerah harus dapat memberikan

pelayanan publik yang meliputi tiga bidang tersebut dengan kualitas pelayanan yang bagus/*better*, cepat/*faster*, dan murah/*cheaper*.

Dalam hal fungsi kedua pemerintah daerah yaitu *fungsi development for economic growth* maka pemerintah daerah dituntut menjadi fasilitator yang kompeten. Dalam hal ini pemerintah daerah bukan bertindak sebagai konsultan tapi sebagai penyelenggara pembangunan yang kompeten. Pemerintah daerah bekerjasama dengan stakeholder menyiapkan sarana dan prasarana bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang mempermudah akses, produksi, transportasi, dan pemasaran baik lokal, regional, nasional, maupun internasional sehingga membuka peluang seluas-luasnya kepada masyarakat daerah yang bersangkutan untuk mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki. Dalam rangka pelayanan prima, pemerintah daerah harus memberikan kemudahan dan insentif kepada masyarakat agar terangsang untuk mengembangkan potensi ekonomis yang masih belum tergarap.

Dengan pemberian pelayanan prima dalam *development for economic growth* tersebut maka pemerintah daerah akan menghasilkan output dan outcome yang berdampak langsung bagi pengembangan ekonomi secara menyeluruh yang pada gilirannya akan menciptakan peningkatan kesejahteraan masyarakat baik masyarakat daerahnya sendiri, masyarakat daerah sekitarnya, maupun masyarakat secara nasional.

Agar pemerintah daerah dapat melaksanakan fungsi *development for economic growth* tersebut dengan output dan outcome maksimal, maka pemerintah daerah perlu melakukan *assessment* terhadap potensi yang dimilikinya. Dengan *assessment* maka akan dapat diketahui secara tepat potensi apa yang paling kuat yang bisa dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut. Potensi yang paling menonjol dan utama

inilah lalu dijadikan prioritas pengembangan. Dengan memilih satu potensi utama, pemerintah daerah lalu melakukan pengembangan kapasitas yang lebih fokus yaitu pada kemampuan/kompeten menangani satu atau lebih potensi yang paling menonjol tersebut.

Agar pemerintah daerah memiliki kompetensi demikian maka pengembangan kapasitas menjadi tuntutan utama. Dengan pengembangan kapasitas maka pemerintah daerah akan berkemampuan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dan pada pelayanan bidang development for economic growth maka pemerintah daerah menjadi sangat kompeten yang dapat ditunjukkan dengan kinerja yang efektif dan efisien.

B. Strategi dan Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan

1. Sebab-sebab terjadinya kemiskinan

Kemiskinan dapat menunjuk pada kondisi individu, kelompok, maupun situasi kolektif masyarakat. Kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor. Sulit ditemukan bahwa kemiskinan hanya disebabkan oleh faktor tunggal. Seseorang atau keluarga miskin bisa disebabkan oleh beberapa faktor yang saling terkait satu sama lain, seperti mengalami kecacatan, memiliki pendidikan rendah, tidak memiliki modal atau ketrampilan untuk berusaha, tidak tersedianya kesempatan kerja, terkenan PHK, tidak adanya jaminan sosial (pensiun, kesehatan, kematian), atau hidup di lokasi terpencil dengan sumber daya alam dan infrastruktur yang terbatas.

Secara konseptual menurut Suharto (2009:18), kemiskinan dapat disebabkan oleh empat faktor, yaitu:

- a) Faktor individual. Terkait dengan aspek patologis, termasuk kondisi fisik dan psikologis si miskin. Orang miskin disebabkan oleh perilaku, pilihan, atau

kemampuan dari si miskin itu sendiri dalam menghadapi kehidupannya.

- b) Faktor sosial. Kondisi-kondisi lingkungan sosial yang menjebak seseorang menjadi miskin. Misalnya, diskriminasi berdasarkan usia, jender, etnis yang menyebabkan seseorang menjadi miskin. Termasuk dalam faktor ini adalah kondisi sosial dan ekonomi keluarga si miskin yang biasanya menyebabkan kemiskinan antar generasi.
- c) Faktor kultural. Kondisi atau kualitas budaya yang menyebabkan kemiskinan. Faktor ini secara khusus sering menunjukkan pada konsep "kemiskinan kultural" atau "budaya kemiskinan" yang menghubungkan kemiskinan dengan kebiasaan hidup atau mentalitas. Sikap-sikap negatif seperti malas, fatalisme atau menyerah pada nasib, tidak memiliki jiwa wirausaha, dan kurang menghormati etos kerja, misalnya, sering ditemukan pada orang-orang miskin.
- d) Faktor struktural. Menunjuk pada struktur atau sistem yang tidak adil, tidak sensitif dan tidak *accesible* sehingga menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Sebagai contoh, sistem ekonomi neoliberalisme yang diterapkan di Indonesia telah menyebabkan para petani, nelayan, dan pekerja sektor informal terjerat oleh, dan sulit keluar dari kemiskinan. Sebaliknya, stimulus ekonomi, pajak dan iklim investasi lebih menguntungkan orang kaya dan pemodal asing untuk terus menumpuk kekayaannya.

Selanjutnya Kartasasmita (2004 : 7), menegaskan bahwa kemiskinan paling tidak disebabkan oleh empat faktor:

- a) Rendahnya taraf pendidikan. Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dapat dimasuki.

- b) Rendahnya derajat kesehatan. Taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir, dan rendahnya prakarsa.
- c) Terbatasnya lapangan kerja. Keadaan kemiskinan karena kondisi pendidikan diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama ada lapangan kerja atau kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan.
- d) Kondisi keterisolasi. Banyak penduduk miskin, secara ekonomi tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi. Mereka hidup terpencil sehingga sulit atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan, dan gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat lainnya.

2. Karakteristik kemiskinan

Sumodiningrat (1999:81), mendeskripsikan berbagai cara pengukuran kemiskinan dengan standar yang berbeda-beda, dengan tetap memperhatikan dua kategori tingkat kemiskinan, sebagai berikut:

- a) Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan;
- b) Kemiskinan relatif adalah penghitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan dalam suatu daerah. Kemiskinan jenis ini dikatakan relatif karena berkaitan dengan distribusi pendapatan antar lapisan sosial.

Suharto (2009:16) menunjukkan sembilan karakteristik yang menandai kemiskinan, yaitu:

- a) Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang, dan

papan).

- b) Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental;
- c) Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil);
- d) Rendahnya kualitas sumber daya manusia (buta huruf, rendahnya pendidikan dan ketrampilan, sakit-sakitan) dan keterbatasan sumber alam (tanah tidak subur, lokasi terpencil, ketiadaan infrastruktur jalan, listrik, dan lain-lain).
- e) Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual (rendahnya pendapatan dan set), maupun massal (rendahnya modal sosial, ketiadaan fasilitas umum).
- f) Ketiadaan akses terhadap lapangan pekerjaan dan mata pencaharian yang memadai dan berkesinambungan.
- g) Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
- h) Ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga atau tidak adanya perlindungan sosial dari negara dan masyarakat), dan
- i) Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.

Pemahaman terhadap karakteristik kemiskinan dimaksudkan agar dapat pula mengetahui strategi program yang relevan dengan upaya penanggulangan kemiskinan tersebut. Kemiskinan sebagai suatu kondisi dalam realitas yang melilit manusia dan seolah tak kunjung usai, entah kapan berakhirnya.

3. Strategi penanggulangan kemiskinan

Kemiskinan absolut di negara yang berkembang termasuk Indonesia menurut Izza Mafruhah (2009 : 37 – 38) sulit untuk dihilangkan, terutama disebabkan oleh

beberapa faktor sebagai berikut:

- a) Laju pertumbuhan ekonomi secara makro yang lambat. Dengan laju pertumbuhan ekonomi yang lambat, maka peluang kerja tidak bisa tumbuh dengan cepat sehingga penyerapan tenaga kerja juga lambat. Hal ini mempunyai konsekwensi kesempatan masyarakat untuk keluar dari kemiskinan juga sempit. Di banyak negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia, lambatnya pertumbuhan ini ditambah dengan keputusan politik yang lebih menguntungkan kelompok ekonomi kuat. Pertumbuhan ekonomi dengan sistem *trickle down effect* juga menyebabkan ketimpangan dalam mayarakat semakin tinggi.
- b) Pola pertumbuhan yang kurang bersahabat dengan masyarakat miskin. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan pemerintah cenderung *urban biased*, kebijakan ini kurang menguntungkan bagi petani dan masyarakat pedesaan yang masih kurang dalam menangkap kebijakan dengan alih teknologi.
- c) Kegagalan pemerintah dalam menciptakan peluang kerja. Dalam pembangunan pilihan efisiensi dengan mengandalkan padat modal melalui pemanfaatan mesin-mesin dengan teknologi tinggi secara nyata bertentangan dengan pemerataan kesempatan kerja yang seharusnya bersifat padat karya. Mekanisme pasar yang digagas untuk pertumbuhan ekonomi secara cepat ini sering tidak mampu menyediakan barang-barang publik yang merupakan kebutuhan dasar (*basic needs*) seperti pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar yang lain.

Sehubungan dengan permasalahan kemiskinan, Paul Polak (2008:13-14) mengemukakan sebelas langkah untuk memecahkan masalah termasuk masalah kemiskinan:

- a) *Go to where the action is* (lakukan ditempat yang tepat)
- b) *Talk to the people who have the problem and listen to what they say* (bicarakan dengan masyarakat yang bermasalah dan dengarkan apa kata mereka)
- c) *Learn everything you can about the problem's specific context Think big and act big* (pelajarilah masalah secara spesifik, berpikir dan bertindaklah sebaik mungkin.)
- d) *Think like a child* (berpikir seperti anak)
- e) *See and do the obvious* (lihat dan lakukan dengan jelas)
- f) *If somebody has already invented it, you don't need to do so again* (jika sudah ada yang pernah melakukannya tidak perlu dilakukan lagi)
- g) *Make sure your approach has positive measurable impacts that can be brought to scale. Make sure it can reach at least a million people and make their lives measurably better* (perjelas bahwa pendekatan anda memiliki dampak positif yang dapat diukur, setidaknya bagi satu juta orang dan membuat hidup mereka dapat diukur perbaikannya.)
- h) *Design to specific cost and price targets* (rancanglah target harga dan biaya yang spesifik)
- i) *Follow practical three-year plans* (ikuti langkah praktis rencana tiga tahunan)
- j) *Continue to learn from your customers* (teruslah belajar dari pelanggan anda)
- k) *Stay positive: don't be distracted by what other people think* (bersikap positif, jangan terganggu dengan apa yang dipikirkan oleh orang lain)

Pendekatan pembangunan yang berpusat pada rakyat sangat relevan sebagai paradigma kebijakan desentralisasi dalam penanganan masalah sosial termasuk masalah kemiskinan. Pendekatan ini menyadari tentang betapa pentingnya kapasitas masyarakat

untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal melalui kesanggupan untuk melakukan kontrol internal atas sumber daya materi dan nonmaterial.

Selanjutnya Hikmat (2004:15-16) menyatakan bahwa : Ada tiga dasar untuk melakukan perubahan-perubahan struktural dan normatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat, yaitu:

- a) Memusatkan pemikiran dan tindakan kebijakan pemerintah pada penciptaan keadaan-keadaan yang mendorong dan mendukung usaha-usaha rakyat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri, dan untuk memecahkan masalah-masalah mereka sendiri di tingkat individual, keluarga, dan komunitas,
- b) Mengembangkan struktur-struktur dan proses organisasi-organisasi yang berfungsi menurut kaidah-kaidah sistem organisasi,
- c) Mengembangkan sistem-sistem produksi-konsumsi yang diorganisasi secara teritorial yang berlandaskan pada kaidah-kaidah pemilikan dan pengendalian lokal.

Kendati demikian, model pembangunan yang berpusat kepada rakyat lebih menekankan pada pemberdayaan (*empowerment*). Model ini memandang inisiatif-kreatif rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang paling utama dan memandang kesejahteraan material-spiritual rakyat sebagai tujuan yang harus dicapai oleh proses pembangunan. Kajian strategis pemberdayaan masyarakat, baik ekonomi, sosial, budaya maupun politik menjadi penting sebagai input untuk reformulasi pembangunan yang berpusat pada rakyat. Reformulasi ini memberikan peluang yang sangat besar bagi masyarakat untuk membangun secara partisipatif. Dalam pembangunan partisipatif, pemberdayaan merupakan salah satu strategi yang dianggap tepat jika faktor-faktor determinan dikondisikan sedemikian rupa sehingga esensi pemberdayaan tidak

terdistorsi.

Kondisi tersebut mencerminkan perlu adanya pergeseran peran pemerintah yang bersifat mendesak dari peran sebagai penyelenggara pelayanan sosial menjadi fasilitator, mediator, koordinator, pendidik, mobilisator, sistem pendukung, dan peran-peran lainnya yang lebih mengarah pada pelayanan tidak langsung. Adapun peran organisasi lokal, organisasi sosial, LSM dan kelompok masyarakat lainnya lebih dipacu sebagai agen pelaksana perubahan dan pelaksana pelayanan sosial kepada kelompok rentan atau masyarakat pada umumnya. Dalam posisi sedemikian, permasalahan sosial ditangani oleh masyarakat atas fasilitasi pemerintah.

Berkenaan dengan strategi pemberdayaan, Mark G. Hanna dan Buddy Robinson (dalam Hikmat, 2004:19) mengemukakan bahwa ada tiga strategi utama pemberdayaan dalam praktek perubahan sosial, yaitu :

- a) *Strategi tradisional* (aksi tradisional), menyarankan agar mengetahui dan memilih kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan,
- b) *Strategidirect-action* (aksi langsung), membutuhkan dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat, dipandang dari sudut perubahan yang mungkin terjadi, dan
- c) *Strategi transformatif*, menunjukkan bahwa pendidikan massa dalam jangka panjang dibutuhkan sebelum pengidentifikasiannya kepentingan diri sendiri.

Selanjutnya upaya pembangunan manusia dari keterpurukan, paling tidak ada empat elemen dasar yang perlu diperhatikan sebagaimana ditegaskan oleh UNDP (dalam Izza Mafruhah, 2009 : 39-40), yaitu:

- a) Produktivitas, manusia harus berkemampuan untuk meningkatkan produktivitasnya

dan berpartisipasi penuh dalam proses mencari penghasilan dan lapangan kerja. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari model pembangunan manusia.

- b) Pemerataan, setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapuskan sehingga semua orang dapat berpartisipasi dan mendapatkan keuntungan dari peluang yang tersedia.
- c) Keberlanjutan, akses terhadap peluang/kesempatan harus tersedia bukan hanya untuk generasi sekarang tapi juga untuk generasi yang akan datang. Semua bentuk sumber daya fisik, manusia, alam harus dapat diperbarui.
- d) Pemberdayaan, pembangunan harus dilakukan oleh semua orang, bukan semata-mata dilakukan untuk semua orang. Sehingga setiap orang harus berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan dan proses yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Upaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan adalah partisipasi aktif seluruh masyarakat melalui sebuah gerakan yang massif. Gerakan ini dilakukan untuk menghilangkan kesan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan “hanya” merupakan tanggung jawab pemerintah. Partisipasi aktif masyarakat juga menunjukkan bahwa mereka memiliki empati yang dalam yang dibangun dari prinsip *silih asih, silih asuh dan silih asah*. Kepedulian pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dapat dilihat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (P2KP-PNPM) yang secara substantif menggugah partisipasi aktif masyarakat dalam ikutserta dalam gerakan penanggulangan kemiskinan.

Sehubungan dengan peran pemerintah dalam setiap program pembangunan yang

bersentuhan dengan kepentingan publik itu, ditegaskan bahwa Program pemberdayaan masyarakat dirancang oleh pemerintah untuk memecahkan tiga masalah utama pembangunan yakni pengangguran, ketimpangan, dan pengentasan kemiskinan. Upaya pengentasan kemiskinan yang dianjurkan menurut kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat tak lain adalah kebijaksanaan memberi ruang gerak, fasilitas publik dan kesempatan-kesempatan yang kondusif bagi maraknya kemampuan dan kemungkinan kelompok masyarakat miskin untuk mengatasi masalah mereka sendiri dan tidak untuk justru menekan dan mendesak mereka ke pinggir-pinggir atau ke posisi-posisi ketergantungan

Kemiskinan merupakan permasalahan klasik yang selalu muncul dalam kehidupan masyarakat. Masalah distribusi pendapatan, kemiskinan dan pengangguran adalah masalah yang paling mudah disulut dan merebak pada permasalahan yang lain, karena itu harus diwaspadai agar tidak menimbulkan gejolak sosial lainnya dalam kehidupan kemasyarakatan.

Kemiskinan sebagai masalah nasional, tidak dapat hanya diselesaikan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan pembangunan, tetapi juga harus menjadi tanggungjawab bersama bagi semua pelaku pembangunan termasuk masyarakat itu sendiri. Kunci pemecahan masalah kemiskinan adalah memberi kesempatan kepada penduduk miskin untuk ikutserta dalam proses produksi dan kepemilikan aset produksi.

C. Birokrasi dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Peran birokrasi pemerintahan dalam upaya menyukseskan program penanggulangan kemiskinan, memiliki kedudukan yang strategis dan mementukan

kelancaran serta kesinambungan program tersebut. Peran birokrasi pemerintahan hingga ke tingkat kelurahan yang mempunyai akses langsung selaku penanggungjawab, pelaksana, dan pendamping (fasilitator), harus mampu merangsang tumbuhnya *"development creativity and motivating"* di masyarakat.

Ragam usaha menumbuhkan kreativitas dan motivasi masyarakat miskin agar memiliki *"self confidence"* untuk berkiprah dalam pembangunan memerlukan *"capability and capacity organization"* atau unsur birokrasi pemerintahan yang kuat, baik aspek internal administratif, maupun eksternal administratif, berupa transformasi sosial budaya lewat pendekatan pemberdayaan sosial. Ini memuat persepsi, kemampuan dan kreativitas birokrasi pemerintahan sebagai pelaksana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), melalui pendekatan sosial berupa pemberdayaan masyarakat miskin untuk mobilisasi "melek pengetahuan dan sains", ketrampilan masyarakat, serta kepercayaan dan motivasi diri" dalam rangka peningkatan SDM penduduk miskin.

Pendekatan pemberdayaan dan pembelajaran yang dilakukan birokrasi pemerintah daerah selaku pelaksana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), memerlukan suasana transformasi pembangunan sosial yang menuntut keprofesionalan, sikap kemitraan, dialogis, dan keteladanan unsur birokrasi pemerintahan.

Bentuk transformasi pembangunan sosial yang strategis mengacu pada keterkaitan dan kesepadan berbagai kepentingan yang diarahkan untuk menumbuhkan pengetahuan, ketrampilan, dan motivasi kelompok sasaran, pengembangan permodalan, pengembangan peluang kerja dan berusaha. Selain itu yang lebih penting juga,

mewujudkan pelembagaan kelompok miskin yang memberi peluang tumbuhnya kegotongroyongan, keswadayaan, serta partisipasi aktif selaku subyek dan obyek pembangunan.

Masalah kemiskinan berkaitan erat dengan masalah sumber daya manusia, tingkat pendidikan, dan strategi pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat. Menurut teori perubahan sosial (*social change*), peningkatan mutu sumber daya manusia sangat relevan dengan pendidikan dalam rangka pembangunan sistem sosial dengan sudut pandang yang berlainan, baik secara makro maupun mikro, antara lain pandangan teori modernisasi dari struktur fungsional, *human capital*, ketergantungan, konflik, dan sikap skeptis.

Pemberdayaan masyarakat miskin dilakukan dengan memperhatikan karakteristik pokok pendekatan pembangunan yang berpusat pada manusia, sebagaimana dikemukakan oleh Korten (dalam Supriatna, 1997 : 39) sebagai berikut:

1. Keputusan dan inisiatif untuk memenuhi kebutuhan rakyat dibuat di tingkat lokal, yang di dalamnya rakyat memiliki identitas dan peran yang dilakukan sebagai partisipasi aktif.
2. Fokus utama pembangunan adalah memperkuat kemampuan rakyat miskin dalam mengawasi dan mengerahkan aset-aset guna memenuhi kebutuhan yang khas menurut daerah mereka sendiri.
3. Pendekatan ini mempunyai toleransi terhadap perbedaan dan karenanya mengakui arti penting pilihan nilai individual dan pembuatan keputusan yang terdistribusi.
4. Dalam melaksanakan pembangunan, pendekatan ini menekankan pada proses "*social learning*", yang di dalamnya ada interaksi-kolaborasi antara birokrasi dan

komunitas, mulai dari proses perencanaan sampai evaluasi proyek atas dasar saling belajar.

5. Budaya kelembagaan yang ditandai oleh adanya organisasi yang bisa mengatur diri dan lebih terdistribusi, yang berarti pula menandai adanya unit-unit lokal yang mampu mengelola diri, terintegrasi satu sama lain guna memberikan umpan balik pelaksanaan yang cepat dan kaya kepada semua tingkat organisasi yang membantu tindakan koreksi diri. Dengan demikian, keseimbangan yang lebih baik antara struktur vertikal dan horizontal dapat terwujud.
6. Proses pembentukan jaringan koalisi dan komunikasi antara birokrasi dan lembaga lokal (LSM), satuan organisasi tradisional yang mandiri, merupakan bagian integral dari pendekatan ini, baik untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengidentifikasi dan mengelola berbagai sumber, maupun untuk menjaga keseimbangan antara struktur vertikal dan horizontal.

Strategi dan pendekatan pembangunan demikian lebih terfokus pada keunggulan potensi untuk memperbaiki proses pelaksanaan pembangunan dengan memberi kekuatan, kesempatan, dan kekuasaan individu, kelompok sasaran lokal, masyarakat serta struktur kelembagaan pembangunan (*capacity, capability, and institutional locally*) agar berpartisipasi dalam proses pembangunan. Pendekatan ini berusaha mengurangi ketergantungan masyarakat kepada birokrasi pemerintahan. Birokrasi pemerintahan dalam pelayanan publik hendaknya lebih berperan dan berfungsi sebagai "*rowing organization*" daripada "*steering organization*", sehingga dapat menjamin tumbuhnya "*self-sustaining capacity*" masyarakat menuju "*sustained development*".

Supriatna (1997 : 113) menunjukkan bahwa sosok birokrasi pemerintahan

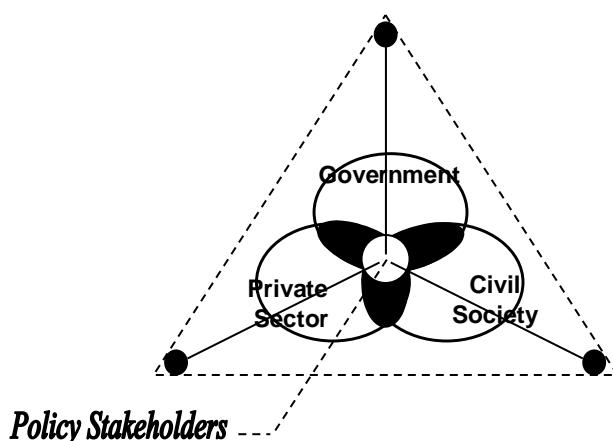
sampai ke tingkat lokal selaku pelaksana program pembangunan masyarakat miskin harus mampu memberdayakan (*empowering*), menciptakan iklim kondusif agar anggota masyarakat dapat mengembangkan berbagai potensinya, baik potensi sosial, intelektual, mental spiritual maupun potensi fisik secara maksimal, maupun fungsi integrasi agar profilerasi kelembagaan, diferensiasi struktural dan fungsional, tekanan penduduk terhadap sumber, dan sebagainya tidak menimbulkan disintegrasi. Kualitas birokrasi pelaksana program seperti ini adalah:

- 1) Mampu menumbuhkan "*self-sustaining capacity*" dan menghilangkan "*dependency creating*" masyarakat, yang secara terencana dan bertahap menyerahkan tanggungjawab dan kewenangan pembangunan kepada masyarakat untuk mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan potensi yang mereka miliki.
- 2) Birokrasi, hingga ke tingkat lokal, tidak lagi bersikap "*governing*" dalam merealisasikan rencana pembangunan yang dirumuskan secara sentralistik, tapi bertindak sebagai "*fasilitator*", yaitu menciptakan lingkungan sosial yang memungkinkan potensi-potensi tersebut tumbuh dan berkembang. Misalnya, melalui pembentukan jaringan atau gugus proses belajar (*social learning clusters*) yang merangsang mereka mengenali permasalahannya sendiri, mengidentifikasi berbagai sumber yang mereka miliki dan secara besama-sama mengatasi permasalahan mereka.
- 3) Pembangunan masyarakat yang bertujuan menciptakan kualitas masyarakat yang dicita-citakan bertumpu pada pengakuan adanya variasi sosio-kultural diantara daerah yang menuntut cegah kebijakan yang uniformitas dan stereotipikal.
- 4) Birokrasi pelaksana harus memberi peluang bagi tumbuhnya lembaga-lembaga

swakelola "self managing local unit" melalui interaksi dengan lembaga-lembaga swakelola agar tercapai mobilisasi sumber yang amat besar: komitmen, kreatif, energi, dan, dan daya yang akan menjadi tumpuan masyarakat dalam mempertahankan momentum pembangunan.

- 5) Mampu melaksanakan fungsi yang dicitrakan oleh hegel, yaitu sebagai "*mediating agent*" antara kepentingan khusus dan kepentingan nasional, menjembatani "*civil society*" sebagai cerminan berbagai kepentingan khusus, dan sebagai "*the state*" yang mencerminkan "*general interest*". Inilah yang dikenal dengan fungsi "*integratif birokrasi*".

Kaitannya dengan upaya penanggulangan kemiskinan khususnya dalam perspektif otonomi daerah, maka pelaksana program strategi penanggulangan kemiskinan atau sebagai agent perubahan, tentunya tak lepas dari eksistensi *policy of stakeholders* atau pihak yang berkepentingan dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan, yaitu : *Government, Private Sector, dan Civil Society*. Ketiga sektor yang berkepentingan dengan kebijakan tersebut dapat diilustrasikan pada gambar berikut ini:



Gambar 19 : Tiga sektor yang berkepentingan dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan (Sumber : Kadji, 2008)

Ilustrasi gambar diatas lebih menegaskan bahwa dalam hal pelaksana strategi

penanggulangan kemiskinan sebagai agent perubahan, tiada lain adalah tiga sektor yang bersentuhan langsung dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan, yakni : *Government, Private Sector, and Civil Society.*

Pemerintah (*Government*) dalam eksistensinya baik sebagai pihak pembuat dan pengambil kebijakan (aktor kebijakan), juga pemerintah sebagai aparatur pelaksana/ implementor kebijakan penanggulangan kemiskinan. Sektor Swasta (pengusaha, wiraswastawan/ entrepreneur) sebagai pihak yang harus terpanggil ikut serta dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan. Sementara masyarakat madani (*civil society*) sebagai pihak yang mestinya menyadari bahwa masyarakat tidak lagi sekedar objek dari sebuah kebijakan penanggulangan kemiskinan, tapi sekaligus juga sebagai subjek dari kebijakan. Dalam hal ini pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Dalam proses pemberdayaan masyarakat sekaligus juga memberdayakan organisasi masyarakat, maka menurut Roesmidi dan Riza Risyanti (2006 : 68-69) perlu dilakukan melalui pendekatan sebagai berikut:

- 1) Pendekatan kemanusiaan, walaupun tidak memberdayakan masyarakat sebagai kelompok sasarannya, akan tetapi dapat memberdayakan organisasi masyarakat (BKM/LPM) itu sendiri. Tujuan pendekatan ini adalah membantu secara spontan dan sukarela kelompok masyarakat tertentu yang membutuhkan bantuan karena musibah atau kurang beruntung.
- 2) Pendekatan pengembangan masyarakat bertujuan mengembangkan, memandirikan, dan menswadayaikan masyarakat.
- 3) Pendekatan pemberdayaan rakyat bertujuan untuk memperkuat posisi tawar

masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan.

Prosedur dalam melakukan perubahan

Kendala yang dihadapi dapat dikurangi, bila:

- a) Warga masyarakat dilibatkan dalam mendiagnosis masalah, sehingga mereka tahu dan setuju masalahnya memang penting.
- b) Proyek yang dikembangkan diadopsi berdasarkan diskusi dan kesepakatan kelompok.
- c) Kelompok pendukung dan kelompok penentang menyadari tujuan perubahannya, serta dapat mengurangi rasa khawatir dalam masyarakat.
- d) Warga masyarakat dapat memberikan umpan balik dan mengklasifikasikan program perubahan yang dilakukan sehingga kesalahpahaman dan ketidakmengertian masyarakat dapat dikurangi.
- e) Warga masyarakat percaya, mau menerima dengan senang hati, serta mendukung relasi yang sudah berkembang.

Proyek pengembangan tetap memberikan kesempatan dan terbuka untuk diperbaiki/dikaji ulang, jika pengalaman-pengalaman yang muncul adalah yang tidak diinginkan atau tidak menyenangkan.

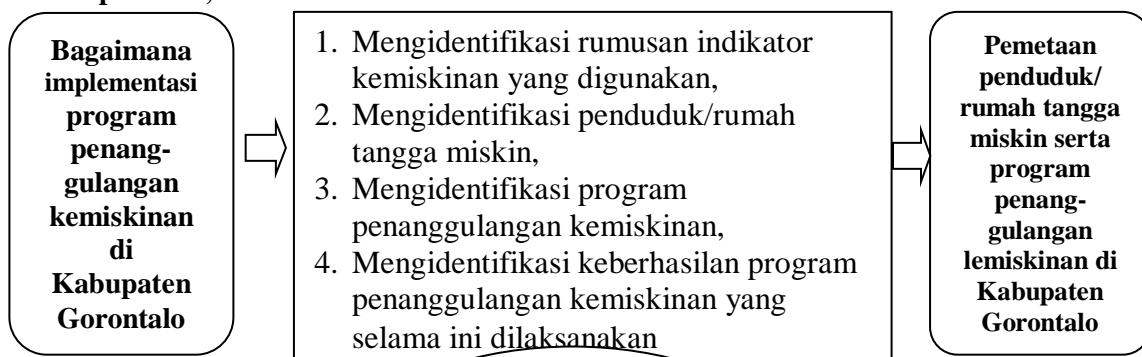
Topik kajian, kegiatan penelitian yang akan dilaksanakan, serta hasil yang diharapkan dicapai terungkap dalam Road Map penelitian sebagai berikut:

Model pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah dalam implementasi program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo

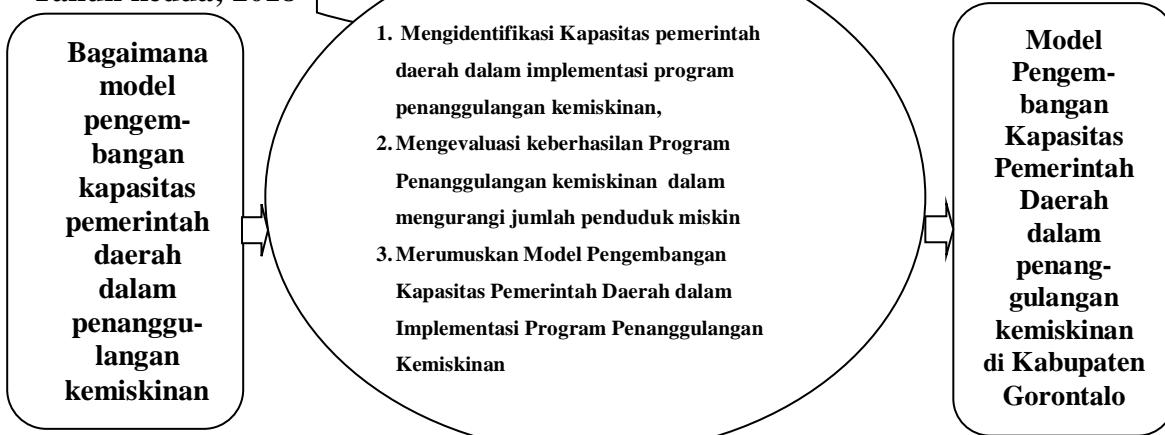
Penelitian Sebelumnya

1. Kajian Penentuan Komoditas, Produk dan Jenis Usaha Unggulan Provinsi Gorontalo; Kerja sama Universitas Negeri Gorontalo dengan Bank Indonesia Cabang Gorontalo; (Rauf A. Hatu, 2011)
2. Menganalisis potensi daerah dalam rangka meningkatkan daya saing dan keunggulan daerah; (Abd. Rahman Pakaya, 2015)
3. Model pengembangan komoditas unggulan daerah dalam menunjang perekonomian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Provinsi Gorontalo (Haris Machmud, 2016)

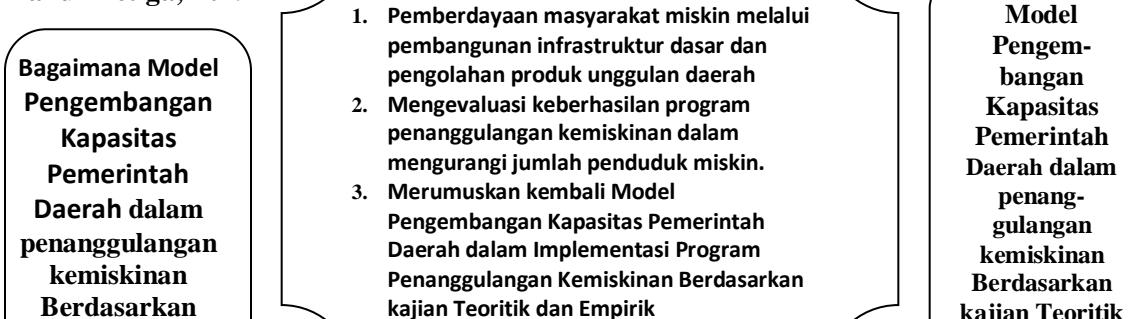
Tahun pertama; 2017



Tahun kedua; 2018



Tahun ketiga; 2019





BAB IV. BIAYA

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengidentifikasi rumusan indikator kemiskinan yang digunakan untuk menetapkan penduduk miskin di Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo;
2. Untuk melakukan identifikasi terhadap penduduk/rumah tangga miskin di Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo;
3. Untuk Mengidentifikasi program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo;
4. Untuk Mengidentifikasi keberhasilan program penanggulangan kemiskinan yang selama ini dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo;

B. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini terdiri dari:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah dapat digunakan untuk mengembangkan konsep atau ilmu tentang: 1) Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah, 2) Implementasi Program atau Implementasi kebijakan, dan 3) Program Penanggulangan Kemiskinan.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sampai dengan Pemerintah Kecamatan dan Desa dalam melaksanakan Program Penanggulangan Kemiskinan, sehingga pada akhirnya jumlah penduduk dan rumah tangga miskin di Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo menurun atau berkurang secara signifikan.

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo, dengan lokus penelitian: Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kecamatan dan Desa, serta Organisasi Perangkat daerah (OPD) lainnya yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo. Waktu pelaksanaan penelitian dimulai dari bulan April sampai dengan November tahun 2017.

B. Penetapan Informan Penelitian

Informan penelitian terdiri dari:

1. Para pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan: Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kecamatan dan Desa, serta Organisasi Perngkat daerah (OPD) lainnya yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo.

2. Masyarakat di Desa tempat implementasi program penanggulangan kemiskinan di wilayah Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan gabungan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dengan analisis kuantitatif deskriptif dan kualitatif deskriptif. Unit analisis adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi yang terpilih dan representatif. Metode riset yang digunakan adalah Evaluasi Program. Teknik pengumpulan data menggunakan: wawancara tertutup dan terbuka, dokumentasi, observasi, dan Focuss Group Discussion (FGD), berdasarkan Instrumen Penelitian terlampir. Teknik analisis data menggunakan tahapan: 1) pengumpulan data, 2) analisis data kuantitatif, 3) penyajian data kuantitatif melalui tabel frekuensi dan diagram kecenderungan, 4) pemaknaan deskripsi data yang tergambar dalam tabel frekuensi dan diagram kecenderungan; dilanjutkan dan dikembangkan dengan tahapan analisis kualitatif: 5) reduksi data, 6) penyajian data, dan 7) penarikan kesimpulan/verifikasi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang yang digunakan dengan saling melengkapi terdiri dari:

1. Dokumentasi;

Teknik dokumentasi yang diperoleh dari data Badan Pusat Statistik digunakan untuk mendapatkan data dan informasi penelitian tentang kemiskinan di wilayah Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo;

2. Wawancara;

Teknik wawancara dilaksanakan dengan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) dan representasi masyarakat digunakan untuk mendapatkan data dan informasi penelitian berupa pengecekan dan pengembangan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik serta data dan informasi lainnya yang relevan;

3. Observasi.

Teknik observasi digunakan untuk mendapatkan data dan informasi tentang implementasi program penanggulangan kemiskinan serta data dan informasi lainnya yang relevan;

4. Angket.

Teknik angket digunakan untuk mendapatkan data dan informasi tentang: implementasi program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo;

5. Fokus Group Discussion (FGD).

Teknik Fokus Group Discussion (FGD) digunakan untuk melengkapi data dan informasi penelitian, baik selama pelaksanaan pengumpulan data dan informasi maupun setelah penyusunan draft laporan hasil penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif dan kualitatif deskriptif.

BAB V

HASIL PENELITIAN, PEMBAHASAN, DAN LUARAN PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Kondisi Umum Daerah Kabupaten Gorontalo

Berdasarkan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Gorontalo tahun 2016-2020, Kabupaten Gorontalo sebagian besar wilayahnya berbentuk dataran, perbukitan rendah, dan dataran tinggi. Secara administrative Kabupaten Gorontalo memiliki batas: sebelah utara dengan Kabupaten Gorontalo Utara, sebelah selatan dengan Teluk Tomini, sebelah timur dengan Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo, sebelah barat dengan Kabupaten Boalemo.

Sebagian besar wilayah di Kabupaten Gorontalo merupakan daerah pertanian. Berdasar jalur lintas antar daerah, kondisi wilayah Kabupaten Gorontalo dilewati jalur jalan negara yang merupakan jalur ekonomi yang menghubungkan Kabupaten Gorontalo dengan Kota Gorontalo (Ibukota Provinsi Gorontalo) serta daerah-daerah lainnya. Jalur ini melewati beberapa wilayah Kecamatan di Kabupaten Gorontalo, sehingga wilayah-wilayah tersebut cepat berkembang terutama di bidang pertanian, perdagangan, dan jasa.

Berdasarkan letak Kota dan mobilitas kegiatan masyarakat, pusat pertumbuhan di wilayah Kabupaten Gorontalo berada pada Kecamatan Limboto terutama Kota Limboto yang merupakan Ibukota Kabupaten Gorontalo, selain itu di Kecamatan Telaga yang merupakan Kecamatan yang berbatasan dengan Kota

Gorontalo, juga menjadi pusat kegiatan masyarakat sehingga pertumbuhannya semakin baik.

Potensi sumberdaya alam di Kabupaten Gorontalo cukup besar dan beragam yang dapat dimanfaatkan sebagai modal dasar pembangunan. Sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya pertanian, perkebunan, tanaman pangan, peternakan, perikanan, sumberdaya hutan, mineral dan energy, pariwisata, serta perindustrian.

Potensi lahan di Kabupaten Gorontalo mencapai 33.806 Ha, dimana luas panen padi sawah 26.149 Ha dengan produksi 149.049 ton, padi lading dengan luas panen 576 Ha memproduksi 2.016 ton. Subsektor tanaman bahan makanan meliputi tanaman padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah dan kacang kedelai, buah-buahan dan sayuran merupakan salah satu subsektor pada sector pertanian. Selain itu didukung dengan irigasi teknis mencapai 11.270 Ha, tada hujan 2.671 Ha, dan pasang surut 17 Ha. Sedangkan lahan yang belum dimanfaatkan sebesar 109 Ha.

Jumlah penduduk Kabupaten Gorontalo pada akhir tahun 2016 berjumlah 388.014 jiwa. Perbandingan komposisi penduduk menurut jenis kelamin sebesar 50.15% penduduk laki-laki dan 49.85% penduduk perempuan, sehingga sex ratio penduduk sebesar 100.62. Berdasarkan struktur usia, terendah pada struktur usia di atas 74 tahun dengan persentase 1.28% dan yang tertinggi adalah jumlah penduduk dengan usia 10-14 tahun sebesar 10.54%.

Tabel 5.1
Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dan Kepala Keluarga (KK)
menurut Kecamatan tahun 2016

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	KK
1	Limboto	25.090	25.469	50.559	15.438
2	Telaga	11.334	11.550	22.884	6.911
3	Batudaa	7.126	7.146	14.290	4.320
4	Tibawa	20.544	20.603	41.147	12.972
5	Batudaa Pantai	6.018	5.889	11.907	3.559
6	Bongomeme	8.406	8.257	16.663	5.218
7	Telaga Biru	14.155	14.240	28.395	8.664
8	Dungalio	9.807	9.581	19.388	6.040
9	Tolangohula	11.330	10.989	22.319	6.935
10	Tabongo	9.629	9.321	18.950	5.699
11	Pulubala	12.335	12.193	24.528	7.839
12	Boliyohuto	12.318	12.556	24.874	7.933
13	Tilango	7.123	7.063	14.186	4.254
14	Bilato	9.161	9.006	18.167	5.692
15	Biluhu	4.348	4.005	8.253	2.467
16	Mootilango	6.620	6.264	12.884	3.910
17	Talaga Jaya	5.736	5.806	11.542	3.481
18	Asparaga	4.778	4.716	9.494	2.874
19	Dungaliyo	8.744	8.740	17.484	5.461
	Jumlah	194.602	193.412	388.014	119.667

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo

2. Indikator Kemiskinan di Kabupaten Gorontalo

Berdasarkan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2016-2020, Kabupaten Gorontalo telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) sebagai Tim yang secara khusus mengkoordinir Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di daerah. Dalam membuat strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Gorontalo digunakan kriteria sebagai berikut:

2.1 Kriteria Kemiskinan Bidang ketenagakerjaan dan Kewirausahaan:

- 2.1.1 Tidak mempunyai pekerjaan tetap. Sebagian besar masyarakat terutama yang bertempat tinggal di pedesaan dan daerah terpencil tidak memiliki pekerjaan yang tetap yang menyebabkan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya
- 2.1.2 Tenaga kerja yang kurang terampil. Banyak tenaga kerja yang tidak memiliki ketrampilan akibat pendidikan yang rendah yang menyebabkan sulitnya memperoleh pekerjaan yang layak dan tidak mampu bersaing dipasaran kerja
- 2.1.3 Terbatasnya lapangan kerja dan tempat berusaha. Sulitnya memperoleh pekerjaan yang disebabkan oleh adanya persaingan dengan para pendatang/urban yang terlatih dan sulitnya memperoleh modal usaha akibat terbatasnya akses informasi terhadap modal usaha serta belum optimalnya pengelolaan sumber daya local yang tersedia.

2.2 Kriteria Kemiskinan Bidang Keehatan

- 2.2.1 Tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Kurangnya kesadaran dan pendidikan masyarakat dibidang kesehatan yang disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah,
- 2.2.2 Balita kurang gizi dan gizi buruk. Rendahnya pendapatan yang diperoleh sehingga banyak masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari,
- 2.2.3 Terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang tidak memadai akibat kemampuan keuangan daerah yang terbatas dan minimnya jumlah tenaga kesehatan yang

tersedia.

2.3 Kriteria Kemiskinan Bidang Pendidikan;

- 2.3.1 Tingginya Angka Partisipasi Kasar (APK). Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pendidikan sehingga banyak orang tua yang enggan menyekolahkan anaknya pada usia sekolah 7 tahun,
- 2.3.2 Rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM). Terbatasnya penyediaan sarana dan prasarana pendidikan terutama di daerah pedesaan dan daerah terpencil yang masih sulit dijangkau,
- 2.3.3 Tingginya Angka Putus Sekolah (APS). RENDAHNYA pendapatan dan kesadaran masyarakat sehingga banyak orang tua yang tidak mampu dan tidak mau menyekolahkan anaknya pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

2.4 Kriteria Kemiskinan Bidang Infrastruktur;

- 2.4.1 Rumah tangga yang tidak layak huni. Banyaknya rumah tangga miskin cenderung memiliki tempat tinggal dengan luas lantai yang lebih kecil yang dapat membatasi keleluasaan melakukan aktivitas rumah tangga yang terkait erat dengan kemampuan untuk bekerja di rumah, beristirahat, belajar dan kegiatan rumah tangga lainnya,
- 2.4.2 Air minum yang tidak layak. Rumah tangga miskin memiliki akses yang lebih rendah terhadap air bersih dibandingkan dengan rumah tangga sejahtera, sebaliknya akses rumah tangga miskin terhadap sumber air lainnya seperti mata air, sumur tidak terlindungi, air hujan dan air sungai ternyata lebih tinggi,

2.4.3 Sanitasi lingkungan yang kurang memadai. Rumah tangga miskin menghadapi persolan akses pada sanitasi yang layak. Kemiskinan menjadi alasan bagi penduduk miskin tidak mampu memiliki tempat tinggal yang layak dan sehat, tinggl di rumah yang sempit dengan sanitasi yang tidak memadai membuat penduduk miskin lebih rentan terhadap penyakit menular, gangguan pernafasan dan pencernaan yang akan mempengaruhi proses perkembangan fisik, kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia ketika anak-anak dewasa.

2.5 Kriteria Kemiskinan Bidang Ketahanan Pangan;

2.5.1 Harga beras yang tidak stabil. Perkembangan harga beras yang cenderung meningkat membuat masyarakat miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari akibat rendahnya pendapatan yang diperoleh,

2.5.2 Harga bahan kebutuhan pokok utama lainnya yang tidak terkendali. Harga bahan kebutuhan pokok utama lainnya yang cenderung meningkat dan tidak terkendali menyebabkan masyarakat miskin semakin sulit dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,

2.5.3 Struktur ekonomi yang kurang stabil. Struktur ekonomi yang kurang stabil akibat timbulnya krisis ekonomi global dan gejolak harga yang terjadi dalam sistem perkonomian daerah.

3. Profil Kemiskinan Kabupaten Gorontalo

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo,

persentase penduduk miskin di Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo cukup bervariasi dari tahun ke tahun, sebagaimana dikemukakan pada tabel berikut:

Tabel 5.2
Persentase penduduk miskin menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo
Tahun 2012 – 2016

Kabupaten/Kota	Percentase Penduduk Miskin (%)				
	2012	2013	2014	2015	2016
Kota Gorontalo	5.61	5.99	5.85	6.05	6.05
Kabupaten Gorontalo	20.79	21.57	21.05	21.80	21.30
Kabupaten Boalemo	20.42	21.79	20.79	21.66	21.11
Kabupaten Pohuwato	20.78	21.47	20.69	22.43	21.18
Kabupaten Bone Bolango	16.67	17.19	16.68	18.49	17.97
Kabupaten Gorontalo Utara	18.54	19.16	18.34	18.93	18.51
Provinsi Gorontalo	17.22	18.00	17.41	18.32	17.72

Sumber: BPS Kabupaten Gorontalo

Berdasarkan tabel 5.2 di atas persentase penduduk miskin khususnya di Kabupaten Gorontalo selama 5 (lima) tahun terakhir, yaitu tahun 2012 sebesar 20.79% (ranking terbanyak pertama), tahun 2013 sebesar 21.57% (ranking terbanyak kedua), tahun 2014 sebesar 21.05% (ranking terbanyak pertama), tahun 2015 sebesar 21.80% (ranking terbanyak kedua), dan tahun 2016 sebesar 21.30% (ranking terbanyak pertama).

Berdasarkan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Gorontalo 2016-2020, Rumah tangga dalam Basis Data Terpadu dapat dikelompokkan ke dalam kelompok yang disebut Desil. Desil adalah kelompok per-sepuluhan sehingga seluruh rumah tangga dapat dibagi ke dalam 10 Desil. Dengan demikian pengelompokan rumah tangga dalam Basis Data Terpadu adalah sebagai berikut:

- a. Desil 1 adalah rumah tangga dalam kelompok 10% terrendah;
- b. Desil 2 adalah rumah tangga dalam kelompok 20% terrendah;

c. Desil 3 adalah rumah tangga dalam kelompok 30% terrendah;

d. Desil 4 adalah rumah tangga dalam kelompok 40% terrendah;

Basis Data Terpadu berisikan kelompok Desil 1, Desil 2, Desil 3, dan Desil 4, karena memuat 40% rumah tangga dengan peringkat Kesejahteraan terrendah.

Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Gorontalo per 31 Desember 2016 menurut Desil 1 sampai dengan Desil 4 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3

Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Gorontalo menurut Status Kesejahteraan (Desil) Sampai dengan 40% Peringkat Kesejahteraan Terrendah

No	Kecamatan	Desa	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Total
1	Tibawa	16	4.097	263	190	203	4.753
2	Limboto	14	2.662	309	290	348	3.609
3	Pulubala	13	3.086	131	9	95	3.404
4	Telaga Biru	15	2.362	243	209	215	3.029
5	Bongomeme	15	2.755	117	98	75	3.045
6	Limboto Barat	10	2.520	220	204	222	3.166
7	Mootilango	10	2.321	149	166	122	2.758
8	Tolangohula	15	2.379	144	140	144	2.807
9	Tabongo	9	2.024	206	142	154	2.526
10	Dungaliyo	10	1.924	134	134	113	2.305
11	Telaga	9	1.307	143	124	168	1.742
12	Batudaa Pantai	9	1.407	97	97	97	1.698
13	Boliyohuto	13	1.403	137	93	96	1.729
14	Asparaga	10	1.477	70	47	40	1.634
15	Tilango	8	980	122	117	111	1.330
16	Batudaa	8	1.049	107	104	102	1.362
17	Bilato	10	1.248	73	47	54	1.422
18	Talaga Jaya	5	850	115	121	121	1.207
19	Biluhu	8	1.059	60	42	47	1.208
	Jumlah	207	36.910	2.840	2.457	2.527	44.734

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo

Berdasarkan tabel 5.3 di atas dapatlah disimpulkan bahwa pada 19 Kecamatan dan 207 Desa di Kabupaten Gorontalo terdapat 44.734 Rumah Tangga yang Status Kesejahteraannya (Desil) sampai dengan 40% Peringkat Kesejahteraan Terrendah, yang terdiri dari: sebanyak 36.910 Rumah Tangga kategori Desil 1, sebanyak 2.840 Rumah Tangga kategori Desil 2, sebanyak 2.457 Rumah Tangga kategori Desil 3, dan 2.527 Rumah Tangga kategori Desil 4.

Jumlah Individu di Kabupaten Gorontalo per 31 Desember 2016 menurut Desil 1 sampai dengan Desil 4 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4
Jumlah Individu di Kabupaten Gorontalo menurut Status Kesejahteraan (Desil)
Sampai dengan 40% Peringkat Kesejahteraan Terrendah

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Total
1	Tibawa	16	18.049	893	692	750	20.384
2	Limboto	14	12.268	1.194	1.076	1.408	15.946
3	Pulubala	13	13.022	457	335	352	14.166
4	Telaga Biru	15	10.804	981	835	875	13.495
5	Bongomeme	15	11.616	418	378	290	12.702
6	Limboto Barat	10	10.272	724	663	753	12.412
7	Mootilango	10	10.053	560	594	450	11.657
8	Tolangohula	15	9.967	475	479	571	11.492
9	Tabongo	9	8.658	772	490	620	10.540
10	Dungaliyo	10	8.910	540	538	486	10.474
11	Telaga	9	6.384	616	543	742	8.285
12	Batudaa Pantai	9	6.323	407	369	379	7.478
13	Boliyohuto	13	6.052	386	295	333	7.066
14	Asparaga	10	6.226	265	174	143	6.808
15	Tilango	8	5.209	522	503	517	6.751

16	Batudaa	8	5.314	485	482	419	6.700
17	Bilato	10	5.454	275	146	230	6.105
18	Talaga Jaya	5	3.868	397	433	436	5.134
19	Biluhu	8	4.565	210	143	174	5.092
	Jumlah	207	163.014	10.577	9.168	9.928	192.687

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo

Berdasarkan tabel 5.4 di atas dapatlah disimpulkan bahwa pada 19 Kecamatan dan 207 Desa di Kabupaten Gorontalo terdapat 192.687 Individu yang Status Kesejahteraannya (Desil) sampai dengan 40% Peringkat Kesejahteraan Terrendah, yang terdiri dari: sebanyak 163.014 individu kategori Desil 1, sebanyak 10.577 individu kategori Desil 2, sebanyak 9.168 individu kategori Desil 3, dan 9.928 individu kategori Desil 4.

Secara keseluruhan Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gorontalo berjumlah 191.405 jiwa atau sekitar 48% dari penduduk yang berjumlah 398.459 jiwa. Selain itu jumlah Kepala Keluarga miskin adalah 44.443 KK atau sekitar 37% dari Kepala Keluarga yang berjumlah 119.579 KK. Selanjutnya dikemukakan Rekapitulasi jumlah Penduduk dan Penduduk Miskin berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Gorontalo, Tahun 2016.

Tabel 5.5
Rekapitulasi jumlah penduduk dan penduduk miskin di Kabupaten Gorontalo
Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Miskin			
			Jiwa	KK	Jiwa	%	KK	%
1	Tibawa	16	42.936	13.220	20.384	47	4.753	36
2	Limboto	14	50.160	15.143	15.946	32	3.609	24
3	Pulubala	11	24.916	7.635	13.720	55	3.305	43
4	Telaga Biru	15	29.753	8.765	13.495	45	3.029	35
5	Bongomeme	15	20.144	6.094	12.702	63	3.045	50

6	Limboto Barat	10	23.226	7.148	11.576	50	2.974	42
7	Mootilango	10	19.616	5.771	11.657	59	2.758	48
8	Tolangohula	15	23.908	7.026	11.492	48	2.807	40
9	Tabongo	9	18.819	5.730	10.540	56	2.526	44
10	Dungaliyo	10	18.140	5.581	10.474	58	2.305	41
11	Telaga	9	23.162	6.933	8.285	36	1.742	25
12	Batudaa Pantai	9	12.368	3.577	7.478	60	1.698	47
13	Boliyohuto	13	17.257	5.278	7.066	41	1.729	33
14	Asparaga	10	13.877	4.026	6.808	49	1.634	41
15	Tilango	8	14.862	4.290	6.751	45	1.330	31
16	Batudaa	8	14.824	4.404	6.700	45	1.362	31
17	Bilato	10	9.889	2.922	6.105	62	1.422	49
18	Talaga Jaya	5	11.992	3.553	5.134	43	1.207	34
19	Biluhu	8	8.610	2.483	5.092	59	1.208	49
	Jumlah	207	398.459	119.579	191.405	48	44.443	37

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo

Tabel 5.5 di atas menunjukkan bahwa dari keseluruhan penduduk yang berjumlah 398.459 jiwa, 191.405 jiwa atau sekitar 48% penduduk miskin, dan dari 119.579 kepala keluarga terdapat 44.443 atau 37% kepala keluarga miskin. Selain itu dari 19 (sembilanbelas) Kecamatan, terdapat 9 (Sembilan) Kecamatan atau sekitar 47% yang penduduknya miskin lebih dari 50%, yaitu Kecamatan Bongomeme, Bilato, Batudaa Pantai, Biluhu, Mootilango, Dungaliyo, Tabongo, Pulubala, dan Limboto Barat.

4. Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Gorontalo

Program pengentasan kemiskinan melalui Perlindungan/Bantuan Sosial yang dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo pada tahun 2015 seluruhnya menghabiskan anggaran sejumlah Rp. 88.193.298.000,- Sedangkan pada tahun 2016 berjumlah Rp.108.012.200.000,- dengan rincian kegiatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.6
Program Pengentasan Kemiskinan melalui Perlindungan/Bantuan Sosial
Di Kabupaten Gorontalo Tahun 2015

No	Jenis Program	Penanggung Jawab	Jumlah Realisasi Anggaran		
			APBN	APBD 1	APBD 2
1	Rumah Tinggal Sederhana (RTS)/ Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH)	Pekerjaan Umum	1.200.000.000	-	-
2	Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BSLM-KKS)	Dinas Sosial	17.835.000.000	-	-
3	Program Keluarga Harapan (PKH)	Dinas Sosial	3.116.700.000	-	-
4	Jamkesda/ Jamkesta	Dinas Kesehatan	5.383.840.000	1.231.880.000	639.538.000
5	Listrik Gratis	Dinas Pertambangan dan Energi	10.000.000.000	10.000.000.000	500.000.000
6	Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Dinas Pertanian	648.000.000	100.000.000	-
7	Lanjut Usia	Dinas Sosial	18.000.000	-	-
8	Kartu Indonesia Pintar (KIP)/ SD	Dinas Pendidikan	14.873.400.000	-	-
9	Kartu Indonesia Pintar (KIP)/SMP	Dinas Pendidikan	11.679.000.000	-	-
10	Kartu Indonesia Pintar (KIP)/SM	Dinas Pendidikan	5.830.000.000	-	-
11	Kartu Indonesia Pintar (KIP)/PT	Perguruan Tinggi	-	-	-
12	Raskin	Dinas Sosial	5.129.540.000	-	-
13	ADKB	Dinas Sosial	8.400.000	-	-
	Jumlah		75.721.880.000	11.331.880.000	1.139.538.000
	Total Anggaran		Rp. 88.193.298.000		

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo

Tabel 5.7
Program Pengentasan Kemiskinan melalui Perlindungan/Bantuan Sosial
Di Kabupaten Gorontalo Tahun 2016

No	Jenis Program	Penanggung Jawab	Jumlah Realisasi Anggaran		
			APBN	APBD 1	APBD 2
1	Rumah Tinggal Sederhana (RTS)/ Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH)	Pekerjaan Umum	1.500.000.000	-	-
2	Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BSLM-KKS)	Dinas Sosial	19.835.000.000	-	-
3	Program Keluarga Harapan (PKH)	Dinas Sosial	4.616.700.000	-	-
4	Jamkesda/ Jamkesta	Dinas Kesehatan	6.390.000.000	1.735.000.000	1.150.000.000
5	Listrik Gratis	Dinas Pertambangan dan Energi	12.000.000.000	12.500.000.000	1.000.000.000
6	Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Dinas Pertanian	1.150.000.000	500.000.000	1.000.000.000
7	Lanjut Usia	Dinas Sosial	25.000.000	50.000.000	50.000.000
8	Kartu Indonesia Pintar (KIP)/ SD	Dinas Pendidikan	16.000.000.000	-	-
9	Kartu Indonesia Pintar (KIP)/SMP	Dinas Pendidikan	13.750.000.000	-	-
10	Kartu Indonesia Pintar (KIP)/SM	Dinas Pendidikan	7.000.000.000	-	-
11	Kartu Indonesia Pintar (KIP)/PT	Perguruan Tinggi	-	-	250.000.000
12	Raskin	Dinas Sosial	7.500.000.000	-	-
13	ADKB	Dinas Sosial	10.500.000	-	-
	Jumlah		89.777.200.000	14.785.000.000	3.450.000.000
	Total Anggaran		Rp. 108.012.200.000		

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo

Berdasarkan tabel 5.6 dan tabel 5.7 di atas dapat disimpulkan bahwa total anggaran Program Pengentasan Kemiskinan melalui Perlindungan/Bantuan Sosial di Kabupaten Gorontalo tahun anggaran 2015 berjumlah Rp. 88.193.298.000,- dan pada tahun anggaran 2016 meningkat menjadi Rp. 108.012.200.000,- atau meningkat sekitar 18.35%. Dari total anggaran 2015, sebagian besar digunakan untuk Perlindungan/Bantuan Sosial dan hanya Rp. 748.000.000,- atau hanya sekitar 0.85% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat miskin melalui program Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Selain itu Dari total anggaran 2016, sebagian besar digunakan untuk Perlindungan/Bantuan Sosial dan hanya Rp. 2.650.000.000,- atau hanya sekitar 2.45% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat miskin melalui program Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

B. Pembahasan

1. Indikator Kemiskinan di Kabupaten Gorontalo

Berdasarkan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2016-2020 Kabupaten Gorontalo, indikator yang digunakan dalam menentukan penduduk dan rumah tangga miskin terdiri dari: a) Kriteria Kemiskinan Bidang ketenagakerjaan dan Kewirausahaan, b) Kriteria Kemiskinan Bidang Kesehatan, c) Kriteria Kemiskinan Bidang Pendidikan, d) Kriteria Kemiskinan Bidang Infrastruktur; dan e) Kriteria Kemiskinan Bidang Ketahanan Pangan.

Indikator kemiskinan tersebut menghasilkan pengelompokan rumah tangga

miskin ke dalam kelompok yang disebut desil. Desil adalah kelompok persepuluhan sehingga seluruh rumah tangga dapat dibagi ke dalam 10 Desil. Dengan demikian pengelompokan rumah tangga dalam Basis Data Terpadu adalah sebagai berikut: a) Desil 1 adalah rumah tangga dalam kelompok 10% terrendah; b) Desil 2 adalah rumah tangga dalam kelompok 20% terrendah; c) Desil 3 adalah rumah tangga dalam kelompok 30% terrendah; dan d) Desil 4 adalah rumah tangga dalam kelompok 40% terrendah.

Basis Data Terpadu berisikan kelompok Desil 1, Desil 2, Desil 3, dan Desil 4, dan menghasilkan 40% rumah tangga dengan peringkat Kesejahteraan terrendah. Berdasarkan data tersebut maka penduduk miskin di Kabupaten Gorontalo berjumlah 191.405 jiwa atau sekitar 48% dari keseluruhan penduduk yang berjumlah 398.459 jiwa, sedangkan kepala keluarga miskin berjumlah 44.443 atau 37% dari keseluruhan kepala keluarga yang berjumlah 119.579 kepala keluarga.

Data bahwa di Kabupaten Gorontalo, penduduk miskin berjumlah 191.405 jiwa atau sekitar 48% dari keseluruhan penduduk yang berjumlah 398.459 jiwa, dan kepala keluarga miskin berjumlah 44.443 atau 37% dari keseluruhan kepala keluarga yang berjumlah 119.579 kepala keluarga berbeda dengan data Badan Pusat Statistik yang menyatakan bahwa penduduk miskin di Kabupaten Gorontalo pada tahun 2016 berjumlah 21.30%. Perbedaan jumlah tersebut disebabkan oleh berbedanya indikator kemiskinan yang digunakan baik oleh Badan Penanggulangan Kemiskinan maupun oleh Badan Pusat statistik Kabupaten Gorontalo.

2. Profil Kemiskinan Kabupaten Gorontalo

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo, menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo dari tahun 2012 sampai dengan 2016 cukup bervariasi, namun yang menarik adalah semuanya berada pada level lebih dari 20% dari jumlah penduduk secara keseluruhan.

Kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, selama 5 (lima) tahun terakhir, yaitu tahun 2012 sebesar 20.79% (ranking terbanyak pertama), tahun 2013 sebesar 21.57% (ranking terbanyak kedua), tahun 2014 sebesar 21.05% (ranking terbanyak pertama), tahun 2015 sebesar 21.80% (ranking terbanyak kedua), dan tahun 2016 sebesar 21.30% (ranking terbanyak pertama). Bahkan menurut data pada Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016-2020, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gorontalo pada tahun 2016 berjumlah 191.405 jiwa atau sekitar 48% dari keseluruhan yang berjumlah 398.459 jiwa. Selain itu jumlah kepala keluarga (KK) miskin adalah 44.443 KK atau sekitar 37% dari keseluruhan 119.579 Kepala Keluarga.

3. Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Gorontalo

Sebenarnya anggaran program pengentasan kemiskinan melalui Perlindungan/Bantuan Sosial yang dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo pada tahun 2015 seluruhnya berjumlah Rp. 88.193.298.000,- dan pada tahun 2016 berjumlah Rp.108.012.200.000,- Namun dari total anggaran tersebut sebagian besar dari total anggaran 2015, digunakan untuk Perlindungan/Bantuan Sosial

dan hanya Rp. 748.000.000,- atau hanya sekitar 0.85% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat miskin melalui program Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Selain itu Dari total anggaran 2016, sebagian besar digunakan untuk Perlindungan/ Bantuan Sosial dan hanya Rp. 2.650.000.000,- atau hanya sekitar 2.45% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat miskin melalui program Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

C. Luaran Penelitian

Luaran hasil penelitian tahun pertama (2017) akan dipublikasikan pada:

1. Jurnal internasional Asian Journal Scientific Research pada bulan Desember 2017;
2. Proseding melalui Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Organisasi profesi International Association Public Administration (IAPA) pada bulan Desember 2017 di Yogyakarta.

BAB VI

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Sebagaimana telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya bahwa tujuan pelaksanaan penelitian pada tahun pertama (2017) ini adalah: 1) mengidentifikasi rumusan indikator kemiskinan yang digunakan, 2) mengidentifikasi penduduk/rumah tangga miskin, 3) mengidentifikasi program penanggulangan kemiskinan yang selama ini dilaksanakan, dan 4) mengidentifikasi dan menganalisis keberhasilan program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo.

Setelah dilaksanakan tahapan kegiatan penelitian sejak bulan Mei sampai dengan Oktober 2017 telah dihasilkan empat kegiatan yaitu berupa: 1) mengidentifikasi rumusan indikator kemiskinan yang digunakan, 2) mengidentifikasi penduduk/rumah tangga miskin, 3) mengidentifikasi program penanggulangan kemiskinan yang selama ini dilaksanakan, dan 4) mengidentifikasi dan menganalisis keberhasilan program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo.

Selanjutnya pada bulan April sampai dengan bulan Oktober 2018 akan dilakukan tahapan kegiatan penelitian yaitu: 1) mengidentifikasi kapasitas pemerintah daerah dalam implementasi program penanggulangan kemiskinan, 2) mengevaluasi keberhasilan program penanggulangan kemiskinan dalam mengurangi jumlah penduduk

miskin, 3) merumuskan model pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam implementasi program penanggulagan kemiskinan di Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo.

BAB VII

KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah penelitian serta hasil penelitian maka dapat dikemukakan kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Indikator kemiskinan yang digunakan adalah kriteria kemiskinan bidang: a) ketenagakerjaan dan kewirausahaan, b) kesehatan, c) pendidikan, d) infrastruktur, dan e) ketahanan pangan;
2. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gorontalo selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu dari tahun 2012 ampai dengan 2016 masing-masing lebih besar dari 20%;
3. Anggaran program pengentasan kemiskinan melalui perlindungan/bantuan sosial di Kabupaten Gorontalo pada tahun 2015 berjumlah Rp.88.193.298.000,- namun hanya sekitar 0.85% yang digunakan untuk Usaha Ekonomi Produktif masyarakat, sedangkan pada tahun 2016 dari anggaran Rp.108.012.200.000,- hanya sekitar 2.45% yang digunakan untuk Usaha Ekonomi Produktif masyarakat.;
4. Program pengentasan kemiskinan melalui perlindungan/bantuan sosial di Kabupaten Gorontalo belum sepenuhnya mampu mengurangi jumlah penduduk miskin, yang disebabkan karena: 1) belum maksimalnya fungsi koordinasi yang dilaksanakan dalam lingkup seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan implementasi program penanggulangan kemiskinan, 2) Masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih mempunyai kriteria sendiri-sendiri dalam

implementasi program penanggulangan kemiskinan, 3) pelaksanaan fungsi monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan yang belum maksimal, dan 4) Program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara tidak berkelanjutan dan tidak sampai tuntas mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Gorontalo.

DAFTAR PUSTAKA

- Grindle, Merilee. S., (1997), *Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sector of Developing Countries*, Boston, MA: Harvard Institute for International Development.
- Hikmat, Harry. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : Humaniora.
- Kadji, Yulianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik Melalui MSN Approach*. Jurnal Teknologi dan Manajemen Informatika, Volume 6 Edisi Khusus Juli 2008. Malang : Universitas Merdeka Malang.
- 2008. *Kemiskinan: Realitas Yang Tak Kunjung Usai*. Jurnal Teknologi dan Manajemen Informatika, Volume 7 Edisi Khusus September 2008. Malang : Universitas Merdeka Malang.
-2008. *Implementasi Kebijakan : Dalam Perspektif Realitas*. Tulung Agung Jawa Timur : Cahaya Abadi.
- Kartasasmita, Ginanjar, (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Pustaka Cidessindo: Jakarta.
- , (2004). *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*, BAPPENAS : Jakarta
- Mafruhah, Izza. 2009. *Multidimensi Kemiskinan*. LPP UNS : Surakarta.
- Polak, Paul. (2008). *Out of Poverty : What Works When Traditional Approaches Fail*. San Fransisco : Berrett-Koehler Publishers, Inc.
- Riza Risyanty dan Roesmidi, (2006). *Pemberdayaan Masyarakat*. Alqaprin Jatinegara.
- Sumodiningrat, Gunawan, (1999). *Pemberdayaan Masyarakat, Jaring Pengaman Sosial*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
- , (1997). *Kemiskinan : Teori, Fakta dan kebijakan*, impac Edisi
- Supriatna, Tjahya (1998) *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*. Penerbit Humaniora Utama Press Bandung.
- , (2000). *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*, Rineka Cipta: Bandung
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*.Bandung : Penerbit Alfabeta.

----. 2009. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Alfabeta: Bandung

INSTRUMEN PENELITIAN

MODEL PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN GORONTALO PROVINSI GORONTALO

TIM PENELITI

Prof. DR. RAUF A. HATU, M.Si (KETUA)

DR. ABD. RAHMAN PAKAYA, M.Si (ANGGOTA)

DR. MERY BALANGO, M.Hum (ANGGOTA)

DRS. HARIS MAHMUD, M.Si (ANGGOTA)

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

MEI 2017

**PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN YANG DILAKSANAKAN OLEH MASING-MASING
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) DI KABUPATEN GORONTALO, TAHUN 2014, 2015, 2016, DAN 2017**

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	NAMA PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN	TAHUN PELAK-SANAAN	LOKASI PROGRAM (KECAMATAN DAN DESA)	JUMLAH KK SASARAN PROGRAM	JUMLAH PENDUDUK SASARAN PROGRAM	JUMLAH KK YANG BERHASIL DIENTASKAN	JUMLAH PENDUDUK YG BERHASIL DIENTASKAN
1	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan		2014					
			2015					
			2016					
			2017					
2	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB		2014					
			2015					
			2016					
			2017					
3	Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintah Desa		2014					
			2015					
			2016					
			2017					
4	Badan Ketahanan Pangan		2014					
			2015					
			2016					
			2017					
5	Dinas Kesehatan		2014					
			2015					
			2016					
			2017					

6	Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi		2014					
			2015					
			2016					
			2017					
7	Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan		2014					
			2015					
			2016					
			2017					
8	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		2014					
			2015					
			2016					
			2017					
9	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian Perdagangan		2014					
			2015					
			2016					
			2017					
10	Dinas Pariwisata, Seni Kebudayaan dan Kominfor		2014					
			2015					
			2016					
			2017					
11	Dinas Pekerjaan Umum		2014					
			2015					
			2016					
			2017					
12	Dinas Pemuda dan Olah Raga		2014					
			2015					
			2016					
			2017					
13	Dinas Pendapatan,		2014					

	Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah		2015					
			2016					
			2017					
14	Dinas Pendidikan Naional		2014					
			2015					
			2016					
			2017					
15	Dinas Perhubungan		2014					
			2015					
			2016					
			2017					
16	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Perkebunan		2014					
			2015					
			2016					
			2017					
17	Dinas Sosial		2014					
			2015					
			2016					
			2017					
18	Dinas Tenaga Kerja dan Traansmigrasi		2014					
			2015					
			2016					
			2017					

JUMLAH PENDUDUK, JUMLAH PENDUDUK MISKIN, DAN JUMLAH KEPALA KELUARGA (KK) MISKIN

DI KABUPATEN GORONTALO (KEADAAN TAHUN 2017)

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH PENDUDUK MISKIN			JUMLAH KK MISKIN
			L	P	J	L	P	J	
1	Batudaa Pantai								
2	Biluhu								
3	Batudaa								

4	Bongomeme							
5	Dungaliyo							
6	Tabongo							

7	Tibawa								
8	Pulubala								

9	Boliyohuto									
10	Mootilango									
11	Tolangohula									

12	Asparaga								
13	Bilato								

14	Limboto										
15	Limboto Barat										
16	Telaga										

17	Telaga Biru										
18	Tilango										

19	Talaga Jaya								
	JUMLAH								

LUARAN



Rauf Hatu <raufhatu037@gmail.com>

Acknowledgement of a New Manuscript

1 pesan

Science Alert <[support@socialert.com](mailto:socialert.com)>

Kepada: Rauf A Hatu <raufhatu037@gmail.com>

7 Oktober 2017 10.57

Dear Rauf A Hatu,

We have received the following article for publication in Asian Journal of Scientific Research on October 06, 2017 and your good name is listed as co-author in this article.

Article Number:

87536-AJSR-ANSI

Title:

Poor Population And Poverty Prevention Program Based On Public Service In Gorontalo "Indonesia

Author(s) Name:

Rosman Ilatu, Rauf A Hatu, Abdul Rahman Pakaya, Mery Balango, Haris Mahmud

Submitted to:

Asian Journal of Scientific Research

Corresponding Author:

Fachrudin Pakaja

Your paper will undergo the NORMAL REVIEW PROCESS. The process normally takes 3 to 4 weeks to complete depending on the number of rounds the reviews need to take place.

Please do expect slight delay if the review period overlaps with a long holiday or Summer/Winter break.

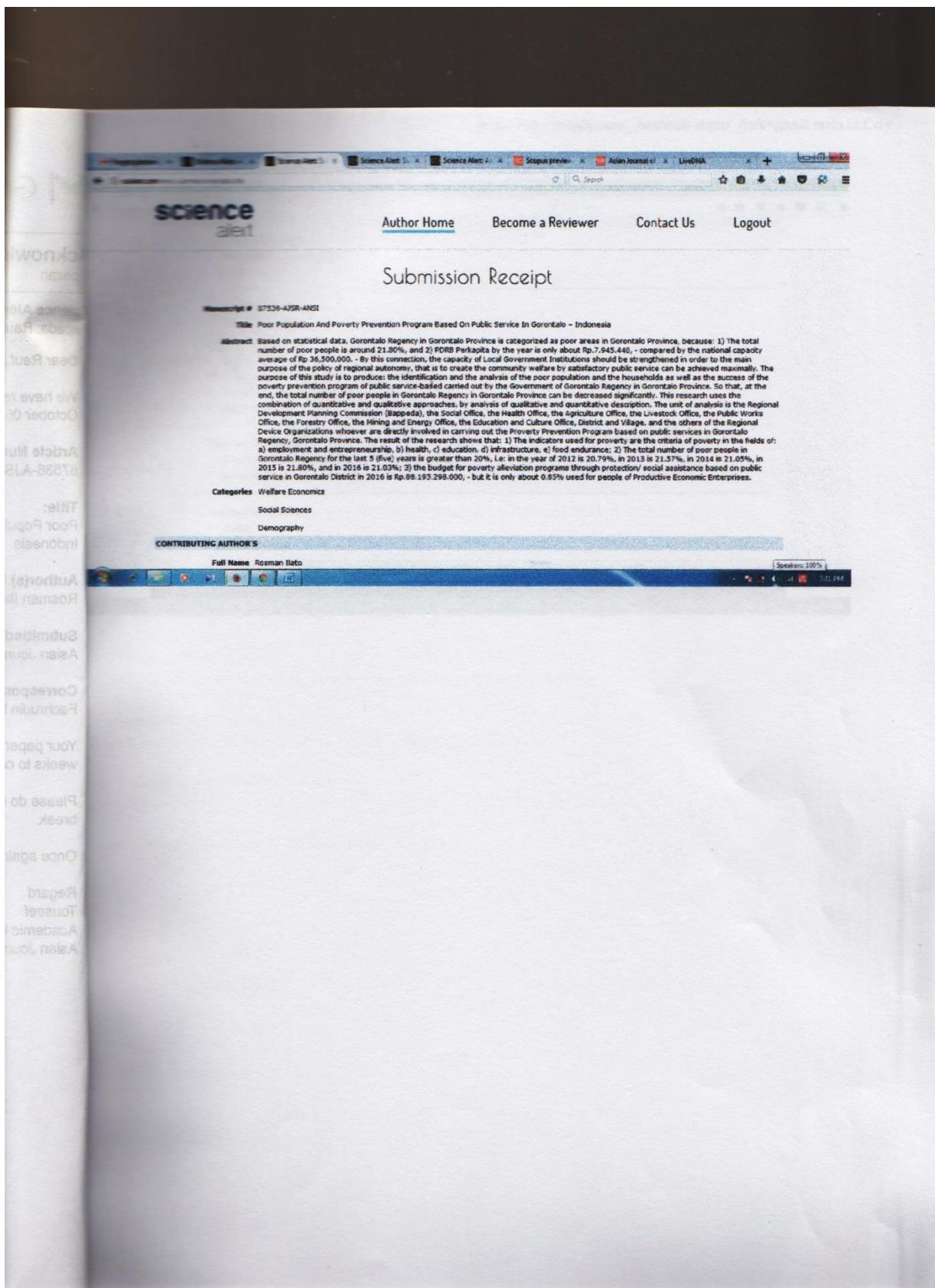
Once again, thank you very much for your submission to the Asian Journal of Scientific Research.

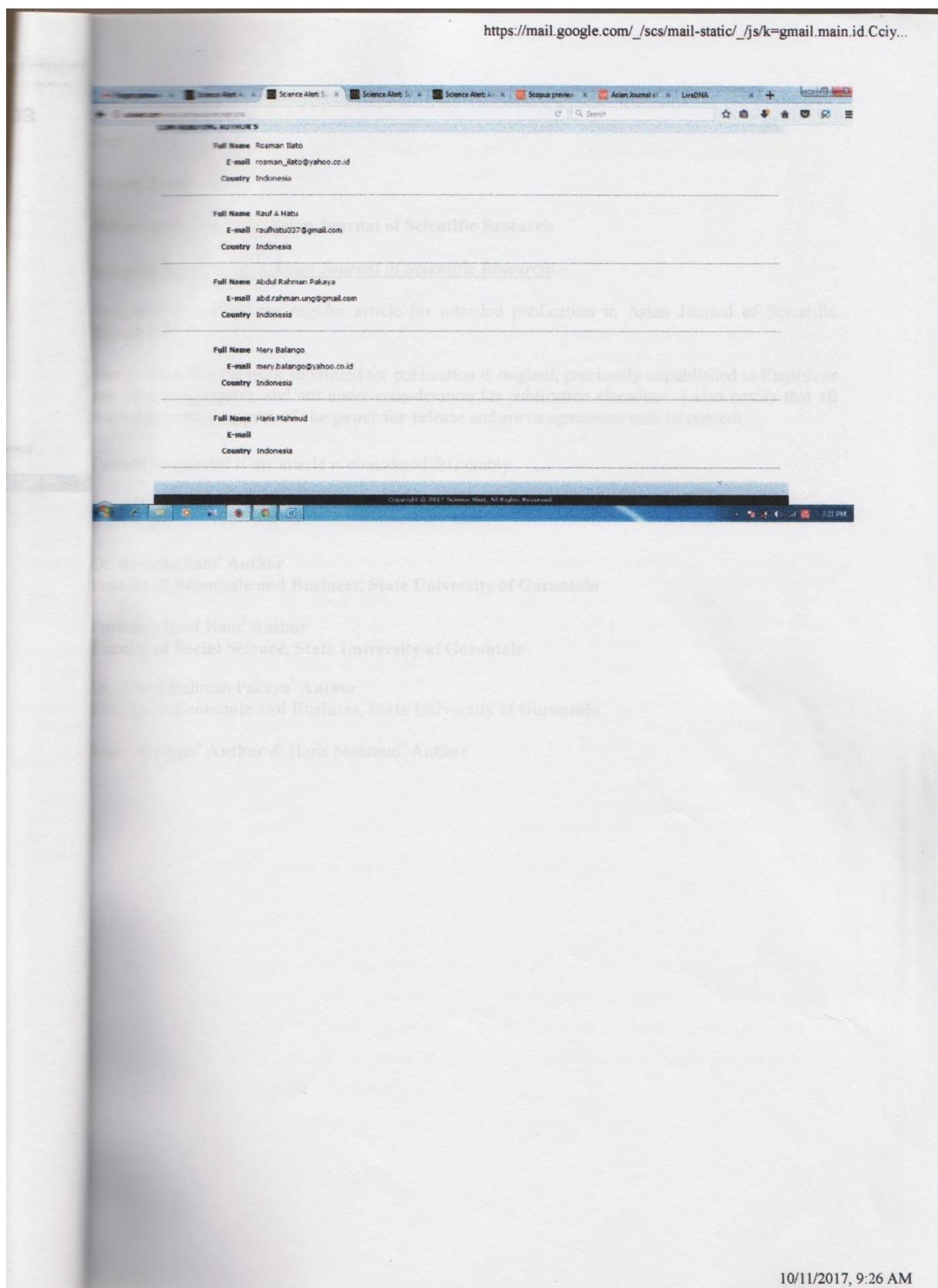
Regard

Touseef

Academic Editor

Asian Journal of Scientific Research





Dear Kaiser Jamil,
Editorial In Chief Of Asian Journal of Scientific Research

Kaiser Jamil

Editorial In Chief Of Asian Journal of Scientific Research

Submission of Paper to Asian Journal of Scientific Research

I/we wish to submit my *regular* article for intended publication in Asian Journal of Scientific Research

I/we declare that the work submitted for publication is original, previously unpublished in English or any other language(s), and not under consideration for publication elsewhere. I also certify that **all the authors have approved the paper for release** and are in agreement with its content.

I would be grateful if my article is considered favourably.

Sincerely,

Dr. Rosman Ilato¹ Author **Faculty of Economic and Business, State University of Gorontalo**

Professor Rauf Hatu² Author **Faculty of Social Science, State University of Gorontalo**

Dr. Abdul Rahman Pakaya³ Author **Faculty of Economic and Business, State University of Gorontalo**

Mary Balango⁴ Author & Haris Mahmud⁵ Author **Faculty of Economic and Business, State University of Gorontalo**

Keywords: Poor people, Poverty Prevention Program, Public Service-based

The main purpose of the regional autonomy policy is to create (Genachion et al. 2014) a better system through satisfactory public services (development of economic growth and public welfare) by the role of local government institutions. For that reason, local governments must be strengthened in order to maintain adequate and maximum capacity in realizing the purpose and the implementation of regional autonomy.

Poor Population And Poverty Prevention Program Based On Public Service In Gorontalo – Indonesia

Rosman Ilato¹

Rauf A. Hatu²

Abd. Rahman Pakaya³

Mery Balango⁴

Haris Machmud⁵

Abstract

Based on statistical data, Gorontalo Regency in Gorontalo Province is categorized as poor areas in Gorontalo Province, because: 1) The total number of poor people is around 21.80%, and 2) PDRB Perkapita by the year is only about Rp.7.945.448, - compared by the national capacity average of Rp 36,500,000. - By this connection, the capacity of Local Government Institutions should be strengthened in order to the main purpose of the policy of regional autonomy, that is to create the community welfare by satisfactory public service can be achieved maximally.

The purpose of this study is to produce: the identification and the analysis of the poor population and the households as well as the success of the poverty prevention program of public service-based carried out by the Government of Gorontalo Regency in Gorontalo Province. So that, at the end, the total number of poor people in Gorontalo Regency in Gorontalo Province can be decreased significantly.

This research uses the combination of quantitative and qualitative approaches, by analysis of qualitative and quantitative description. The unit of analysis is the Regional Development Planning Commission (Bappeda), the Social Office, the Health Office, the Agriculture Office, the Livestock Office, the Public Works Office, the Forestry Office, the Mining and Energy Office, the Education and Culture Office, District and Village, and the others of the Regional Device Organizations whoever are directly involved in carrying out the Poverty Prevention Program based on public services in Gorontalo Regency, Gorontalo Province.

The result of the research shows that: 1) The indicators used for poverty are the criteria of poverty in the fields of: a) employment and entrepreneurship, b) health, c) education, d) infrastructure, e) food endurance; 2) The total number of poor people in Gorontalo Regency for the last 5 (five) years is greater than 20%, i.e: in the year of 2012 is 20.79%, in 2013 is 21.57%, in 2014 is 21.05%, in 2015 is 21.80%, and in 2016 is 21.03%; 3) the budget for poverty alleviation programs through protection/ social assistance based on public service in Gorontalo District in 2016 is Rp.88.193.298.000, - but it is only about 0.85% used for people of Productive Economic Enterprises.

Keywords: Poor people, Poverty Prevention Program, Public Service-based

Introduction

The main purpose of the regional autonomy policy is to create (Georghiou et all, 2014)¹ people's welfare through satisfactory public services (development of economic growth and public protective) by the role of local government institutions. For this reason, local governments must be strengthened in order to maintain adequate and maximum capacity in realizing the purpose and the essence of the implementation of regional autonomy.

The capacity of local government in the regional autonomy perspective, it implies that local government has continual competence and capability, so that in playing the role of its governance institution is concretely intended to public service (Khemani, 2015)².

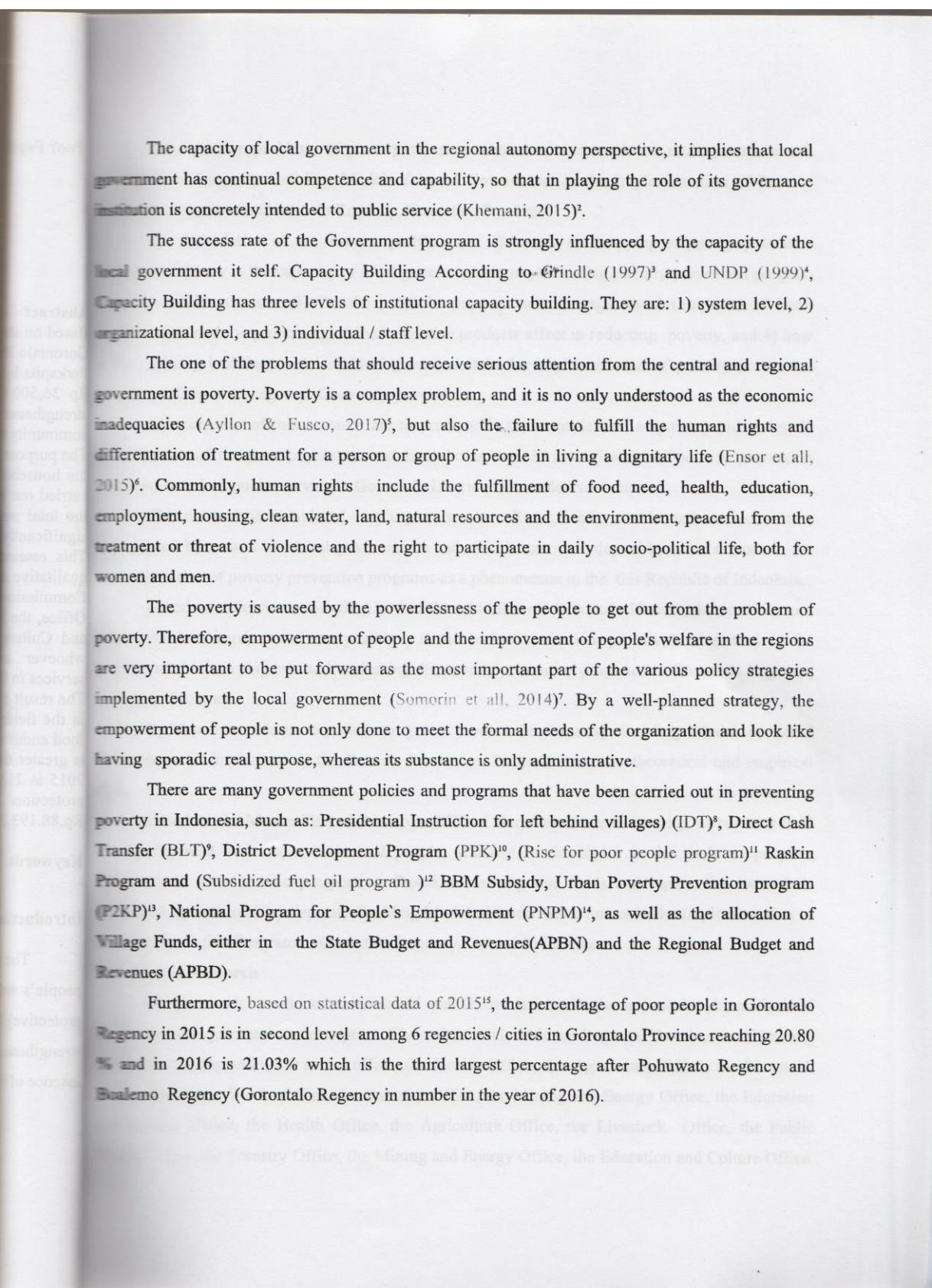
The success rate of the Government program is strongly influenced by the capacity of the local government it self. Capacity Building According to Grindle (1997)³ and UNDP (1999)⁴, Capacity Building has three levels of institutional capacity building. They are: 1) system level, 2) organizational level, and 3) individual / staff level.

The one of the problems that should receive serious attention from the central and regional government is poverty. Poverty is a complex problem, and it is no only understood as the economic inadequacies (Ayllon & Fusco, 2017)⁵, but also the failure to fulfill the human rights and differentiation of treatment for a person or group of people in living a dignitary life (Ensor et all, 2015)⁶. Commonly, human rights include the fulfillment of food need, health, education, employment, housing, clean water, land, natural resources and the environment, peaceful from the treatment or threat of violence and the right to participate in daily socio-political life, both for women and men.

The poverty is caused by the powerlessness of the people to get out from the problem of poverty. Therefore, empowerment of people and the improvement of people's welfare in the regions are very important to be put forward as the most important part of the various policy strategies implemented by the local government (Somorin et all, 2014)⁷. By a well-planned strategy, the empowerment of people is not only done to meet the formal needs of the organization and look like having sporadic real purpose, whereas its substance is only administrative.

There are many government policies and programs that have been carried out in preventing poverty in Indonesia, such as: Presidential Instruction for left behind villages) (IDT)⁸, Direct Cash Transfer (BLT)⁹, District Development Program (PPK)¹⁰, (Rise for poor people program)¹¹ Raskin Program and (Subsidized fuel oil program)¹² BBM Subsidy, Urban Poverty Prevention program (P2KP)¹³, National Program for People's Empowerment (PNPM)¹⁴, as well as the allocation of Village Funds, either in the State Budget and Revenues(APBN) and the Regional Budget and Revenues (APBD).

Furthermore, based on statistical data of 2015¹⁵, the percentage of poor people in Gorontalo Regency in 2015 is in second level among 6 regencies / cities in Gorontalo Province reaching 20.80 % and in 2016 is 21.03% which is the third largest percentage after Pohuwato Regency and Bualemo Regency (Gorontalo Regency in number in the year of 2016).



Based on the problem of poverty, the researchers wants to conduct a multi-years research entitled "The Capacity Building Model of Local Government in the Implementation of Poverty Prevention Program in Gorontalo Regency, Gorontalo Province"

The formulation of the research problem are: 1) how is the mapping of poor population / household, 2) how is the capacity of local government in implementing poverty prevention program based on public services, 3) Do the people's empowerment through the development of basic infrastructure and the processing of local superior products affect in reducing poverty, and 4) how is the capacity building model of local government in the implementation of poverty prevention program in Gorontalo regency, Gorontalo province.

The purposes of this research are to product: 1) the identification of poverty indicators, 2) identification of the poor population and households, and 3) identification of poverty prevention programs based on public service in Gorontalo District, Gorontalo Province.

This research is considered very urgent because all stages of research and research results can be used by central and local governments and even it can be adopted by other regions in the implementation of poverty prevention programs as a phenomenon in the this Republic of Indonesia.

Based on interviews with the Head of Social Office of Gorontalo District, the activities and results of this research contributes positively to the partner institutions priority, because they can be implemented in carrying out and evaluating the poverty prevention programs in Gorontalo Regency, Gorontalo Province.

By this research is expected to get a product of Capacity Building Model of Local Government in implementing the Poverty Prevention Program based on theoretical and empirical study.

Based on the Master Plan of Research (RIP) of Gorontalo State University, its superior field is development and empowerment of people, and one of the topics is the study of people's prosperity in an economic perspective. Based on the superior fields and topics, the research is conducted by entitled The Capacity Building Model of Local Government in the Implementation of Poverty Prevention Program in Gorontalo Regency, Gorontalo Province

Methods Of Research

This research uses the combination of quantitative and qualitative approaches, by analysis of qualitative and quantitative description. The unit of analysis is the Regional Development Planning Commission (Bappeda), the social office, the Health Office, the Agriculture Office, the Livestock Office, the Public Works Office, the Forestry Office, the Mining and Energy Office, the Education and Culture Office, the Health Office, the Agriculture Office, the Livestock Office, the Public Works Office, the Forestry Office, the Mining and Energy Office, the Education and Culture Office,

District and Village and the others of the Regional Device Organizations whoever are directly involved in carrying out the Poverty Prevention Program based on public services in Gorontalo Regency, Gorontalo Province.

Techniques of data collection uses: closed and open interviews, documentation, observation, and Focus Group Discussion (FGD). The data analysis technique uses stages: 1) data collection, 2) Analysis of quantitative data, 3) presentation of quantitative data through tables of frequency and inclination diagrams, 4) interpretation of data description depicted in the frequency table and inclination diagram; continued and developed by qualitative analysis stages: 5) data reduction, 6) data presentation, and 7) conclusion / verification.

Research Result

L General Condition of Gorontalo Regency

Based on the Regional Poverty Prevention Strategy of Gorontalo Regency in the year of 2016-2020¹⁶, Gorontalo Regency area is mostly in the form of plains, low hills, and high lands. Administratively, Gorontalo Regency in the north border on Regency of North Gorontalo, in the south on Tomini gulf, in the east on Bone Bolango Regency and Gorontalo City, in the west on Boalemo Regency.

Gorontalo Regency is mostly agricultural areas. Based on cross-regional routes, the condition of Gorontalo Regency areas is crossed by the state road routes as the economic tract that connects Gorontalo Regency with Gorontalo City

(Capital of Gorontalo Province) as well as other areas. This route crosses several districts in Gorontalo regency, therefore, these areas grow fast especially in agriculture, trade and services.

Based on the location of the city and the mobility of people's activities, the center of growth in Gorontalo regency is in Limboto district, especially Limboto city as the capital of Gorontalo regency, besides that, Telaga district borders on Gorontalo city, also become the center of people's activity so that its growth is better .

Natural resources potency in Gorontalo regency is large and diverse, which can be utilized as the development modal. These resources involve agricultural resources, plantations, food crops, livestock, fisheries, forest resources, minerals and energy, tourism, and industry.

Based on data from the central bureau statistical (BPS)¹⁷ land potency in Gorontalo Regency reach 33,806 Ha. The paddy field is 26,149 Ha by production of 149,049 tons, rice field with harvest area 576 Ha produce 2,016 tons. Subsectors of food crops include rice, corn, cassava, sweet potato, peanuts and soybean, fruits and vegetables are among the subsectors in the agricultural sector.

Besides, it is supported by technical irrigation reaching 11,270 Ha, rain fed 2,671 Ha and tidal 17 Ha. While the untapped land is 109 Ha.

The population of Gorontalo Regency at the end of 2016 (BPS)¹⁸ are 388,014 people. Comparison of population composition by sex is 50.15% of the male population and 49.85% of the female population, so the population by sex ratio is 100.62. Based on the age structure, the lowest structure of the age is 74 years above by the percentage of 1.28% and the highest structure of the age is 10-14 years by the percentage of 10.54%.

Table 1.1 % of people awareness and education in Population by sex and family head and by district in the year of 2016

No	District	Male	female	Total	Family Head
1	Limboto	25.090	25.469	50.559	15.438
2	Telaga	11.334	11.550	22.884	6.911
3	Batudaa	7.126	7.146	14.290	4.320
4	Tibawa	20.544	20.603	41.147	12.972
5	Batudaa Pantai	6.018	5.889	11.907	3.559
6	Bongomeme	8.406	8.257	16.663	5.218
7	Telaga Biru	14.155	14.240	28.395	8.664
8	Dungalio	9.807	9.581	19.388	6.040
9	Tolangohula	11.330	10.989	22.319	6.935
10	Tabongo	9.629	9.321	18.950	5.699
11	Pulubala	12.335	12.193	24.528	7.839
12	Boliyohuto	12.318	12.556	24.874	7.933
13	Tilango	7.123	7.063	14.186	4.254
14	Bilato	9.161	9.006	18.167	5.692
15	Biluhu	4.348	4.005	8.253	2.467
16	Mootilango	6.620	6.264	12.884	3.910
17	Talaga Jaya	5.736	5.806	11.542	3.481
18	Asparaga	4.778	4.716	9.494	2.971

- III.2** Unskilled labor. Many workers have no skill due to low education which makes it difficult to obtain decent work and are unable to compete in the work market.
- III.3** Limited employment and place of business. People are difficult to obtain employment caused by competition with skilled migrants and the difficulty of obtaining business capital as a result of limited information access on business opportunities.

1.5.1 Unstable rice prices. The increasing of rice prices causes the poor can not meet their daily needs due to the low income.

1.5.2 Uncontrolled main goods price. The increasing and uncontrolled main good price causes the poor people are more difficult and unable to meet the needs of everyday life,

1.5.3 Unstable economic structure. Unstable economic structure causes the emergence of global economic crisis and fluctuations of price in the regional economic system.

3. Poverty Profile of Gorontalo Regency

Based on data from the Central Bureau of Statistics (BPS) of Gorontalo Province, the percentage of poor people in Gorontalo Regency / City in Gorontalo Province is various in years by years, as presented in the following table:

Table 1.2. Percentage of poor people in Regency / City of Gorontalo Province in the year of 2012 – 2016

Regency/City	2012	2013	2014	2015	2016
Gorontalo City	5.61	5.99	5.85	6.05	6.05
Gorontalo Regency	20.79	21.57	21.05	21.80	21.03
Boalemo Regency	20.42	21.79	20.79	21.66	21.11
Pohuwato Regency	20.78	21.47	20.69	22.43	21.18
Bone Bolango Regency	16.67	17.19	16.68	18.49	17.97
North Gorontalo Regency	18.54	19.16	18.34	18.93	18.51
Gorontalo Province	17.22	18.00	17.41	18.32	17.72

Source: the Central Bureau of Statistics (BPS) of Gorontalo Regency

Based on table 1.2 above, the percentage of poor people especially in Gorontalo regency for the last 5 (five) years in 2012 is 20.79% (first highest rank), in 2013 is 21.57% (second highest rank), in 2014 is 21.05% (first highest rank), by 2015 by 21.80% (second highest rank), and in 2016 is 21.03% (third highest rank).

Based on the Regional Poverty Prevention Strategy (SPKD) of Gorontalo Regency 2016-2020, Households in Integrated Database can be grouped into Decil. Decil is a group of per-ten persons, so that all households can be divided into 10 Decil. Thus, the group of households in the Integrated Database is as follows:

- Decil 1 is the household in the lowest group of 10% ;
- Decil 2 is the household in the lowest group of 20% ;
- Decil 3 is the household in the lowest group of 30% ;
- Decil 4 is the household in the lowest group of 40% ;

	Decil 1	Decil 2	Decil 3	Decil 4	Total
Households	10	11.049	892	692	750
Welfare Status (Decil) Up to 40%	14	12.268	1.194	1.076	1.408
Households	13	13.022	457	335	352

The Integrated Database contains groups of Decil 1, Decil 2, Decil 3, and Decil 4, as it contains 40% of the lowest rate of households. The total number of Households in Gorontalo Regency per December 31, 2016 according to Desil 1 to Desil 4 are as follows:

Table 1.3. The total number of Households in Gorontalo Regency in Welfare Status (Decil) up to 40% of lowest welfare rating

No	District	Village	Decil 1	Decil 2	Decil 3	Decil 4	Total
1	Tibawa	16	4.097	263	190	203	4.753
2	Limboto	14	2.662	309	290	348	3.609
3	Pulubala	13	3.086	131	9	95	3.404
4	Telaga Biru	15	2.362	243	209	215	3.029
5	Bongomeme	15	2.755	117	98	75	3.045
6	Limboto Barat	10	2.520	220	204	222	3.166
7	Mootilango	10	2.321	149	166	122	2.758
8	Tolangohula	15	2.379	144	140	144	2.807
9	Tabongo	9	2.024	206	142	154	2.526
10	Dungaliyo	10	1.924	134	134	113	2.305
11	Telaga	9	1.307	143	124	168	1.742
12	Batudaa	9	1.407	97	97	97	1.698
	Pantai						
13	Boliyohuto	13	1.403	137	93	96	1.729
14	Asparaga	10	1.477	70	47	40	1.634
15	Tilango	8	980	122	117	111	1.330
16	Batudaa	8	1.049	107	104	102	1.362
17	Bilato	10	1.248	73	47	54	1.422
18	Talaga Jaya	5	850	115	121	121	1.207
19	Biluhu	8	1.059	60	42	47	1.208
	Total	207	36.910	2.840	2.457	2.527	44.734

Source: Sosial Office in Gorontalo Regency

Based on table 1.3 above, it can be concluded that 19 districts and 207 villages in Gorontalo regency are 44,734 Households whose Welfare Status (Decil) up to 40% of Lowest Welfare Rating, which consists of: 36,910 Households categorized as Decil 1, 2,840 Households categorized as Decil 2, 2,457 Household categorized Decil 3, and 2,527 Households categorized as Decil 4. The total number of person in Gorontalo Regency until December 31, 2016 from decil 1 to Decil 4 are as follows:

Table 1.4. Total number of persons in Gorontalo Regency in Welfare Status (Decil) Up to 40% of Lowest Welfare Rating

N	Disrict	Total fillages	Decil 1	Decil 2	Decil 3	Decil 4	Total
1	Tibawa	16	18.049	893	692	750	20.384
2	Limboto	14	12.268	1.194	1.076	1.408	15.946
3	Pulubala	13	13.022	457	335	352	14.166

	Telaga Biru	15	10.804	981	835	875	13.495
	Bongomeme	15	11.616	418	378	290	12.702
	Limboto	10	10.272	724	663	753	12.412
	Barat						
	Mootilango	10	10.053	560	594	450	11.657
	Tolangohula	15	9.967	475	479	571	11.492
	Tabongo	9	8.658	772	490	620	10.540
	Dungaliyo	10	8.910	540	538	486	10.474
	Telaga	9	6.384	616	543	742	8.285
	Batudaa	9	6.323	407	369	379	7.478
	Pantai						
	Boliyohuto	13	6.052	386	295	333	7.066
	Asparaga	10	6.226	265	174	143	6.808
	Tilango	8	5.209	522	503	517	6.751
	Batudaa	8	5.314	485	482	419	6.700
	Bilato	10	5.454	275	146	230	6.105
	Talaga Jaya	5	3.868	397	433	436	5.134
	Biluhu	8	4.565	210	143	174	5.092
	Jumlah	207	163.014	10.577	9.168	9.928	192.687

Source: Sosial office in Gorontalo Regency

Based on table 1.4 above, it can be concluded that 19 districts and 207 villages in Gorontalo regency are 192.687 persons whose Welfare Status (Decil) up to 40% of Lowest Welfare Rating, consisting of: 163,014 persons orized as Decil 1, 10,577 persons categorized as Decil 2, 9,168 persons categorized as Decil 3, and 9,928 persons categorized as Decil 4.

Overall the total number of poor people in Gorontalo Regency are 191,405 persons or about 48% of the population of 398,459 persons. In addition, the total number of poor household are 44,443 or about 37% of the head of household of 119,579 persons. Then, there are Recapitulation of Population and Poor Population in District of Gorontalo Regency in the year of 2016.

Table 1.5. Recapitulation of population and poor population in Gorontalo Regency in the year of 2016

District	Total villages	Total of Population		Total of poor population			
		Persons	House hold	Persons	%	House hold	%
Tibawa	16	42.936	13.220	20.384	47	4.753	36
Limboto	14	50.160	15.143	15.946	32	3.609	24
Pulubala	11	24.916	7.635	13.720	55	3.305	43
Telaga Biru	15	29.753	8.765	13.495	45	3.029	35
Bongomeme	15	20.144	6.094	12.702	63	3.045	50
Limboto Barat	10	23.226	7.148	11.576	50	2.974	42
Mootilango	10	19.616	5.771	11.657	59	2.758	48
Tolangohula	15	23.908	7.026	11.492	48	2.807	40
Tabongo	9	18.819	5.730	10.540	56	2.526	44
Dungaliyo	10	18.140	5.581	10.474	58	2.305	41

Telaga	9	23.162	6.933	8.285	36	1.742	25
Batudaa Pantai	9	12.368	3.577	7.478	60	1.698	47
Boliyohuto	13	17.257	5.278	7.066	41	1.729	33
Asparaga	10	13.877	4.026	6.808	49	1.634	41
Tilango	8	14.862	4.290	6.751	45	1.330	31
Batudaa	8	14.824	4.404	6.700	45	1.362	31
Bilato	10	9.889	2.922	6.105	62	1.422	49
Talaga Jaya	5	11.992	3.553	5.134	43	1.207	34
Biluhu	8	8.610	2.483	5.092	59	1.208	49
Total	207	398.459	119.579	191.405	48	44.443	37

Source: Sosial office in Gorontalo Regency

Table 1.5 above shows that the total population are 398,459 people, 191,405 people or about 48% of the poor, and 119,579 heads of households there are 44,443 or 37% poor household heads.

9	Card (KIP)/ SD Indonesian Smart Card (KIP)/SMP	Education Office	11.679.000.000	-	-
10	Indonesian Smart Card (KIP)/SM	Education Office	5.830.000.000	-	-
11	Indonesian Smart Card (KIP)/PT	University Level	-	-	-
12	Rice for the Poor	Social Office	5.129.540.000	-	-
13	ADKB	Social Office	8.400.000	-	-
	Total		75.721.880.000	11.331.880.00	1.139.538.000
				0	
	Total of Budged			Rp. 88.193.298.000	

Source: Sosial Office in Gorontalo Regency

Based on table 1.6 above, it can be concluded that there are 13 (thirteen) types of Poverty Prevention Program through Social Protection /Assistance based on Public Services. Whereas, the total budget of the Poverty Alleviation Program through Social Protection / Assistance based on Public Service in Gorontalo Regency in the year of 2016 is Rp. 88.193.298.000,- The most budget in the year of 2016 is used for Social Protection/ Assistance based on Public Services and Rp. 748.000.000, - only or about 0.85% is used for the empowerment of the poor through the Productive Economic Business (UEP) program.

B. Discussion

I. Poverty Indicator in Gorontalo Regency

Based on the Regional Poverty Prevention Strategy in the year of 2016-2020 in Gorontalo regency, the indicators used in determining the poor population and household include: a) Poverty Criteria for laborship and Entrepreneurship, b) Poverty Criteria for Health, c) Poverty Criteria for Education, d) Poverty Criteria for Infrastructure Sector; and e) Poverty Criteria for Food Endurance.

The poverty indicator results the grouping of poor households into groups of deciles. Decil is a group of per-ten persons, It means that all households can be divided into 10 Decil. Thus, the grouping of households in the Integrated Database is as follows: a) Decil 1 is the household in the lowest group of 10% ; b) Decil 2 is the household in the lowest group of 20% ; c) Decil 3 is the household in the lowest group of 30% ; and d) Decil 4 is the household in the lowest group of 40%.

The Integrated Database contains Decil 1, Decil 2, Decil 3, and Decil 4, and results 40% the lowest household welfare rating. Based on these data, the poor in Gorontalo Regency are 191,405 people or about 48% of the total population of 398,459 people, whereas, the poor households are 44,443 or 37% from the total household of 119,579 persons.

The data above shows that in Gorontalo regency, the poors are 191,405 people or 48% of the total population of 398,459, and the poor households are 44,443 or 37% of the total households of 119,579 which different from the Central Bureau of Statistics that declare the poor population in

Gorontalo Regency in 2016 is 21.30%. The difference of numbers are due to the different in poverty indicators used by both the Poverty Prevention Office and by the Central Bureau of Statistics of Gorontalo Regency.

2. Poverty Profile of Gorontalo Regency

The data of the Central Bureau of Statistics (BPS) in Gorontalo Province shows that the percentage of poor people in Gorontalo regency, Gorontalo Province, from 2012 to 2016 are considered varies. But interestingly, all of them are in the level of more than 20% of the total population.

Compared with the number of poor people in the regencies / cities in Gorontalo Province, for the last 5 (five) years in the year of 2012 are 20.79% (first highest rank), in 2013 is 21.57% (second highest ranking), in 2014 is 21.05% (first highest rank), in 2015 is 21.80% (second highest rank), and in 2016 is 21.03% (third highest rank). Even, according to data on the Regional Poverty Prevention Strategy in Gorontalo Regency in the year of 2016-2020, the total number of poor people in Gorontalo Regency in 2016 are 191,405 people or about 48% of the total population of 398,459 persons. In addition, the total number of poor households are 44,443 persons or about 37% of the total households of 119,579 persons.

3. Poverty Prevention Program Based on Public Service in Gorontalo Regency, Gorontalo Province

The Poverty Prevention Program through Social Protection / assistance in Gorontalo Regency consists of 13 (thirteenth) programs. All rograms are implemented based on Public Services. Actually, the total budged for the poverty alleviation program through Social Protection / Assistance based on public service conducted in Gorontalo Regency in 2016 are Rp. 88.193.298.000,-

But, from the total budget, most of total budged in 2016, is used for Social Protection / Assistance and only Rp. 748.000.000, - or only about 0.85% is used for the empowerment of the poor through the Productive Economic Business (UEP) program.

C. Conclusion

Based on the formulation of research problems and research results can be presented the research conclusions as thenfollowing:

1. Poverty indicators used are poverty criteria: a) employment and entrepreneurship sector, b) health sector, c) education sector, d) infrastructure sector, e) food endurence sector;
2. The number of poor people in Gorontalo Regency for the last 5 (five) years is greater than 20%, namely: in 2012 is 20.79%, in 2013 is 21.57%, in 2014 is 21.05%, in 2015 is 21.80% and in 2016 is 21.03%;

3. The budget of poverty alleviation programs through social protection/assistance assistance based on public service in Gorontalo Regency in 2015 is Rp.88.193.298.000,- but only about 0.85% is used for people of Productive Economic Enterprises;

D. Reference

1. Georghiou L., Edler J., Uyarra E., Yeow J. 2014. Policy Instruments For Public Procurement Of Innovation: Choice, Design And Assessment. Technological Forecasting and Social Change. Volume 86, July 2014, Pages 1-12.
2. Khemani S. 2015. Buying votes versus supplying public services: Political incentives to under-invest in pro-poor policies. Journal of Development Economics. Volume 117, November 2015, Pages 84-93
3. Grindle, M. S. 1997. Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sector of Developing Countries, Boston, MA: Harvard Institute for International Development.
4. United Nation Development Programme. 1999. Human Development Report. Oxford University Press, Inc. 198 Madison Avenue, New York, New York.
hdr.undp.org/sites/default/files/reports/260/hdr_1999_en_nostats.pdf
5. Aylon S And Fusco A. 2017. Are income poverty and perceptions of financial difficulties dynamically interrelated. Journal of Economic Psychology. Volume 61, August 2017, Pages 103-114.
6. Ensor J E., Park S E., Hoddy E T., Ratner B D. 2015. A rights-based perspective on adaptive capacity. Global Environmental Change. Volume 31, March 2015, Pages 38-49.
7. Somorin O A., Hamakers I JV., Arts B., Sonwa D J., Tiani A M. 2014. REDD+ policy strategy in Cameroon: Actors, institutions and governance. Environmental Science & Policy. Volume 35, January 2014, Pages 87-97.
8. Anonymous. Presidential Instruction No. 5 December 27, 1992 On Improving Poverty Reduction.
<http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/l1t4e9302d215ee8/parent/13246>.
9. Anonymous. Instructions of The President of The Republic of Indonesia Number 3 Year 2008 Regarding Implementation of The Cash Direct Program For Household Targets
<http://jdih.esdm.go.id/peraturan/Inpres%20No.%203%20Thn%202008.pdf>.
10. Anonymous. Regulation of The Minister of State Of The Republic of Indonesia Number 1 Year 2013 Regarding Community Empowerment Through The Movement of Empowerment And Family Welfare.
http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2013/01/29/p/e/permendagri_no.1_th_2013.doc.
11. Anonymous. Regulation of The Coordinator Minister For Human Development and Culture of The Republic of Indonesia No. 1 Of 2016 On General Guidelines for Subsidizing Rice for Low-Income Communities In 2016.
<https://www.kemenkopmk.go.id/sites/default/files/pengumuman/PEDUM%20RASKIN%202016%20CETAK%20FIX.pdf>.
12. Anonymous. Regulation Of The President of The Republic of Indonesia Number 191 of 2014 Concerning Provision, Distribution and Rice Price of Oil Fuel Oil.
<http://jdih.esdm.go.id/peraturan/Perpres%20Nomor%20191%20Tahun%202014.pdf>.
13. Anonymous. Poverty Protected Poverty Program (P2KP) Directorate General of Highway Cooperation of General Employment Work.
http://www.p2kp.org/ppm/files/pdf/juklak/ppm_bagi_kab-kota.pdf.

14. Anonymous. Regulation of The Minister of Finance of The Republic of Indonesia Number 229 / Pmk.02 / 2012 'Regarding The Preparation and Implementation of The Content of The Implementation of Advanced Budget Programs National Activities of Empowerment of Community Budget In Budget 2013 With The Resources of The Rest of The Program Program National Activities of Mandiri Empowerment Empowerment.
<http://www.anggaran.depkeu.go.id/peraturan/PMK%20229%20-%202012%20-%20Juklak%20DIPA-L%20PNPM.pdf>
15. Anonymous. Percentage of the Poor (%) by Regency / City in Gorontalo Province, 2004-2015.
<https://gorontalo.bps.go.id/linkTabelStatis/excel/id/218>
16. Anonymous. Summary of Semester Examination Results (IHPS) II Year 2016
http://www.bpk.go.id/assets/files/ihps/2015/II/ihps_ii_2015_1488344101.pdf
17. Anonymous. Central Bureau Of Statistics (BPS). 2016. Regional Local Government Plan In 2016 Gorontalo Province.
<https://www.gorontaloprov.go.id/component/advlisting/?view=download&fileId>
18. Anonymous. Central Bureau Of Statistics (BPS). 2016. Gender Development Index (IPG) and Components by Regency / City in Gorontalo Province, 2014.
<https://gorontalo.bps.go.id/mod/exportData/exportPDF.php>

Poor Population And Poverty Prevention Program Based On Public Service In Gorontalo – Indonesia

Rosman Ilato¹

Rauf A. Hatu²

Abd. Rahman Pakaya³

Mery Balango⁴

Haris Machmud⁵

Abstract

Based on statistical data, Gorontalo Regency in Gorontalo Province is categorized as poor areas in Gorontalo Province, because: 1) The total number of poor people is around 21.80%, and 2) PDRB Perkapita by the year is only about Rp.7.945.448, - compared by the national capacity average of Rp 36,500,000. - By this connection, the capacity of Local Government Institutions should be strengthened in order to the main purpose of the policy of regional autonomy, that is to create the community welfare by satisfactory public service can be achieved maximally.

The purpose of this study is to produce: the identification and the analysis of the poor population and the households as well as the success of the poverty prevention program of public service-based carried out by the Government of Gorontalo Regency in Gorontalo Province. So that, at the end, the total number of poor people in Gorontalo Regency in Gorontalo Province can be decreased significantly.

This research uses the combination of quantitative and qualitative approaches, by analysis of qualitative and quantitative description. The unit of analysis is the Regional Development Planning Commission (Bappeda), the Social Office, the Health Office, the Agriculture Office, the Livestock Office, the Public Works Office, the Forestry Office, the Mining and Energy Office, the Education and Culture Office, District and Village, and the others of the Regional Device Organizations whoever are directly involved in carrying out the Poverty Prevention Program based on public services in Gorontalo Regency, Gorontalo Province.

The result of the research shows that: 1) The indicators used for poverty are the criteria of poverty in the fields of: a) employment and entrepreneurship, b) health, c) education, d) infrastructure, e) food endurance; 2) The total number of poor people in Gorontalo Regency for the last 5 (five) years is greater than 20%, i.e: in the year of 2012 is 20.79%, in 2013 is 21.57%, in 2014 is 21.05%, in 2015 is 21.80%, and in 2016 is 21.03%; 3) the budget for poverty alleviation programs through protection/ social assistance based on public service in Gorontalo District in 2016 is Rp.88.193.298.000, - but it is only about 0.85% used for people of Productive Economic Enterprises.

Keywords: Poor people, Poverty Prevention Program, Public Service-based

Introduction

The main purpose of the regional autonomy policy is to create ([Georghiou et all, 2014](#))¹ people's welfare through satisfactory public services (development of economic growth and public protective) by the role of local government institutions. For this reason, local governments must be strengthened in order to maintain adequate and maximum capacity in realizing the purpose and the essence of the implementation of regional autonomy.

The capacity of local government in the regional autonomy perspective, it implies that local government has continual competence and capability, so that in playing the role of its

governance institution is concretely intended to public service (Khemani, 2015)².

The success rate of the Government program is strongly influenced by the capacity of the local government it self. Capacity Building According to Grindle (1997)³ and UNDP (1999)⁴, Capacity Building has three levels of institutional capacity building. They are: 1) system level, 2) organizational level, and 3) individual / staff level.

The one of the problems that should receive serious attention from the central and regional government is poverty. Poverty is a complex problem, and it is no only understood as the economic inadequacies (Ayllon & Fusco, 2017)⁵, but also the failure to fulfill the human rights and differentiation of treatment for a person or group of people in living a dignitary life (Ensor et all, 2015)⁶. Commonly, human rights include the fulfillment of food need, health, education, employment, housing, clean water, land, natural resources and the environment, peaceful from the treatment or threat of violence and the right to participate in daily socio-political life, both for women and men.

The poverty is caused by the powerlessness of the people to get out from the problem of poverty. Therefore, empowerment of people and the improvement of people's welfare in the regions are very important to be put forward as the most important part of the various policy strategies implemented by the local government (Somorin et all, 2014)⁷. By a well-planned strategy, the empowerment of people is not only done to meet the formal needs of the organization and look like having sporadic real purpose, whereas its substance is only administrative.

There are many government policies and programs that have been carried out in preventing poverty in Indonesia, such as: Presidential Instruction for left behind villages) (IDT)⁸, Direct Cash Transfer (BLT)⁹, District Development Program (PPK)¹⁰, (Rise for poor people program)¹¹ Raskin Program and (Subsidized fuel oil program)¹² BBM Subsidy, Urban Poverty Prevention program (P2KP)¹³, National Program for People`s Empowerment (PNPM)¹⁴, as well as the allocation of Village Funds, either in the State Budget and Revenues(APBN) and the Regional Budget and Revenues (APBD).

Furthermore, based on statistical data of 2015¹⁵, the percentage of poor people in Gorontalo Regency in 2015 is in second level among 6 regencies / cities in Gorontalo Province reaching 20.80 % and in 2016 is 21.03% which is the third largest percentage after Pohuwato Regency and Boalemo Regency (Gorontalo Regency in number in the year of 2016).

Based on the problem of poverty, the researchers wants to conduct a multi-years research entitled "The Capacity Building Model of Local Government in the Implementation

of Poverty Prevention Program in Gorontalo Regency, Gorontalo Province"

The formulation of the research problem are: 1) how is the mapping of poor population / household, 2) how is the capacity of local government in implementing poverty prevention program based on public services, 3) Do the people's empowerment through the development of basic infrastructure and the processing of local superior products affect in reducing poverty, and 4) how is the capacity building model of local government in the implementation of poverty prevention program in Gorontalo regency, Gorontalo province.

The purposes of this research are to product: 1) the identification of poverty indicators, 2) identification of the poor population and households, and 3) identification of poverty prevention programs based on public service in Gorontalo District, Gorontalo Province.

This research is considered very urgent because all stages of research and research results can be used by central and local governments and even it can be adopted by other regions in the implementation of poverty prevention programs as a phenomenon in the this Republic of Indonesia.

Based on interviews with the Head of Social Office of Gorontalo District, the activities and results of this research contributes positively to the partner institutions priority, because they can be implemented in carrying out and evaluating the poverty prevention programs in Gorontalo Regency, Gorontalo Province.

By this research is expected to get a product of Capacity Building Model of Local Government in implementing the Poverty Prevention Program based on theoretical and empirical study.

Based on the Master Plan of Research (RIP) of Gorontalo State University, its superior field is development and empowerment of people, and one of the topics is the study of people's prosperity in an economic perspective. Based on the superior fields and topics, the research is conducted by entitled The Capacity Building Model of Local Government in the Implementation of Poverty Prevention Program in Gorontalo Regency, Gorontalo Province

Methods Of Research

This research uses the combination of quantitative and qualitative approaches, by analysis of qualitative and quantitative description. The unit of analysis is the Regional Development Planning Commission (Bappeda), the social office, the Health Office, the Agriculture Office, the Livestock Office, the Public Works Office, the Forestry Office, the Mining and Energy Office, the Education and Culture Office, the Health Office, the Agriculture Office, the Livestock Office, the Public Works Office, the Forestry Office, the Mining and Energy Office, the Education and Culture Office, District and Village and the

others of the Regional Device Organizations whoever are directly involved in carrying out the Poverty Prevention Program based on public services in Gorontalo Regency, Gorontalo Province.

Techniques of data collection uses: closed and open interviews, documentation, observation, and Focus Group Discussion (FGD). The data analysis technique uses stages: 1) data collection, 2) Analysis of quantitative data, 3) presentation of quantitative data through tables of frequency and inclination diagrams, 4) interpretation of data description depicted in the frequency table and inclination diagram; continued and developed by qualitative analysis stages: 5) data reduction, 6) data presentation, and 7) conclusion / verification.

Research Result

1. General Condition of Gorontalo Regency

Based on the Regional Poverty Prevention Strategy of Gorontalo Regency in the year of 2016-2020¹⁶, Gorontalo Regency area is mostly in the form of plains, low hills, and high lands. Administratively, Gorontalo Regency in the north border on Regency of North Gorontalo, in the south on Tomini gulf, in the east on Bone Bolango Regency and Gorontalo City, in the west on Boalemo Regency.

Gorontalo Regency is mostly agricultural areas. Based on cross-regional routes, the condition of Gorontalo Regency areas is crossed by the state road routes as the economic tract that connects Gorontalo Regency with Gorontalo City

(Capital of Gorontalo Province) as well as other areas. This route crosses several districts in Gorontalo regency, therefore, these areas grow fast especially in agriculture, trade and services.

Based on the location of the city and the mobility of people's activities, the center of growth in Gorontalo regency is in Limboto district, especially Limboto city as the capital of Gorontalo regency, besides that, Telaga district borders on Gorontalo city, also become the center of people's activity so that its growth is better .

Natural resources potency in Gorontalo regency is large and diverse, which can be utilized as the development modal. These resources involve agricultural resources, plantations, food crops, livestock, fisheries, forest resources, minerals and energy, tourism, and industry.

Based on data from the central bureau statistical ([BPS](#))¹⁷ land potency in Gorontalo Regency reach 33,806 Ha. The paddy field is 26,149 Ha by production of 149,049 tons, rice field with harvest area 576 Ha produce 2,016 tons. Subsectors of food crops include rice, corn,

cassava, sweet potato, peanuts and soybean, fruits and vegetables are among the subsectors in the agricultural sector. Besides, it is supported by technical irrigation reaching 11,270 Ha, rain fed 2,671 Ha and tidal 17 Ha. While the untapped land is 109 Ha.

The population of Gorontalo Regency at the end of 2016 ([BPS](#))¹⁸ are 388,014 people. Comparison of population composition by sex is 50.15% of the male population and 49.85% of the female population, so the population by sex ratio is 100.62. Based on the age structure, the lowest structure of the age is 74 years above by the percentage of 1.28% and the highest structure of the age is 10-14 years by the percentage of 10.54%.

Table 1.1
Population by sex and family head and by district in the year of 2016

No	District	Male	female	Total	Family Head
1	Limboto	25.090	25.469	50.559	15.438
2	Telaga	11.334	11.550	22.884	6.911
3	Batudaa	7.126	7.146	14.290	4.320
4	Tibawa	20.544	20.603	41.147	12.972
5	Batudaa Pantai	6.018	5.889	11.907	3.559
6	Bongomeme	8.406	8.257	16.663	5.218
7	Telaga Biru	14.155	14.240	28.395	8.664
8	Dungalio	9.807	9.581	19.388	6.040
9	Tolangohula	11.330	10.989	22.319	6.935
10	Tabongo	9.629	9.321	18.950	5.699
11	Pulubala	12.335	12.193	24.528	7.839
12	Boliyohuto	12.318	12.556	24.874	7.933
13	Tilango	7.123	7.063	14.186	4.254
14	Bilato	9.161	9.006	18.167	5.692
15	Biluhu	4.348	4.005	8.253	2.467
16	Mootilango	6.620	6.264	12.884	3.910
17	Talaga Jaya	5.736	5.806	11.542	3.481
18	Asparaga	4.778	4.716	9.494	2.874
19	Dungaliyo	8.744	8.740	17.484	5.461
Total		194.602	193.412	388.014	119.667

Source: Social Office in Gorontalo Regency

2. Poverty Indicators in Gorontalo Regency

Based on the Regional Poverty Prevention Strategy in the year of 2016-2020, Gorontalo Regency has established the Poverty Prevention Coordination Team (TKPK) as a Team coordinates specifically the Program for Accelerating Poverty Prevention in the regions. In making the Acceleration of Poverty Prevention Strategy in Gorontalo Regency are used the following criteria :

1.1 Poverty Criteria in Employment and Entrepreneurship:

1.1.1 No permanent employment. The majority of people especially for those who living in rural and remote areas, have no regular job that causes them to be unable to meet their

needs

- 1.1.2 Unskilled labor. Many workers have no skill due to low education which makes it difficult to obtain decent work and are unable to compete in the work market.
- 1.1.3 Limited employment and place of business. People are difficult to obtain employment caused by competition with skilled migrants and the difficulty of obtaining business capital as a result of limited information access on business capital and the lack of optimal management of available local resources.

1.2 Poverty Criteria for Health Sector

- 1.2.1 The high rate of infant and maternal mortality. Lack of people awareness and education in health is caused by low levels of education.
- 1.2.2 Malnourished toddler and malnutrition. The low income makes many people unable to meet their daily needs,
- 1.2.3 The limitation of health facilities and infrastructure. Inadequate provision of health facilities and infrastructure is as a result of limited local financial capacity and small number of available health personnel.

1.3 Poverty Criteria in Education;

- 1.3.1 High Rate of Gross Participation (GER). Lack of people awareness in education, so many parents are reluctant to send their children to school age of 7 years,
- 1.3.2 Low rate of pure Participation (APM). The limited provision of educational facilities and infrastructure, especially in rural and remote areas are still difficult to reach,
- 1.3.3 High rate of Drop Out (APS). Low income and people awareness causes many parents can not afford and do not want to send their children to the higher education level.

1.4 Poverty Criteria in Infrastructure Sector;

- 1.4.1 Unfit house for living. Many poor households tends to have shelter with a smaller floor area. It can limit the flexibility to conduct household activities closely related to the ability to work at home, rest, study and other household activities,
- 1.4.2 Improper drinking water. Poor households have lower access to clean water compared to prosperous households, on the other hand, the poor household access to other water sources such as springs, unprotected wells, rainwater and river water is higher,
- 1.4.3 Inadequate environmental sanitation. Poor households have a problem in adequate sanitation. Poverty is the reason for the poor to be unable to have proper and healthy housing, living in a narrow house with inadequate sanitation make the poor more vulnerable to infectious diseases, respiratory and digestive disorders affecting in the process of physical development, intelligence and quality of human resources when

children grow up.

1.5 Poverty Criteria in Food Endurance

1.5.1 Unstable rice prices. The increasing of rice prices causes the poor can not meet their daily needs due to the low income.

1.5.2 Uncontrolled main goods price. The increasing and uncontrolled main good price causes the poor people are more difficult and unable to meet the needs of everyday life,

1.5.3 Unstable economic structure. Unstable economic structure causes the emergence of global economic crisis and fluctuations of price in the regional economic system.

3. Poverty Profile of Gorontalo Regency

Based on data from the Central Bureau of Statistics (BPS) of Gorontalo Province, the percentage of poor people in Gorontalo Regency / City in Gorontalo Province is various in years by years, as presented in the following table:

Table 1.2. Percentage of poor people in Regency / City of Gorontalo Province in the year of 2012 – 2016

Regency/City	Percentage of poor people (%)				
	2012	2013	2014	2015	2016
Gorontalo City	5.61	5.99	5.85	6.05	6.05
Gorontalo Regency	20.79	21.57	21.05	21.80	21.03
Boalemo Regency	20.42	21.79	20.79	21.66	21.11
Pohuwato Regency	20.78	21.47	20.69	22.43	21.18
Bone Bolango Regency	16.67	17.19	16.68	18.49	17.97
North Gorontalo Regency	18.54	19.16	18.34	18.93	18.51
Gorontalo Province	17.22	18.00	17.41	18.32	17.72

Source: the Central Bureau of Statistics (BPS) of Gorontalo Regency

Based on table 1.2 above, the percentage of poor people especially in Gorontalo regency for the last 5 (five) years in 2012 is 20.79% (first highest rank), in 2013 is 21.57% (second highest rank), in 2014 is 21.05% (first highest rank), by 2015 by 21.80% (second highest rank), and in 2016 is 21.03% (third highest rank).

Based on the Regional Poverty Prevention Strategy (SPKD) of Gorontalo Regency 2016-2020, Households in Integrated Database can be grouped into Decil. Decil is a group of per-ten persons, so that all households can be divided into 10 Decil. Thus, the group of households in the Integrated Database is as follows:

- a. Decil 1 is the household in the lowest group of 10% ;
- b. Decil 2 is the household in the lowest group of 20% ;
- c. Decil 3 is the household in the lowest group of 30% ;
- d. Desil 4 is the household in the lowest group of 40% ;

The Integrated Database contains groups of Decil 1, Decil 2, Decil 3, and Decil 4, as it

contains 40% of the lowest rate of households. The total number of Households in Gorontalo Regency per December 31, 2016 according to Desil 1 to Desil 4 are as follows:

Table 1.3. The total number of Households in Gorontalo Regency in Welfare Status (Decil) up to 40% of lowest welfare rating

No	District	Village	Decil 1	Decil 2	Decil 3	Decil 4	Total
1	Tibawa	16	4.097	263	190	203	4.753
2	Limboto	14	2.662	309	290	348	3.609
3	Pulubala	13	3.086	131	9	95	3.404
4	Telaga Biru	15	2.362	243	209	215	3.029
5	Bongomeme	15	2.755	117	98	75	3.045
6	Limboto Barat	10	2.520	220	204	222	3.166
7	Mootilango	10	2.321	149	166	122	2.758
8	Tolangohula	15	2.379	144	140	144	2.807
9	Tabongo	9	2.024	206	142	154	2.526
10	Dungaliyo	10	1.924	134	134	113	2.305
11	Telaga	9	1.307	143	124	168	1.742
12	Batudaa	9	1.407	97	97	97	1.698
	Pantai						
13	Boliyohuto	13	1.403	137	93	96	1.729
14	Asparaga	10	1.477	70	47	40	1.634
15	Tilango	8	980	122	117	111	1.330
16	Batudaa	8	1.049	107	104	102	1.362
17	Bilato	10	1.248	73	47	54	1.422
18	Talaga Jaya	5	850	115	121	121	1.207
19	Biluhu	8	1.059	60	42	47	1.208
	Total	207	36.910	2.840	2.457	2.527	44.734

Source: Sosial Office in Gorontalo Regency

Based on table 1.3 above, it can be concluded that 19 districts and 207 villages in Gorontalo regency are 44,734 Households whose Welfare Status (Decil) up to 40% of Lowest Welfare Rating, which consists of: 36,910 Households categorized as Decil 1, 2,840 Households categorized as Decil 2, 2,457 Household categorized Decil 3, and 2,527 Households categorized as Decil 4. The total number of person in Gorontalo Regency until December 31, 2016 from decil 1 to Decil 4 are as follows:

Table 1.4. Total number of persons in Gorontalo Regency in Welfare Status (Decil) Up to 40% of Lowest Welfare Rating

No	Disrict	Total fillages	Decil 1	Decil 2	Decil 3	Decil 4	Total
1	Tibawa	16	18.049	893	692	750	20.384
2	Limboto	14	12.268	1.194	1.076	1.408	15.946
3	Pulubala	13	13.022	457	335	352	14.166
4	Telaga Biru	15	10.804	981	835	875	13.495
5	Bongomeme	15	11.616	418	378	290	12.702
6	Limboto Barat	10	10.272	724	663	753	12.412

7	Mootilango	10	10.053	560	594	450	11.657
8	Tolangohula	15	9.967	475	479	571	11.492
9	Tabongo	9	8.658	772	490	620	10.540
10	Dungaliyo	10	8.910	540	538	486	10.474
11	Telaga	9	6.384	616	543	742	8.285
12	Batudaa Pantai	9	6.323	407	369	379	7.478
13	Boliyohuto	13	6.052	386	295	333	7.066
14	Asparaga	10	6.226	265	174	143	6.808
15	Tilango	8	5.209	522	503	517	6.751
16	Batudaa	8	5.314	485	482	419	6.700
17	Bilato	10	5.454	275	146	230	6.105
18	Talaga Jaya	5	3.868	397	433	436	5.134
19	Biluhu	8	4.565	210	143	174	5.092
Jumlah		207	163.014	10.577	9.168	9.928	192.687

Source: Sosial office in Gorontalo Regency

Based on table 1.4 above, it can be concluded that 19 districts and 207 villages in Gorontalo regency are 192.687 persons whose Welfare Status (Decil) up to 40% of Lowest Welfare Rating, consisting of: 163,014 persons orized as Decil 1, 10,577 persons categorized as Decil 2, 9,168 persons categorized as Decil 3, and 9,928 persons categorized as Decil 4.

Overall the total number of poor people in Gorontalo Regency are 191,405 persons or about 48% of the population of 398,459 persons. In addition, the total number of poor household are 44,443 or about 37% of the head of household of 119,579 persons. Then, there are Recapitulation of Population and Poor Population in District of Gorontalo Regency in the year of 2016.

Table 1.5. Recapitulation of population and poor population in Gorontalo Regency in the year of 2016

No	District	Total villages	Total of Population		Total of poor population		
			Persons	House hold	Persons	%	House hold
1	Tibawa	16	42.936	13.220	20.384	47	4.753
2	Limboto	14	50.160	15.143	15.946	32	3.609
3	Pulubala	11	24.916	7.635	13.720	55	3.305
4	Telaga Biru	15	29.753	8.765	13.495	45	3.029
5	Bongomeme	15	20.144	6.094	12.702	63	3.045
6	Limboto Barat	10	23.226	7.148	11.576	50	2.974
7	Mootilango	10	19.616	5.771	11.657	59	2.758
8	Tolangohula	15	23.908	7.026	11.492	48	2.807
9	Tabongo	9	18.819	5.730	10.540	56	2.526
10	Dungaliyo	10	18.140	5.581	10.474	58	2.305
11	Telaga	9	23.162	6.933	8.285	36	1.742
12	Batudaa Pantai	9	12.368	3.577	7.478	60	1.698
13	Boliyohuto	13	17.257	5.278	7.066	41	1.729
14	Asparaga	10	13.877	4.026	6.808	49	1.634
15	Tilango	8	14.862	4.290	6.751	45	1.330

16	Batudaa	8	14.824	4.404	6.700	45	1.362	31
17	Bilato	10	9.889	2.922	6.105	62	1.422	49
18	Talaga Jaya	5	11.992	3.553	5.134	43	1.207	34
19	Biluhu	8	8.610	2.483	5.092	59	1.208	49
	Total	207	398.459	119.579	191.405	48	44.443	37

Source: Sosial office in Gorontalo Regency

Table 1.5 above shows that the total population are 398,459 people, 191,405 people or about 48% of the poor, and 119,579 heads of households there are 44,443 or 37% poor household heads. In addition, there are 9 (nine) districts or 47% of the poor population are more than 50%, i.e district of Bongomeme, Bilato, Batudaa Pantai, Biluhu, Mootilango, Dungaliyo, Tabongo, Pulubala and West Limboto.

4. Poverty Prevention Program based on public service in Gorontalo Regency.

The poverty alleviation program through Social Protection / Assistance on public service-based conducted in Gorontalo Regency in 2016 spent Rp. 88.193.298.000,-. Details of activities are as the following table:

Table 1.6. Poverty Prevention Programs through Social Protection / Assistance based on Public Service In Gorontalo Regency in the year of 2016

No	Kinds of Program	The responsible	Total of Budget Realisation		
			APBN	APBD 1	APBD 2
1	Simple Household (RTS)/ Fit House for Living (RTLH)	Public Works	1.200.000.000	-	-
2	Temporary directed Aids of people (BSLM-KKS)	Sosial Office	17.835.000.000	-	-
3	Expecting Household Program (PKH)	Sosial Office	3.116.700.000	-	-
4	Regional Healthy Hour/City Healthy Hour	Health Office	5.383.840.000	1.231.880.000	639.538.000
5	Free Electric	Mining and Energy Office	10.000.000.000	10.000.000.000	500.000.000
6	Economic Productive Enterprices (UEP)	Agriculture Office	648.000.000	100.000.000	-
7	Old Ages	Social Office	18.000.000	-	-
8	Indonesian Smart Card (KIP)/ SD	Education Office	14.873.400.000	-	-

9	Indonesian Smart Card (KIP)/SMP	Education Office	11.679.000.00 0	-	-
10	Indonesian Smart Card (KIP)/SM	Education Office	5.830.000.000	-	-
11	Indonesian Smart Card (KIP)/PT	University Level	-	-	-
12	Rice for the Poor	Social Office	5.129.540.000	-	-
13	ADKB	Social Office	8.400.000	-	-
	Total		75.721.880.00	11.331.880.0	1.139.538.000
			0	00	
	Total of Budget			Rp. 88.193.298.000	

Source: Sosial Office in Gorontalo Regency

Based on table 1.6 above, it can be concluded that there are 13 (thirteen) types of Poverty Prevention Program through Social Protection /Assistance based on Public Services. Whereas, the total budget of the Poverty Alleviation Program through Social Protection / Assistance based on Public Service in Gorontalo Regency in the year of 2016 is Rp. 88.193.298.000,- The most budget in the year of 2016 is used for Social Protection/ Assistance based on Public Services and Rp. 748.000.000, - only or about 0.85% is used for the empowerment of the poor through the Productive Economic Business (UEP) program.

B. Discussion

1. Poverty Indicator in Gorontalo Regency

Based on the Regional Poverty Prevention Strategy in the year of 2016-2020 in Gorontalo regency, the indicators used in determining the poor population and household include: a) Poverty Criteria for laborship and Entrepreneurship, b) Poverty Criteria for Health, c) Poverty Criteria for Education, d) Poverty Criteria for Infrastructure Sector; and e) Poverty Criteria for Food Endurance.

The poverty indicator results the grouping of poor households into groups of deciles. Decil is a group of per-ten persons, It means that all households can be divided into 10 Decil. Thus, the grouping of households in the Integrated Database is as follows: a) Decil 1 is the household in the lowest group of 10% ; b) Decil 2 is the household in the lowest group of 20% ; c) Decil 3 is the household in the lowest group of 30% ; and d) Decil 4 is the household in the lowest group of 40% .

The Integrated Database contains Decil 1, Decil 2, Decil 3, and Decil 4, and results 40% the lowest household welfare rating. Based on these data, the poor in Gorontalo Regency are 191,405 people or about 48% of the total population of 398,459 people, whereas, the poor households are 44.443 or 37% from the total household of 119,579 persons.

The data above shows that in Gorontalo regency, the poors are 191,405 people or 48% of the total population of 398,459, and the poor households are 44,443 or 37% of the total households of 119,579 which different from the Central Bureau of Statistics that declare the poor population in Gorontalo Regency in 2016 is 21.30%. The difference of numbers are due to the different in poverty indicators used by both the Poverty Prevention Office and by the Central Bureau of Statistics of Gorontalo Regency.

2. Poverty Profile of Gorontalo Regency

The data of the Central Bureau of Statistics (BPS) in Gorontalo Province shows that the percentage of poor people in Gorontalo regency, Gorontalo Province, from 2012 to 2016 are considered varies. But interestingly, all of them are in the level of more than 20% of the total population.

Compared with the number of poor people in the regencies / cities in Gorontalo Province, for the last 5 (five) years in the year of 2012 are 20.79% (first highest rank), in 2013 is 21.57% (second highest ranking), in 2014 is 21.05% (first highest rank), in 2015 is 21.80% (second highest rank), and in 2016 is 21.03% (third highest rank). Even, according to data on the Regional Poverty Prevention Strategy in Gorontalo Regency in the year of 2016-2020, the total number of poor people in Gorontalo Regency in 2016 are 191.405 people or about 48% of the total population of 398,459 persons. In addition, the total number of poor households are 44,443 persons or about 37% of the total households of 119,579 persons.

3. Poverty Prevention Program Based on Public Service in Gorontalo Regency, Gorontalo Province

The Poverty Prevention Program through Social Protection / assistance in Gorontalo Regency consists of 13 (thirteenth) programs. All rograms are implemented based on Public Services. Actually, the total budged for the poverty alleviation program through Social Protection / Assistance based on public service conducted in Gorontalo Regency in 2016 are Rp. 88.193.298.000,-

But, from the total budget, most of total budged in 2016, is used for Social Protection / Assistance and only Rp. 748.000.000, - or only about 0.85% is used for the empowerment of the poor through the Productive Economic Business (UEP) program.

C. Conclusion

Based on the formulation of research problems and research results can be presented the research conclusions as thenfollowing:

1. Poverty indicators used are poverty criteria: a) employment and entrepreneurship

sector, b) health sector, c) education sector, d) infrastructure sector, e) food endurance sector;

2. The number of poor people in Gorontalo Regency for the last 5 (five) years is greater than 20%, namely: in 2012 is 20.79%, in 2013 is 21.57%, in 2014 is 21.05%, in 2015 is 21.80% and in 2016 is 21.03%;

3. The budget of poverty alleviation programs through social protection/assistance assistance based on public service in Gorontalo Regency in 2015 is Rp.88.193.298.000, - but only about 0.85% is used for people of Productive Economic Enterprises;

D. Reference

1. Georghiou L., Edler J., Uyarra E., Yeow J. 2014. Policy Instruments For Public Procurement Of Innovation: Choice, Design And Assessment. [Technological Forecasting and Social Change. Volume 86](#), July 2014, Pages 1-12.
2. Khemani S. 2015. Buying votes versus supplying public services: Political incentives to under-invest in pro-poor policies. [Journal of Development Economics. Volume 117](#), November 2015, Pages 84-93
3. Grindle, M. S. 1997. Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sector of Developing Countries, Boston, MA: Harvard Institute for International Development.
4. United Nation Development Programme. 1999. Human Development Report. Oxford University Press, Inc. 198 Madison Avenue, New York, New York.
hdr.undp.org/sites/default/files/reports/260/hdr_1999_en_nostats.pdf
5. Aylon S And Fusco A. 2017. Are income poverty and perceptions of financial difficulties dynamically interrelated. [Journal of Economic Psychology. Volume 61](#), August 2017, Pages 103-114.
6. Ensor J E., Park S E., Hoddy E T., Ratner B D. 2015. A rights-based perspective on adaptive capacity. [Global Environmental Change. Volume 31](#), March 2015, Pages 38-49.
7. Somorin O A., Hamakers I JV., Arts B., Sonwa D J., Tiani A M. 2014. REDD+ policy strategy in Cameroon: Actors, institutions and governance. [Environmental Science & Policy. Volume 35](#), January 2014, Pages 87-97.
8. Anonymous. Presidential Instruction No. 5 December 27, 1992 On Improving Poverty Reduction.
<http://www.hukumonline.com/pusatdata/downloadfile/lt4e9302d215ee8/parent/13246>
9. Anonymous. Instructions of The President of The Republic of Indonesia Number 3 Year 2008 Regarding Implementation of The Cash Direct Program For Household Targets
<http://jdih.esdm.go.id/peraturan/Inpres%20No.%203%20Thn%202008.pdf>.
10. Anonymous. Regulation of The Minister of State Of The Republic of Indonesia Number 1 Year 2013 Regarding Community Empowerment Through The Movement of Empowerment And Family Welfare.
http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2013/01/29/p/e/permendagri_no.1_th_2013.doc.
11. Anonymous. Regulation of The Coordinator Minister For Human Development and Culture of The Republic of Indonesia No. 1 Of 2016 On General Guidelines for Subsidizing Rice for Low-Income Communities In 2016.
<https://www.kemenkopmk.go.id/sites/default/files/pengumuman/PEDUM%20RASKIN%202016%20CETAK%20FIX.pdf>.

12. Anonymous. Regulation Of The President of The Republic of Indonesia Number 191 of 2014 Concerning Provision, Distribution and Rice Price of Oil Fuel Oil.
<http://jdih.esdm.go.id/peraturan/Perpres%20Nomor%20191%20Tahun%202014.pdf>.
13. Anonymous. Poverty Protected Poverty Program (P2KP) Directorate General of Highway Cooperation of General Employment Work.
http://www.p2kp.org/ppm/files/pdf/juklak/ppm_bagi_kab-kota.pdf.
14. Anonymous. Regulation of The Minister of Finance of The Republic of Indonesia Number 229 / Pmk.02 / 2012 'Regarding The Preparation and Implementation of The Content of The Implementation of Advanced Budget Programs National Activities of Empowerment of Community Budget In Budget 2013 With The Resources of The Rest of The Program Program National Activities of Mandiri Empowerment Empowerment.
<http://www.anggaran.depkeu.go.id/peraturan/PMK%20229%20-%202012%20-%20Juklak%20DIPA-L%20PNPM.pdf>.
15. Anonymous. Percentage of the Poor (%) by Regency / City in Gorontalo Province, 2004-2015. <https://gorontalo.bps.go.id/linkTabelStatis/excel/id/218>
16. Anonymous. Summary of Semester Examination Results (IHPS) II Year 2016
http://www.bpk.go.id/assets/files/ihps/2015/II/ihps_ii_2015_1488344101.pdf
17. Anonymous. Central Bureau Of Statistics (BPS). 2016. Regional Local Government Plan In 2016 Gorontalo Province.
<https://www.gorontaloprov.go.id/component/advlisting/?view=download&fileId>
18. Anonymous. Central Bureau Of Statistics (BPS). 2016. Gender Development Index (IPG) and Components by Regency / City in Gorontalo Province, 2014.
<https://gorontalo.bps.go.id/mod/exportData/exportPDF.php>

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Jln. Jenderal Sudirman No. 06 Kota Gorontalo-96128

Telp. (0435) 821125 Fax. (0435) 821752



KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

NOMOR : 334/UN47/PL/2017

Tentang

PENETAPAN DOSEN PELAKSANA PENELITIAN

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO YANG LOLOS SELEKSI

DRPM KEMENRISTEKDIKTI RI

TAHUN 2017

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Menimbang

- a. Bawa kegiatan Penelitian adalah salah satu unsur tridharma perguruan tinggi yang harus dijaga dan ditingkatkan mutunya demi penguatan kelembagaan Universitas Negeri Gorontalo;
- b. Bawa penguatan kelembagaan merupakan salah satu hal penting dalam menjamin peningkatan mutu, maka perlu dilaksanakan Penelitian melalui program Penelitian bagi dosen di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo;
- c. Bawa dosen yang melaksanakan Penelitian dalam Surat Keputusan ini adalah dosen yang dinyatakan lolos sesuai dengan hasil penilaian proposal oleh reviewer DRPM Kemenristekdikti Tahun 2017;
- d. Bawa untuk keperluan pelaksanaan butir (a) dan (b) diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor atas dasar pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Mengingat

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2004 tentang Perubahan Status IKIP Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: 18 Taun 2006 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo;

7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 131/KMK.05/2009 tanggal 21 April 2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 193/MPK.A4/KP/2014 tanggal 10 September 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2014-2018;

Memperhatikan :

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor DIPA-042.06.0/2017 tanggal 18 Januari 2017.
2. Surat Direktur Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat tanggal 26 Januari 2017 nomor: 125/E3/2017 tentang Penerima Hibah Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk Dosen yang nama-nama serta judul kegiatan Penelitian sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini, sebagai pelaksana Penelitian Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2017;
- Kedua : Nama-nama dosen yang ditetapkan dengan surat keputusan ini bertugas melaksanakan kegiatan Penelitian tahun 2017 sesuai dengan panduan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XI tahun 2017 dan memasukkan laporan pelaksanaan, laporan rekapitulasi keuangan 100% dan diunggah ke SIMLITABMAS selambat-lambatnya pada tanggal 31 Oktober 2017.
- Ketiga : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dialokasikan pada DIPA DRPM Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun Anggaran 2017;

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah kegiatan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dengan ketentuan bilamana terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo

Pada tanggal April 2017

Rektor

✓ Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd

NIP. 19600603198603 1 003

Tembusan :

1. Yth. Para Wakil Rektor Universitas Negeri Gorontalo;
2. Yth. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo;
3. Yth. Direktur PPs Universitas Negeri Gorontalo;
4. Yth. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo;
5. Yth. Kepala Biro di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo;
6. Yth. Bendahara Pengeluaran Universitas Negeri Gorontalo;
7. Yang bersangkutan
8. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo
 Nomor : 334/UN47/PL/2017
 Tanggal : 3 April 2017
 Tentang : Penetapan Dosen Penelitian Tahun 2017 yang lolos seleksi DRPM KEMENRISTEKDIKTI RI.

NO	NAMA	JUDUL PENELITIAN	FAKULTAS	SKIM	BIAYA (RP)	Dana Tambahan
1	Jumiatil Ilham,ST., MT Wrastawa Ridwan,ST,MT. ST. Erwan Hasan, MT	Pengembangan Dan Uji Kinerja Alat Reaktor Gas Tipe Fixed Dome Multi Input Skala Laboratorium	FATEK	Penelitian Produk Terapan	72.500.000 50.750.000 (70%) 21.750.000 (30%)	Rp. -
2	Bambang Panji Asmara,S.T Salmawati Tansa,S.T	Pembuatan Pembangkit Sumber Energi Listrik Alternatif Dengan Model Sistem Hibri Thermolektrik Generator (TEG) Dengan Panel Sel Surya Mini Untuk Desa Mandiri Energi	FATEK	Penelitian Produk Terapan	71.500.000 50.050.000 (70%) 21.450.000 (30%)	Rp. -
3	Ir Wahab Musa MUSA M.T, Ph.D Wrastawa Ridwan,ST., MT.	Aplikasi Model Prediksi Berbasis Algoritma Genetika dan Nelder Mead Untuk Harga Energi Tak Terbarukan	FATEK	Penelitian Produk Terapan	65.000.000 45.500.000 (70%) 19.500.000 (30%)	Rp. -
4	Dr. Teti Sutriyati Tuloli, M.Si, S.Farm Dewirahmawati Moo	Rasionalitas Penggunaan Antibiotik dalam Terapi Demam Typhoid Pada Pasien Anak Rawat Inap di RSUD Dr. M.M. Dunda Limboto	FOK	Penelitian Produk Terapan	50.000.000 35.000.000(70%) 15.000.000 (30%)	Rp. -
5	Madania, S.Farm, Apt, M.Sc. Hamsidar Hasan, S.Si, M.Si,Apt Nur Ain Thomas, S.Si, M.Si	Pemanfaatan Ubi Ungu Sebagai Makanan Kesehatan dalam Upaya Peningkatan Derajat Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat Petani di Desa Mekar Jaya Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohowato	FOK	Penelitian Produk Terapan	72.500.000 50.750.000(70%) 21.750.000 (30%)	Rp. -
6	Dr Netty Ischak, M.Kes Deasy Natalia Botutihe S.Pd, M.Si	Pengembangan Tanaman Lokal (Ceplukan, Daun Salam, Sambiloto) Sebagai Herbal Medisin Untuk Menurunkan Kadar Glukosa Darah Pada Kasus Diabetes Mellitus Tipe 2	MIPA	Penelitian Produk Terapan	75.000.000 52.500.000(70%) 22.500.000 (30%)	Rp. -
7	Nurhayati Bialangi Mohamad Adam Mustapa S.Si, M.Sc Dr. Yuszda K. Salimi, S.Si, M.Si	Produk Senyawa Aktif Antimalaria Tumbuhan Peperomia pellucida L. Kunth dan Pengembangannya Sebagai Obat Herbal Terstandar Bentuk Sediaan Kapsul 	MIPA	Penelitian Produk Terapan	70.000.000 49.000.000(70%) 21.000.000 (30%)	Rp. 15.000.000
8	Idham Halid Lahay, S.T Hasanuddin, S.T, M.Si Hendra Uloli, S.T	Pendekatan Ergonomi Total Pada Pekerja Pembuat Batako di Gorontalo	FATEK	Penelitian Produk Terapan	67.500.000 47.250.000(70%) 20.250.000 (30%)	Rp. -
9	Dr Widysusanti Abdulkadir, S.Si, M.Si, Apt. Robert Tungadi, S.Si., M.Si, Apt	Ekstrak Kering Teripang Laut (Holothuria scabra) Sebagai Hepatoprotektor Akibat Pemberian Dosis Hepatotoksik Parasetamol	FOK	Penelitian Produk Terapan	57.000.000 39.900.000(70%) 17.100.000 (30%)	Rp. 20.000.000
10	Asri Silvana Naiu S.Pi, M.Si Nikmawatisusanti Yusuf	Formulasi dan uji stabilitas produk herbal skin lotion yang menggunakan gelatin dari tulang Ikan Tuna hasil ekstraksi dengan cuka aren	FPIK	Penelitian Produk Terapan	72.000.000 50.400.000(70%) 21.600.000 (30%)	Rp. -
11	Dr Zuhriana K.Yusuf M.Kes Dr Nanang Roswita Paramata, S.Ked, M.Kes Wirda Y Dulahu	Pemanfaatan minyak kelapa murni (VCO) untuk pengobatan kulit pasien kusta	FOK	Penelitian Produk Terapan	60.000.000 42.000.000(70%) 18.000.000 (30%)	Rp. -
12	Nikmawatisusanti Yusuf Asri Silvana Naiu S.Pi, M.Si	Pengembangan Formula Sabun Cair Alami Menggunakan Gelatin Tipe A dari Tulang Ikan Tuna (Thunnus sp)	FPIK	Penelitian Produk Terapan	70.000.000 49.000.000(70%) 21.000.000 (30%)	Rp. 15.000.000
13	Asrin Lukum, M.Si Ir, Asda Rauf M.Si	Produk Kitasan Dari Limbah Kulit Udang Windu (Peneaus Monodon) Sebagai Koagulan Alami untuk Meminimalkan Logam Berat Hg	MIPA	Penelitian Produk Terapan	70.000.000 49.000.000(70%) 21.000.000 (30%)	Rp. 10.000.000

	Faiza A. Dali S.Pi, M.Si Rita Marsuci Harmain	Pengembangan Penyedap Rasa Umami dan Probiotik Potensial Hasil Fermentasi Ikan Lokal	FPIK	Penelitian Produk Terapan	70.000.000 49.000.000(70%) 21.000.000 (30%)	Rp. 15.000.000
15	Citra Panigoro S.T, M.Si Dr Juliana S.Pi, M.P	Pengembangan Model Pengelolaan Budidaya Laut Berbasis Daya Dukung Lingkungan di Kabupaten Gorontalo Utara	FPIK	Penelitian Produk Terapan	70.000.000 49.000.000(70%) 21.000.000 (30%)	Rp. 15.000.000
16	DR Mohamad Ikbal Bahua S.P. M.Si Dewa OkaSuparta S.P, M.P	Strategi Kebijakan Rehabilitasi Lahan Kritis Berdasarkan Partisipasi Masyarakat di DAS Randangan Kabupaten Pohuwato	FAPERTA	Penelitian Produk Terapan	70.000.000 49.000.000(70%) 21.000.000 (30%)	Rp. 15.000.000
17	Herwin Mopangga S.E., M.Si Idris Yanto Niode S.Pd., MM	Pengembangan Metode Produksi dan Pemasaran Stik Jagung Ikan sebagai Produk Unggulan Ekspor Gorontalo	FEKON	Penelitian Produk Terapan	52.500.000 36.750.000(70%) 15.750.000 (30%)	Rp. -
18	Rahmiyati Kasim S.TP Marleni Limonu Siti Aisa Liputo, S.Si, M.Si	Formulasi Dan Karakteristik Snack Food Bars Dengan Indeks Glikemik Rendah Berbahan Dasar Pisang	FAPERTA	Penelitian Produk Terapan	72.500.000 50.750.000(70%) 21.750.000 (30%)	Rp. -
19	Safriyanto Dako S.Pt, M.Si Fahrul Ilham S.Pt Ir Nibras K Laya MP	Peningkatan Mutu Genetik Ayam Kampung Melalui Triple Crossing	FAPERTA	Penelitian Produk Terapan	70.000.000 49.000.000(70%) 21.000.000 (30%)	Rp. -
20	Lisna Ahmad S.TP Yoyanda Bait S.TP Suryani Une S.TP, M.Sc.	Formulasi Dan Evaluasi Nilai Gizi Biologi	FAPERTA	Penelitian Produk Terapan	70.000.000 49.000.000(70%) 21.000.000 (30%)	Rp. -
21	Sri Indriyanai S. Dai S.E., M.E Melan Angriani Asnawi S.Pd, M.Si	Model Strategi Pengembangan Produk Turunan Kelapa Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Produk Kelapa Di Provinsi Gorontalo	FEKON	Penelitian Produk Terapan	57.500.000 40.250.000(70%) 17.250.000 (30%)	Rp. -
22	Elvie Fatmah Mokodongan S.T., M.T Muhammad Rijal Syukri S.T, M.Si	Desain Penataan Ruang Terbuka Publik Melalui Pendekatan Konsep "Sense of Place" di Kota Tua Gorontalo	FATEK	Penelitian Produk Terapan	70.000.000 49.000.000(70%) 21.000.000 (30%)	Rp. 10.000.000
23	Dr. Maryam Rahim M.Pd Irvan Usman S.Psi Meiske Puluhulawa S.Pd, M.Pd	Pengembangan Panduan untuk Meningkatkan Kompetensi Guru Bimbingan dan Konseling dalam Meningkatkan Kecerdasan Sosial Siswa SMP Kelas VII Kota Gorontalo	FIP	Penelitian Produk Terapan	58.000.000 40.600.000(70%) 17.400.000 (30%)	Rp. 15.000.000
24	Kalih Trumansyahjaya ST., MT Lidya Surijani Tatura ST., M.Si	Desain Model Rumah Tinggal Berbasis Arsitektur Lokal Bagi Golongan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Berdasarkan Keinginan Dan Perkembangan Keluarga Di Kota Gorontalo	FATEK	Penelitian Produk Terapan	66.500.000 46.550.000(70%) 19.950.000 (30%)	Rp. -
25	Ernawati S.T Heryati	Aplikasi Tradisi "Payango" pada Desain Perlakuan Pintu Utama Rumah Tinggal Masyarakat Gorontalo sebagai Upaya Pelestarian Budaya Lokal	FATEK	Penelitian Produk Terapan	70.000.000 49.000.000(70%) 21.000.000 (30%)	Rp. 10.000.000
26	I Wayan Seriyoga Parta S.Sn., M.Sn	Pemanfaatan Limbah Pohon Aren dan pohon sagu Sebagai Bahan Baku Produk Mebel dan Dekorasi Interior	FATEK	Penelitian Produk Terapan	70.000.000 49.000.000(70%) 21.000.000 (30%)	Rp. 10.000.000
27	Dr Abdul Haris Panai M.Pd Gamar Abdullah S.Si, M.Pd Melan Saleh S.Pd	Pengembangan Model Perangkat Pembelajaran Berbasis Kerja Ilmiah Sebagai Pedoman bagi Guru Untuk Membelajarkan Sains di Sekolah Dasar 	FIP	Penelitian Produk Terapan	70.000.000 49.000.000(70%) 21.000.000 (30%)	Rp. 10.000.000
28	Imran Rosman Hambali S.Pd., SE., MSA Fitri Hadi Yulia Akib	Pengelolaan Dana Alokasi Desa (ADD) dalam Peningkatan Kegiatan Ekonomi Produktif di Provinsi Gorontalo	FEKON	Penelitian Produk Terapan	75.000.000 52.500.000(70%) 22.500.000 (30%)	Rp. -
29	Dian Ekawaty Ismail SH., MH Novendri M Nggilu S.H, M.H Moh. Ramdhhan Arif Kaluku S.Kom, M.Kom	Model Penyebarluasan Produk Hukum Daerah Melalui Sistem Produk Hukum Daerah (SIPKRAH) di Kota Gorontalo.	FHUKUM	Penelitian Produk Terapan	67.045.000 46.931.500(70%) 20.113.500 (30%)	Rp. -
30	Dr. Dra Rasuna Talib M.Hum Sri Agrianty Mestari S.Pd., M.Ed. TESOL Mohammad Syamsurizal SS.M.Pd	Pengembangan Buku Ajar Berbasis "ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES" (ESP) Melalui Pendekatan Lesson Study Di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo	FSB	Penelitian Produk Terapan	57.500.000 40.250.000(70%) 17.250.000 (30%)	Rp. -

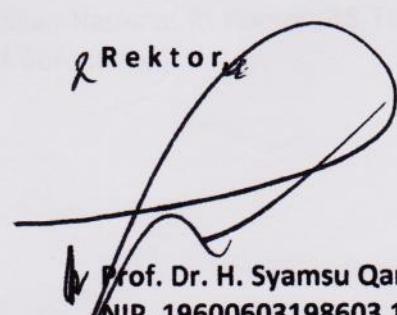
	Tineke Wolok S.T, M.M. Mohamad Agussalim Monoarfa M.M	Rekonstruksi Model Layanan Akademik Berbasis Quality Assurance Melalui Penerapan Dimensi Pelayanan Publik Di Universitas Negeri Gorontalo	FEB	Penelitian Produk Terapan	65.000.000 45.500.000(70%) 19.500.000 (30%)	Rp. -
32	Murhima A. Kau S.Psi, M.Psi Salim Korompot S.Pd, M.Pd Sukma Nurilawati Botutihe S.Psi., M.Psi	Perangkat Panduan untuk Meningkatkan Kompetensi Guru dalam Mengembangkan Kreativitas Siswa Sekolah Dasar	FIP	Penelitian Produk Terapan	60.000.000 42.000.000(70%) 18.000.000 (30%)	Rp. -
33	Mursidah Waty S.Pd Fendi Adiatmono S.Sn, M.Sn	Inovasi Karawo Batik Airbrush Menjadi Art Faashion Guna Meningkatkan Trade Mark Potensi Lokal Gorontalo	FATEK	Penelitian Produk Terapan	53.500.000 37.450.000(70%) 16.050.000 (30%)	Rp. -
34	Nurlaila Husain S.S, M.Pd Indri Wirahmi Bay S.Pd., MA Waty Mamu S.Pd., M.Pd	Pengembangan Bahan Ajar (MULOK) Sekolah Dasar Berbasis Strategi Pembelajaran "English for Young Learners" Untuk Mempertahankan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Gorontalo	FSB	Penelitian Produk Terapan	65.000.000 45.500.000(70%) 19.500.000 (30%)	Rp. -
35	Boby Rantow Payu M.E, S.Si. Selvi S.E, M.Si	Strategi Peningkatan Finacial Literacy Masyarakat Di Kota Gorontalo Dalam Mendukung Kebijakan Inclusion Di Indonesia	FEB	Penelitian Produk Terapan	62.500.000 43.750.000(70%) 18.750.000 (30%)	Rp. -
36	Nurnaningsih Nic Abdul ST.M.T Sri Sutarni Arifin S.Hut Vierta Ranmlan Tallei ST.,MT	Pengembangan Model Pelestarian Kawasan Kota Tua Gorontalo Menuju Kota Pusaka	FATEK	Penelitian Produk Terapan	60.000.000 42.000.000(70%) 18.000.000 (30%)	Rp. -
37	Tirtawaty Abdul S.Pd., M.Pd Nova Elydia Ntobuo S.Pd, M.Pd Citron S. PAyu S.Pd., M.Pd	Pengembangan Perangkat Model Pembelajaran Berbasis Virtual Laboratory Pada Mata Pelajaran Fisika Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa SMA Negeri 1 Gorontalo	FMIPA	Penelitian Produk Terapan	65.000.000 45.500.000(70%) 19.500.000 (30%)	Rp. -
38	Supartin S.Pd, M.Pd Trisnawaty Junus Buhungo M.Pd Abd Wahidin Nuayi S.Pd, M.Si	Pengembangan Perangkat Pembelajaran IPA Berorientasi Kecakapan Hidup Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Stad	FMIPA	Penelitian Produk Terapan	62.500.000 43.750.000(70%) 18.750.000 (30%)	Rp. -
39	Nur Mohammad Kasim S.Ag Maisara Sunge SH., MH	Implikasi Kebijakan Zakat Profesi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Gorontalo	FHUKUM	Penelitian Produk Terapan	72.500.000 50.750.000(70%) 21.750.000 (30%)	Rp. -
40	Mutia CH Thalib S.H., M.Hum Dra. Resmiyati Yunus M.Pd	Model Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) Berbasis pada Budaya Lokal di Kota Gorontalo	FHUKUM	Penelitian Produk Terapan	70.000.000 49.000.000(70%) 21.000.000 (30%)	Rp. -
41	Irvan Usman S.Psi Meiske Puluhulawa S.Pd, M.Pd Dra. Mardia Bin Smith S.Pd M.Si	Pengembangan Panduan Modeling Simbolis Berbasis Video Untuk Meningkatkan Efikasi Diri Siswa SMA Di Kota Gorontalo	FIP	Penelitian Produk Terapan	60.000.000 42.000.000(70%) 18.000.000 (30%)	Rp. -
42	Dr. Setiyo Utomo S.Pd, M.Pd Irin Novita Arifin S.Pd, M.Pd	Model Permainan Kinestetik Untuk Meningkatkan Kemampuan Matematika Awal Pada Anak Usia Dini	FIP	Penelitian Produk Terapan	70.000.000 49.000.000(70%) 21.000.000 (30%)	Rp. -
43	Dr. Rahmatiah S.Pd., M.Si Dr. Hapsawati Taan ST, MM Dondick Eicaksono Wiroto M.Si	Pengembangan Model Penguatan Etos Kewirausahaan Pemuda untuk mendorong Pertumbuhan Lapangan Kerja di Provinsi Gorontalo	FIS	Penelitian Produk Terapan	60.000.000 42.000.000(70%) 18.000.000 (30%)	Rp. -
44	Dra. Nonny Basalama, MA, Ph.D Dewi Dama, S.Pd, M.Ed	Rekayasa Model Pembelajaran Bahasa Inggris pada Konteks Foreign Language berbasis Autonomy Learning	FSB	Penelitian Produk Terapan	57.500.000 40.250.000(70%) 17.250.000 (30%)	Rp. -
45	Isnawati Mohamad S.Pd, M.Pd Drs. Suleman Dangkua M.Hum Sukma Nurilawati Botutihe S.Psi., M.Psi	Pengembangan Motif Dan Mode Busana Karawo Kontemporer Berbasis Kearifan Urban Untuk Kaum Remaja	FATEK	Penelitian Produk Terapan	73.585.000 51.509.500(70%) 22.075.500 (30%)	Rp. -
46	Edi Setiawan S.Kom Tajudin Abdillah S.Kom, M.Cs Roviana Dai S.T, M.T	Pembangunan Sistem Informasi Geografi Dan Sistem Informasi Eksekutif Pengelolaan Potensi Tambang Berdasarkan Hasil Rekayasa Proses Bisnis (Studi Kasus : Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi Kabupaten Gorontalo)	FATEK	Penelitian Produk Terapan	70.000.000 49.000.000(70%) 21.000.000 (30%)	Rp. 10.000.000
47	Amirudin Yunus Dako S.T Yowan Tamu S.Ag	Rancang Bangun Prototipe Sistem Informasi Kalender Musim Berbasis	FATEK	Penelitian Produk	70.000.000 49.000.000(70%)	Rp. 10.000.000

		Kearifan Lokal Masyarakat Gorontalo		Terapan	21.000.000 (30%)	
8	Manda Rohandi S.Kom Dr. Mohammad Yusuf Tuloli ST, MT Rochmat Mohammad Thohir	Pemetaan Potensi Dan Pengembangan Sistem Informasi Pariwisata Bawah Laut Di Provinsi Gorontalo	FATEK	Penelitian Produk Terapan	70.000.000 49.000.000(70%) 21.000.000 (30%)	Rp. -
49	Lanto Ningrayati Amali S.Kom, M.Kom Lillyan Hadjaratie Sitti Suhada S.Kom, M.T	Pengembangan Model Penerapan Tata Kelola Teknologi Informasi berdasarkan Budaya Organisasi di Universitas Negeri Gorontalo	FATEK	Penelitian Produk Terapan	75.000.000 52.500.000(70%) 22.500.000 (30%)	Rp. -
50	Abd. Aziz Bouthy S.Kom, M.Kom Mohammad Hidayat Koniyo ST, M.Kom Dian Novian, S.Kom, MT	Model Tata Kelola Baru Teknologi Informasi Pada Pemerintah Kota Gorontalo Menggunakan Framework Cobit 4.1	FATEK	Penelitian Produk Terapan	67.500.000 47.250.000(70%) 20.250.000 (30%)	Rp. -
51	Ardiyanto Saleh Modjo M.P Ir. Rida Iswati M.Si	Desain Alat Pengendali Hama Keong Mas Yang Inovatif Menggunakan Tenaga Surya Dan pengontrol Suhu	FAPERTA	Penelitian Produk Terapan	65.000.000 45.500.000(70%) 19.500.000 (30%)	Rp. -
52	RIANA DIAH SITHARESMI S.Sn, MA	Hermeneutika Gadamerian di Dalam Proses Penciptaan "Bedoyo-Legong Calonarang" Karya Retno Maruti dan Bulantrisna Djelantik	FATEK	DISERTASI DOKTOR	50.000.000 35.000.000 (70%) 15.000.000 (30%)	Rp. 5.000.000
53	Indriati Martha Patuti S.T, M.Eng	Pemanfaatan Material Lokal untuk Konstruksi Perkuatan Lereng	FATEK	DISERTASI DOKTOR	53.000.000 37.100.000 (70%) 15.900.000 (30%)	Rp. 7.000.000
	Muh. Tahir S.TP	Desain pembangkit asap dan udara panas, uji performansi dan kandungan benzo(a)piren.	FATEK	DISERTASI DOKTOR	51.000.000 37.700.000 (70%) 15.300.000 (30%)	Rp. 7.000.000
55	Hariana S.Pd, M.Ds	Fenomena Modifikasi Desain Busana Walimomo Sebagai Busana Perkawinan Akad Nikah Masyarakat Gorontalo (Kajian Estetika)	FATEK	DISERTASI DOKTOR	53.000.000 37.100.000 (70%) 15.900.000 (30%)	Rp. 7.000.000
56	Trifandi Lasalewo S.T, M.T	Model Perilaku Komunikasi Tim Pengembang Produk Dan Dampaknya Terhadap Kemampuan Berinovasi	FATEK	DISERTASI DOKTOR	53.000.000 37.100.000 (70%) 15.900.000 (30%)	Rp. 7.000.000
57	Yuliana Retnowati S.Si, M.Si	Diversitas dan Distribusi Actinomycetes di Hutan Bakau Torosiaje Gorontalo	FMIPA	DISERTASI DOKTOR	53.000.000 37.100.000 (70%) 15.900.000 (30%)	Rp. 7.000.000
58	Salam S.Pd, M.Pd	Model Materi Ajar Membaca Berbasis Content and Language Integrated Learning (CLIL)	FSB	DISERTASI DOKTOR	52.500.000 36.750.000 (70%) 15.750.000 (30%)	Rp. 5.000.000
59	Rahmani Kadarnigsih S.T, M.T	Perilaku dan Kapasitas Geser Hubungan Balok Kolom Beton Bertulang Menggunakan Profil Baja King Cross dan Perbandingannya Terhadap Hubungan Balok Kolom Beton Bertulang Menggunakan Sengkang (Konvensional)	FAPERTA	DISERTASI DOKTOR	50.000.000 35.000.000 (70%) 15.000.000 (30%)	Rp. 5.000.000
60	Rita Marsuci Harmain Faiza A. Dali S.Pi, M.Si	Kajian dan Pengembangan Makanan Tradisional Ilabulo sebagai Pangan Fungsional yang Difortifikasi Rumput Laut Kappaphycus alvarezii dan Tepung Tulang Ikan Patin (Pangasius sp.)	FPIK	Kerjasama Antar Perguruan Tinggi	100.000.000 70.000.000 (70%) 30.000.000 (30%)	Rp. 5.000.000
61	Vivien Novarina A. Kasim S.Ked, M.Kes dr. Si Manovita Pateda S.Ked, M.Kes	Suplementasi Ekstrak Ikan Gabus Terhadap Status Gizi dan Imunitas Pada Pasien Stroke	FOK	Kerjasama Antar Perguruan Tinggi	100.000.000 70.000.000 (70%) 30.000.000 (30%)	Rp. 5.000.000
62	Muhammad Rijal Syukri S.T, M.Si Sri Sutarni Arifin S.Hut	Desain Infrastruktur Ramah Lingkungan Dengan Pendekatan Geospasial Perencanaan	FATEK	Kerjasama Antar Perguruan Tinggi	100.000.000 70.000.000 (70%) 30.000.000 (30%)	Rp. 5.000.000
63	drh Tri Ananda Erwin Nugroho S.K.H, M.Sc Syam S. Kumaji M.Kes	Investigasi Penyakit Jembrana Pada Sapi Bali Di Gorontalo Menggunakan Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)	FAPERTA	Kerjasama Antar Perguruan Tinggi	100.000.000 70.000.000 (70%) 30.000.000 (30%)	Rp. 5.000.000
64	Muhammad Yusuf S.Si Dewa Gede Eka Setiawan S.Pd, M.Sc.	Higgs Boson dalam Teori String dan Dimensi Ekstra	FMIPA	Kerjasama Antar Perguruan Tinggi	100.000.000 70.000.000 (70%) 30.000.000 (30%)	Rp. 5.000.000

5.	Dr. Ir Musrowati Lasindrang M.P	Komposit Nanosilika-Kitosan sebagai Pupuk Lepas-Lambat Si untuk Tanaman Padi	FAPERTA	PASCA DOKTOR	121.575.000 85.102.500 (70%) 36.472.500 (30%)	Rp. 17.500.000
66	Dr. Rieny Sulistijowati S.S.Pi, M.Si	Produksi Asam Glutamat Dari Ikan Kayu Cakalang Hasil Solid State Fermentation (SSF) Oleh Aspergillus oryzae	FPIK	PASCA DOKTOR	169.500.000 118.650.000 (70%) 50.850.000 (30%)	Rp. 17.500.000
67	Prof. Dr. Drs Enos Taruh M.Pd Dr. Drs. Mursalin M.Si	Pengembangan Perangkat Penilaian Otentik Dalam Pembelajaran IPA Fisika SMA	FMIPA	Tim Pasca Sarjana	150.000.000 105.000.000(70%) 45.000.000 (30%)	Rp. 15.000.000
68	Dr. Drs Arfan Arsyad M.Pd Prof. Dr. Abdul Kadim Masaong	Analisis Kompetensi Pengawas Dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Melalui Penguatan Budaya Mutu Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Boalemo	FIP	Tim Pasca Sarjana	150.000.000 105.000.000(70%) 45.000.000 (30%)	Rp. 15.000.000
69	Karmila Machmud, Ph.D Dr. Drs. Harto Malik M.Hum	Interating Mobile Technology In Efl (English As A Foreign Language) Instructions To Promote Students' Learning Autonomy In Increasing Their Mastery Of The Language Skills	FSB	Tim Pasca Sarjana	150.000.000 105.000.000(70%) 45.000.000 (30%)	Rp. -
70	Dr. Drs Supriyadi M.Pd Dr Muslimin S.Pd, M.Pd	Pengembangan Model Perangkat Pembelajaran Menulis Ilmiah yang Partisipatif dan Kolaboratif untuk Mengembangkan Kecerdasan Sosial dan Emosional Mahasiswa	FSB	Tim Pasca Sarjana	150.000.000 105.000.000(70%) 45.000.000 (30%)	Rp. -
71	Prof. Dr. Drs Ansar M.Si Dr. Drs Ikhfan Haris M.Sc.	Meningkatkan Daya Saing, Inovasi dan Kompetensi Lulusan Perguruan Tinggi Melalui Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Life Skill Formation	FIP	Tim Pasca Sarjana	150.000.000 105.000.000(70%) 45.000.000 (30%)	Rp. 15.000.000
72	Dr.Eng Sri Maryati S.Si Dr. Sunarty Suly Eraku M.Pd Muhammad Kasim S.T, M.T	Model Pengelolaan DAS Bone Sebagai Penyedia Jasa Lingkungan Di Provinsi Gorontalo	MIPA	PUPT	155.000.000 108.000.000(70%) 46.500.000 (30%)	Rp. -
73	Eduart Wolok S.T, M.T Dr. Abdul Hafidz Olii M.Si Stella Junus S.T Zhulmaydin Fachrussyah M.Si, S.ST	Prototipe Perahu Listrik Hasil Kolaborasi Energi Surya Dan Angin Untuk Masyarakat Nelayan Tradisional	FAPERTA	PUPT	210.000.000 147.000.000(70%) 63.000.000 (30%)	Rp. 20.000.000
74	Yuniarti Koniyo M.P Dr. Juliana S.Pi, M.P	Domestikasi Ikan Manggabai (<i>Glossogobius giuris</i>) Melalui Optimalisasi Lingkungan dan Pakan	FPIK	PUPT	150.000.000 105.000.000(70%) 45.000.000 (30%)	Rp. -
75	Dr. Abdul Hafidz Olii M.Si Femmy Sahami Sri Nuryatin Hamzah M.Si	Pengembangan Potensi Sumberdaya Perikanan Nike (<i>Awaous sp.</i>) Berbasis Budaya Lokal Di Kota Gorontalo	FPIK	PUPT	116.500.000 81.550.000(70%) 34.950.000 (30%)	Rp. -
76	Dr. Yuszda K Salimi S.Si, M.Si Dr. Widysusanti Abdulkadir S.Si, M.Si, Apt. Nurhayati Bialangi	Pengembangan Produk Pangan Fungsional Daun Kelor (<i>Moringa oleifera Lam.</i>) Untuk Menghambat Proliferasi Sel Kanker	FMIPA	PUPT	135.500.000 94.850.000(70%) 40.650.000 (30%)	Rp. -
77	Weny JA Musa M.Si Dr. Dra Jusra Ahmad M.Si Dr. Dra Chairunnisa JL M.Si	Senyawa bioaktif dari tanaman tombili dan tubile sebagai pengganti pestisida sintetik pada tanaman padi yang terserang hama	FMIPA	PUPT	215.000.000 150.500.000(70%) 64.500.000 (30%)	Rp. 10.000.000
78	Drs. Sunarto Kadir M.Kes. Lisna Ahmad S.TP Rahmiyati Kasim S.TP	Fortifikasi Kalsium Bubur Jagung Tradisional Gorontalo Untuk Lansia dan Kajian Sosial Ekonomi	FOK	PUPT	169.000.000 118.300.000(70%) 50.700.000 (30%)	Rp. 50.000.000
79	Dr. Laksmyn Kadir S.Pd, M.Kes Wirnangsi D. Uno S.Pd, M.Kes Syam S. Kumaji M.Kes	Pengembangan Produksi "SUJAKAU" Sebagai Minuman Fungsional Untuk Meningkatkan Status Gizi Dan Daya Tahan Tubuh Anak	FOK	PUPT	137.500.000 96.250.000(70%) 41.250.000 (30%)	Rp. -
80	Dr. Ade Muhamram S.Pi, M.Si Mulis S.Pi, M.Sc	Model Teknologi Teknologi artificial Coral reef Dan Seed Protector Untuk Peningkatan Produksi Dan Kualitas Rumput Laut Serta Daya Dukung Ekologi Pesisir Di Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo	FPIK	PUPT	215.000.000 150.500.000(70%) 64.500.000 (30%)	Rp. 10.000.000

	Dr, Drs. Opir Rumape M.Si Dr. Netty Ino Ischak M.Kes Dr. Akram La Kilo M.Si	Insektisida Alami dari Biji Kecubung, Jure, dan Srikaya sebagai Senyawa Bioaktif Pengendali Hama Tanaman Kedelai	FMIPA	PUPT	205.000.000 143.500.000(70%) 61.500.000 (30%)	Rp. -
82	Dr. Dra Chairunnisah JL M.Si Dr. Dra Jusna Ahmad M.Si Dr. Mohamad Lihawa S.P., M.P	Pengembangan Pupuk Hijau Dan Pestisida Nabati Menggunakan Gulma Siam (Chromolaena odorata) Dan Aplikasinya Untuk Meningkatkan Produksi Jagung	FMIPA	PUPT	100.000.000 70.000.000(70%) 30.000.000 (30%)	Rp. -
83	Dr. Ir Hayatiningsih Gubali M.Si Prof. Dr. Ir Mahludin H. Baruwadi Wawan Tolingga S.P., M.Si	Kajian Potensi Rintisan Kawasan Agro Science Techno Park Provinsi Gorontalo	FAPERTA	PUPT	120.000.000 84.000.000(70%) 36.000.000 (30%)	Rp. -
84	Dr. Drs Ismail Djakaria M.Si Muhammad Yusuf S.Si	Fundamental Simetri Gauge-Weyl dan Aljabar Lie-Grup Lie dalam Mathematical Physics	FMIPA	PUPT	175.000.000 122.500.000(70%) 52.500.000 (30%)	Rp. -
85	Dr. Farudin Zain Olilingo S.E., M.Si Ir. Asda Rauf M.Si Frahmawati Bumulo S.E., M.Si	Analisis Sektor Unggulan Wilayah Kerjasama Utara-utara Sulawesi	FEKON	PUPT	150.000.000 105.000(70%) 45.000.000 (30%)	Rp. -
86	Dr. Masri Kudrat Umar M.Pd Yuniarti Koniyo M.P Dr. Drs. Sukarman Kamuli M.Si	Model Pembelajaran Multikultural Untuk Peningkatan Kapasitas Belajar Dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat Pesisir Dan Terisolir	FMIPA	PUPT	112.000.000 78.750.000(70%) 30.750.000 (30%)	Rp. -
	Drs. Yamin Ismail M.Pd Drs. Abas Kaluku M.Si	Studi Filosofi Geometri Diferensial dan Ruang-Waktu	FMIPA	PUPT	125.000.000 87.500.000(70%) 37.500.000 (30%)	Rp. -
88	Marini Susanti Hamidun S.Si, M.Si Dr. Dewi Wahyuni K. Baderan S.Pd, M.Si Meilinda Modjo S.St.Par., MM.Par	Model Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat di Kawasan Konservasi Suaka Margasatwa Nantu-Boliyohuto Provinsi Gorontalo	FMIPA	PUPT	117.500.000 82.250.000(70%) 35.250.000 (30%)	Rp. -
89	Dr. Irwan S.KM, M.Kes Ekawaty Prasetya S.Si, M.Kes Drs. Sunarto Kadir M.Kes.	Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal Untuk Menanggulangi HIV/ Aids	FOK	PUPT	100.000.000 70.000.000(70%) 30.000.000 (30%)	Rp. -
90	Drs. Asri Arbie M.Si Lanto Ningrayati Amali S.Kom, M.Kom Nova E. Ntobuo S.Pd, M.Pd	Pengembangan Media Belajar Komik Pada Mata Pelajaran IPA Berbasis Budaya Gorontalo	FMIPA	PUPT	106.000.000 74.200.000(70%) 31.800.000 (30%)	Rp. -
91	Dr. Arwidayanto S.Pd, M.Pd Dr. Nina Lamatenggo S.E., M.Pd Warni Tune Sumar S.Pd	Efektivitas Kebijakan Program Pendidikan Untuk Rakyat (PRODIRA) Kontribusinya Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Konteks Budaya Huyula Dalam Pembiayaan Pendidikan Di Provinsi Gorontalo	FIP	PUPT	112.500.000 78.750.000(70%) 33.750.000 (30%)	Rp. -
92	Dr. Drs Sukarman Kamuli M.Si Dr. Rauf A. Hatu M.Si. Drs Zainal Abidin Umar M.Si	Pengembangan Model Pemberdayaan Perempuan Nelayan Melalui Kelompok Usaha Kreatif Di Kawasan Minapolitan	FIS	PUPT	142.500.000 99.750.000(70%) 42.750.000 (30%)	Rp. -
93	Prof. Dr Abdul Kadim Masaong, M.Pd Dr. Drs Arfan Arsyad M.Pd Dr. Asrin S.Ag, M.Pd	Pengembangan Model Pengelolaan Pendidikan Karakter Untuk Penguatan Transformasi Etos Siswa Di SMP Negeri Se Provinsi Gorontalo	FIP	PUPT	260.000.000 182.000.000(70%) 78.000.000 (30%)	Rp. -
94	Prof. Dr. Wenny Hulukati M.Pd Dra. Maryam Rahim M.Pd Dr. Drs Yusuf Jafar M.Pd	Pengembangan Panduan Untuk Meningkatkan Kompetensi Guru Melaksanakan Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah Gorontalo Bagi Usia Dini	FIP	PUPT	98.000.000 68.600.000(70%) 29.400.000 (30%)	Rp. -
95	Prof. Dr Asna Aneta S.Pd, M.Si Maha Atma Kadji M.Si Hais Dama	Koreksi Terhadap Implementasi Standard Pelayanan Publik Dan Disparitasnya Dalam Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Di Kota Gorontalo	FEKON	PUPT	150.000.000 105.000.000(70%) 45.000.000 (30%)	Rp. -
96	Prof. Dr. Ramli Utina M.Pd Elya Nusantari S.Pd, M.Pd Abubakar Sidik Katili S.Pd., M.Sc	Pendekatan Sosiolultural Dalam Pembelajaran Ekosistem Pesisir Berkarakter Di Sekolah Dasar Wilayah Pesisir	FMIPA	PUPT	108.770.000 76.139.000(70%) 32.631.000 (30%)	Rp. -

	Dr. Rauf Hatu M.Si. Abdul Rahman Pakaya S.E., M.Si Dra. Mery Balango M.Hum	Model Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo	FIS	PUPT	135.000.000 94.500.000(70%) 40.500.000 (30%)	Rp. -
98	Dr.Rustam Husain S.Ag, M.Pd Dr. Zulaecha Ngiu M.Pd	Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Riset Untuk Meningkatkan Kemampuan Belajar Siswa	FIP	PUPT	100.000.000 70.000.000(70%) 30.000.000 (30%)	Rp. -
99	Hasdiana S.Pd., M.Sn Dr. Ayuddin S.Pd, M.T I Wayan Sudana S.Sn., M.Sn	Model-model Rancangan Produk-produk Kriya Tekstil Aplikatif Dengan Memanfaatkan Limbah Kulit Jagung	FATEK	PUPT	250.000.000 175.000.000(70%) 75.000.000 (30%)	Rp. 25.000.000
100	Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa S.H., M.Hum Zuchri Abdussamad M.Si Nirwa Junus SH., MH	Kebijakan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Ikan Yang Berkelanjutan dan Berbasis Kearifan Lokal Pada Suku Bajo di Gorontalo	FHUKUM	PUPT	250.000.000 175.000.000(70%) 75.000.000 (30%)	Rp. 25.000.000
101	Prof. Kartin Lihawa M.Pd Dr. Rasuna Talib M.Hum Agus Lahinta ST., M.Kom	Pengembangan Kamus Istilah Adat Gorontalo dalam Bentuk Video Natural berbasis Web	FSB	PUPT	125.000.000 87.500.000(70%) 37.500.000 (30%)	Rp. -
102	Mukhlisulfatih Latief M.T Dr. Novri Youla Kandowangko M.P Rampi Yusuf S.Kom, M.T	Pengembangan Database Berbasis Image Clustering Untuk Identifikasi Tumbuhan Obat Warisan Budaya Gorontalo	FATEK	PUPT	152.500.000 (100%) 196.750.000 (70%) 45.750.000 (30%)	
103	Faizal Kasim Sitti Nursinar S.Pi., M.Si Citra Panigoro S.T, M.Si	Analisis Etnobotani Perubahan Mangrove dan Sistem Sosial Ekonomi Masyarakat untuk Pengelolaan Berkelanjutan Wilayah Pesisir Utara Gorontalo	FPIK	PUPT	72.500.000 50.750.000(70%) 21.750.000 (30%)	Rp. -
104	Dr. Dra Reni Hiola M.Kes Dr.Rama Hiola M.Kes Lanto Mohamad K. Amali S.T	Desain Ruang Kerja Ergonomis Bagi Pengrajin Karawo di Kabupaten Gorontalo	FOK	PUPT	130.000.000 91.000.000(70%) 39.000.000 (30%)	Rp. -
105	Dr. Drs Usman Moonti M.Si Dr.Sastro M. Wantu M.Si Asmun W. Wantu S.Pd, M.Sc	Depolitisasi Birokrasi dan Kebijakan Pengembangan Pertanian Agropolitan Jagung Dalam Meningkatkan Ekonomi Petani di Provinsi Gorontalo	FEKON	MP3EI	185.000.000 129.500.000(70%) 55.500.000 (30%)	Rp. 30.000.000
106	Dr.Amir Halid S.E., M.Si, A.Md Dr.Mohamad Ikbal Bahua SP. M.SI Ir. Zainudin Antuli M.Si	Pengembangan Produk Olahan Jagung Sebagai Lokomotif Perekonomian Masyarakat Di Provinsi Gorontalo	FEKON	MP3EI	183.000.000 128.100.000(70%) 54.900.000 (30%)	Rp. 30.000.00
107	Alfi Sahri Baruadi M.Si Prof.Dr. Ramli Utina M.Pd Abubakar Sidik Katili S.Pd., M.Sc	Penerapan Intervensi Sosial dan Intervensi Teknologi Pada Perikanan Artisanal Yang ramah Lingkungan Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Suku Bajo Di Provinsi Gorontalo	FPIK	MP3EI	148.000.000 103.600.000(70%) 44.400.000 (30%)	Rp. 50.000.000
108	Dr. Muhammad Amir Arham S.Pd Lukman Mile S.Pi, M.Si	Pengembangan Usaha Ikan Julung-Julung (Hemirhampus sp) Asap Sebagai Komoditi Lokal Unggulan Kabupaten Gorontalo utara.	FEKON	MP3EI	185.000.000 129.500.000(70%) 55.500.000 (30%)	Rp. 30.000.000
JUMLAH DANA					10.942.975.000 7.660.082.500 (70%) 3.282.892.500 (30%)	


 Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd
 NIP. 19600603198603 1 003